



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN SOEDJONO HOEMARDANI DALAM HUBUNGAN
EKONOMI INDONESIA-JEPANG 1967-1978**

SKRIPSI

**NURUL FADHILAH
0706279925**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN SOEDJONO HOEMARDANI DALAM HUBUNGAN
EKONOMI INDONESIA-JEPANG 1967-1978**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

**NURUL FADHILAH
0706279925**

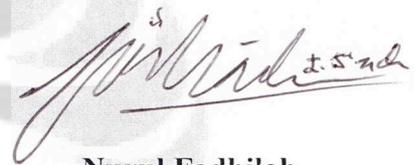
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 11 Juli 2012



Nurul Fadhilah

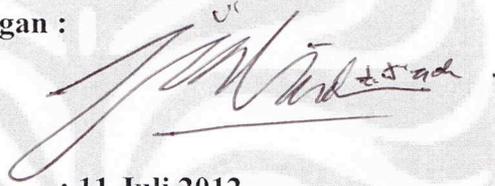
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nurul Fadhilah

NPM : 0706279925

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Nurul Fadhillah

NPM : 0706279925

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul : Peran Soedjono Hoemardani dalam Hubungan Ekonomi
Indonesia-Jepang 1967-1978

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

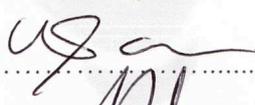
Ketua/Penguji : Abdurakhman, M. Hum

()

Pembimbing : Linda Sunarti, M. Hum

()

Penguji : Siswantari, M. Hum

()

Panitera : Didik Pradjoko, M. Hum

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 196 510231 99003 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan rangkaian studi sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi rangkaian akhir studi tersebut dan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Humaniora pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan merupakan usaha penulis semata, namun juga berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

- 1) Yang terhormat Ibu Linda Sunarti, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena selama ini telah terlalu banyak merepotkan.
- 2) Yang terhormat Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Sejarah, khususnya kepada Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah, Bapak Abdurakhman yang telah banyak membantu dan memberi dukungan sejak awal kuliah hingga akhir studi penulis dan kepada Ibu Siswantari selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam proses revisi skripsi ini.
- 3) Kepada kedua orang tua dan adik tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, yang dengan penuh kesabaran terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Kepada sahabat saya Adelia Wulandari yang telah berbagi suka maupun duka dan banyak memberikan semangat, motivasi, serta bantuan selama masa studi, khususnya ketika penyusunan skripsi ini. Tak lupa kepada Ibunda Adelia yang

juga telah banyak menghaturkan semangat dan do'a bagi penulis dalam masa studinya.

- 5) Kepada teman-teman sejarah angkatan 2007, Fikri, Rayi, Agung, Inu, Ami, Tiko, Gilang, Bob, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
- 6) Tak lupa juga kepada teman-teman sejarah angkatan lainnya, Kak Prima, Kak Rara, Kak Eha, Kak Fathia, Teh Isye, Kak Hendri, Kak Andi Arif, Iit yang telah banyak membantu sejak awal kuliah. Juga kepada Kak Hendaru yang banyak memberikan informasi terkait pencarian sumber dalam penyusunan skripsi ini dan Ivan Aulia yang bersedia meminjamkan koleksi buku-bukunya.

Dengan tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas semua kebaikan mereka. Dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk banyak pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang tertarik pada tema skripsi ini.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadhilah

NPM : 0706279925

Program Studi : Ilmu Sejarah

Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN SOEDJONO HOEMARDANI DALAM HUBUNGAN EKONOMI
INDONESIA-JEPANG 1967-1978**

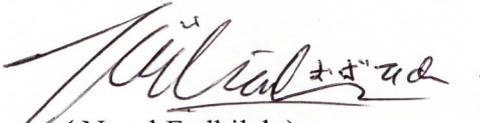
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 11 Juli 2012

Yang Menyatakan


(Nurul Fadhilah)

ABSTRAK

Nama : Nurul Fadhillah
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul Skripsi : Peran Soedjono Hoemardani dalam Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang 1967-1978

Pasca Perang Dunia II, Pemerintah Orde Baru memiliki cara pandang yang berbeda dengan Pemerintah Orde Lama dalam memandang Jepang. Cara pandang yang berbeda ini membuat corak diplomasi kedua Pemerintahan pun berbeda dalam menjalin hubungan kenegaraan dengan Jepang. Tulisan ini menitikberatkan pada pembahasan hubungan diplomasi Pemerintah Orde Baru dengan Pemerintah Jepang, khususnya di bidang ekonomi. Tidak seperti Pemerintahan sebelumnya, hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa Orde Baru ini dapat dikatakan dekat. Kedekatan ini tidak lepas dari peran salah seorang Asisten Pribadi (Aspri) Soeharto pada awal Pemerintahannya, yakni Soedjono Hoemardani. Lewat lobi-lobinya, ia berhasil membujuk Pemerintah Jepang untuk mengeluarkan berbagai bantuan ekonomi, pinjaman, hibah dan investasinya. Namun di sisi lain, ia dianggap sebagai antek Jepang yang membuat Jepang mendominasi perekonomian Indonesia sehingga menimbulkan kesenjangan di kalangan pengusaha nasional yang berujung pada Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) di tahun 1974. Perannya yang kontroversial ini membuatnya lengser dari jabatan Aspri. Meski jabatan tersebut dicabut, namun kedekatannya dengan Pemerintah Jepang masih tetap berlanjut dengan posisinya sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan. Walaupun hubungan tersebut tidak seintensif seperti ketika ia menjabat sebagai Aspri. Pasca Peristiwa Malari, hubungan Indonesia dengan Jepang berjalan normal kembali setelah Jepang mengubah cara diplomasinya secara "*Heart to Heart*".

Kata Kunci: Hubungan Indonesia-Jepang, Ekonomi Orde Baru dan Soedjono Hoemardani.

ABSTRACT

Name : Nurul Fadhilah
Study program: History Science
Title : The Role of Soedjono Hoemardani in Economic Relationship between Indonesia-Japan 1967-1978.

After The World War II, Indonesian government's perspective about Japan had changed. This changing differentiated The Old Order and The New Order's bilateral relationship between the two countries. This thesis emphasize on diplomacy between The New Order Government and Japanese Government particularly on economic diplomacy. In contrast to The Old Order Government, Indonesia-Japan relation under The New Order Government was close. This closeness was a result of Soedjono Hoemardani's diplomacy that had been commenced since the beginning of Soeharto's Government. At that time Soedjono Hoemardani was charged as Soeharto's Personal Assistance. By his lobbies, he succeeded to persuade Japanese Government to give some financial assistances through investment, grant, and credit. Nevertheless, he was judged as Japan puppet whose duty helping Japanese Government dominated economy of Indonesia on which the domination caused social discrepancy between local industrialist and Japanese industrialist that lead to The Malari Riot (riot at January 15th) 1974. This controversial role led him to retire from his position as Soeharto's Personal Assistance. Even though he had left his formal position as Soehartos's Personal Assistance, his close relation with Japanese Government set him remain lobbying Japanese Government under his new position as General Inspectorate of Development. However, the intensity of the relation was not as high as it used to be. After The Malari, Indonesia-Japan relationship returned to be normal because Japanese Government changed their diplomacy strategy to "heart to heart" diplomacy.

Keyword: Indonesia-Japan Relationship, The New Order's Economy, Soedjono Hoemardani.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4 Tujuan	10
1.5 Metode Penulisan	10
1.6 Tinjauan Sumber Pustaka	11
1.7 Sistematika Penulisan	14
2. HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-JEPANG 1957 HINGGA AWAL 1970AN	15
2.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Jepang dalam Bidang Ekonomi	15
2.1.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Ekonomi Masa Orde Lama dan Awal Orde Baru (1957-1967).....	16
2.1.2 Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam Bidang Ekonomi Pasca Perang Dunia II.....	22
2.2 Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang pada masa Orde Lama.....	24

2.3 Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang pada Masa Awal Orde Baru.....	28
2.3.1 Masuknya Modal Jepang pada Masa Awal Orde Baru	29
2.3.2 Pengaruh <i>Oil Boom</i> terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia.....	33
3. PERAN SOEDJONO HOEMARDANI DALAM HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-JEPANG 1967-1978	37
3.1 Latar Belakang Soedjono Hoemardani.....	37
3.1.1 Perjalanan Karir Soedjono Hoemardani.....	37
3.1.2 Pandangan Soedjono Hoemardani terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia	43
3.2 Awal Keterlibatan Soedjono Hoemardani dalam Hubungan Indonesia- Jepang.....	46
3.3 Soedjono Hoemardani dan Peristiwa Malari	54
3.4 Peran Soedjono Hoemardani dalam Hubungan Indonesia-Jepang Pasca Peristiwa Malari	61
4. KESIMPULAN	76
DAFTAR REFERENSI	81
LAMPIRAN	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sambutan Soedjono Hoemardani Selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Indonesia-Jepang Ketiga, Jakarta-Yogyakarta, 3-6 Mei 1976.....	87
Lampiran 2	Keputusan Presiden mengenai Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.....	93
Lampiran 3	Investasi Jepang di Luar Negeri Berdasarkan Sektor dan Tempatnya pada Kurun Waktu 1951-1969	98
Lampiran 4	Proyek-proyek untuk Pembangunan Sipil	99
Lampiran 5	<i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) yang Disetujui di Indonesia selama periode 1967-1980.....	100
Lampiran 6	ODA Jepang bagi Indonesia 1966-1978.....	101
Lampiran 7	Japanese Crude Oil Import by Source.....	102
Lampiran 8	Soedjono Hoemardani	103
Lampiran 9	Soedjono Hoemardani Membangun Hubungan Indonesia-Jepang.....	104
Lampiran 10	Soedjono Hoemardani dan Proyek Asahan.....	105
Lampiran 11	Pelantikan Empat Orang Irjenbang.....	106
Lampiran 12	Soedjono Hoemardani Menerima Tanda Jasa Bintang Harta Kelas I.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Hubungan Indonesia-Jepang pada masa pemerintahan Soeharto berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno. Dimana hubungan antara Indonesia dengan Jepang pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru)¹ dapat dikatakan dekat, tidak seperti halnya pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama). Ada beberapa faktor, baik intern maupun ekstern, yang membuat hubungan antara Indonesia-Jepang ini dekat, antara lain kebijakan ekonomi dan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada masa itu, serta iklim perpolitikan internasional, dimana pada saat itu tengah terjadi pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Salah satu bukti yang dapat menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang dekat ketika masa Orde Baru adalah dengan munculnya Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia pada periode 1967-1980. Tidak hanya investasi, bidang ekspor impor pun menjadi primadona dalam hubungan Indonesia-Jepang. Di luar itu, kucuran bantuan finansial dari Jepang juga membanjiri neraca pembayaran Indonesia pada ruas kredit, baik bantuan yang sifatnya bilateral maupun multilateral dibawah suatu badan moneter. Oleh karenanya hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa Orde Baru dikatakan lebih dekat jika dibandingkan pada masa Orde Lama.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali hubungan yang terjalin antar Jepang dengan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. *Pampasan perang* sebagai ganti rugi masa pendudukan Jepang menjadi isu utama dalam hubungan diplomasi Indonesia dengan Jepang.² Nishihara dalam bukunya yang berjudul *Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang 1951-1966*, menyatakan bahwa latar belakang Jepang menjalin

¹ Soeharto dan para pembantunya yang menegakkan istilah Orde Baru ini, untuk membedakan pemerintahannya dengan pemerintahan masa Soekarno --yang kemudian disebut dengan Orde Lama. M. C. Ricklefes, 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, Hal. 432.

² Pampasan perang ini merupakan permintaan dari Perjanjian San Francisco 1951 yang menghendaki Jepang untuk memberikan ganti rugi pada negara-negara yang telah didudukinya selama Perang Dunia II.

hubungan dengan Indonesia dilatarbelakangi oleh komitmen Jepang membantu Indonesia dengan memberikan ganti rugi '*pampasan perang*'.³ Pada dasarnya, konsep '*pampasan perang*' ini merupakan terobosan bagi Jepang untuk membangun hubungan yang bersahabat dengan negara-negara di Asia Tenggara pasca Perang Dunia II. Dengan adanya proyek pampasan perang yang ditandatangani pada tanggal 15 April 1958 ini, Indonesia menjadi penerima dana bantuan terbesar dari Jepang.

Selain dari pampasan perang, tahun 1959 Indonesia juga meminjam dana kepada Jepang sebesar \$81,7 juta atau dapat dikatakan \$94,76 juta beserta bunganya. Dana pinjaman yang diberikan empat kali pada kurun waktu 1959-1963 ini, jaminannya adalah dana pampasan perang. Pada akhirnya dana pampasan perang habis digunakan untuk melunasi pinjaman ini beserta bunganya.⁴ Selain dari pinjaman bilateral tersebut, ada pula pinjaman bersyarat yang dipusatkan lewat *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI) pada tahun 1966, dimana Jepang menjadi salah satu negara penyandang dana.⁵

Setelah tampuk kekuasaan beralih ke tangan Soeharto pada bulan maret 1967,⁶ kesempatan Jepang untuk menanamkan pengaruhnya lewat penanaman modal semakin besar. Hal ini dikarenakan titik fokus dari pemerintahan Soeharto lebih ditekankan pada pembenahan ekonomi yang tentunya membutuhkan modal besar. Disamping itu, berbagai kondisi keterpurukan ekonomi, warisan dari pemerintahan sebelumnya, menghambat proses pembangunan. Pada saat itu inflasi mencapai sekitar 650% setahun. Ekspor di tahun 1966 hanya bernilai kurang dari \$500 juta --tanpa minyak bumi (padahal di tahun 1950 ekspor Indonesia di luar minyak bumi mencapai \$500 juta hingga \$1 milyar). Pada saat itu hutang luar negeri Indonesia juga mencapai \$2,3 milyar yang harus dibayarkan pada tahun 1967, ditambah dengan tunggakan-tunggakan sebelumnya yang

³ Lihat Masashi Nishihara, 1994, *Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1996*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

⁴ Neneng Konety, 1996, *Pengaruh Bantuan Ekonomi Jepang terhadap Indonesia dalam Meningkatkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*, Bandung: FSIP UNPAD.

⁵ IGGI merupakan sebuah lembaga yang mengkoordinasi pembahasan mengenai bantuan keuangan untuk Indonesia. Sumantoro, 1984, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Bandung: Penerbit Alumni, Hal. 435.

⁶ Pada tanggal 20 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaannya pada Pengembalian Ketetapan MPRS Nomor IX / MPRS / 66, yakni Soeharto. Dan pada Sidang Istimewa Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai Presiden berdasarkan TAP MPRS Nomor XXXIII / MPRS / 1967.

diperkirakan mencapai \$500 juta.⁷ Di sisi lain, skala ekonomi yang gagal mengimbangi pertumbuhan penduduk menyebabkan lonjakan akan kebutuhan impor pangan negara sekitar 10% pada tahun 1966.⁸

Sebagai langkah awal untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan upaya pembenahan ekonomi dengan menggariskan Trilogi Pembangunan. Cakupan Trilogi Pembangunan adalah program penyelamatan; program stabilisasi dan rehabilitasi; serta program pembangunan. Khusus program stabilisasi dan rehabilitasi, ini merupakan program jangka pendek dengan skala prioritas pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, dan peningkatan kegiatan ekspor. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah pembenahan secara fisik sarana dan prasarana ekspor, serta alat-alat produksi yang mengalami kerusakan. Program jangka pendek ini telah menekan inflasi dari 650% di tahun 1966 menjadi 120% di tahun 1967, dan pada tahun 1968 menjadi 85%.⁹

Upaya pembenahan ekonomi dan wacana pembangunan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah melakukan usaha pencarian modal pembangunan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Usaha pencarian modal dari luar negeri, salah satunya diupayakan lewat penanaman investasi asing. Komitmen pemerintah untuk pembangunan mendorong pemerintah untuk terbuka pada Penanaman Modal Asing (PMA),¹⁰ proyek-proyek kerjasama dan perdagangan ekspor impor. Hal ini semakin nyata dengan dikeluarkannya peraturan Penanaman Modal Asing No. 1 / 1967 yang mulai diberlakukan tanggal 10 Januari 1967. Pada mulanya Rancangan Undang-Undang PMA ini telah diajukan ke DPR-Gotong Royong pada November 1966. Hanya saja berjalan alot karena dikaitkan dengan masalah nasionalisme, berdikari dan kekhawatiran akan kolonialisme&imperialisme. Menanggapi suara yang

⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 430 dikutip dari Widjojo Nitisastro, "Rencana Pembangunan Lima Tahun", *Administrasi Negara*, No. 3, Tahun X, November 1970, hal. 4

⁸ H. W. Arndt, 1991, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Yogyakarta: UGM Press, Hal. 82.

⁹ H. W. Arndt, *Ibid*, Hal. 87.

¹⁰ Istilah penanaman modal sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Lihat Pandji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multi Nasional: Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya.

masih keberatan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut, Soeharto yang pada saat itu berkedudukan sebagai Ketua Presidium mengemukakan dua alternatif.

Ada dua jalan untuk menggali kekayaan Indonesia, yaitu membiarkannya sampai Indonesia mempunyai modal, skill, dan kemampuan teknologi atau bekerjasama dengan modal asing. Saya mengambil jalan kedua, yaitu mengadakan kerjasama dengan modal asing.¹¹

Selain berusaha untuk menarik modal asing, pemerintah juga mengadakan rescheduling (penjadwalan/pengaturan kembali) hutang-hutang lama dan mengusahakan bantuan keuangan dari luar negeri.¹²

Terbukanya kran penanaman modal asing dari pemerintah Indonesia, menjadikan beberapa negara asing —seperti Amerika Serikat dan Jepang— sebagai negara penanam modal terbesar di Indonesia. Jepang sendiri memiliki agenda utama ekonomi luar negeri yang lebih difokuskan pada pencarian pasar untuk penjualan produknya terutama ke Asia Tenggara, pencarian sumber daya alam seperti minyak bumi dan LNG untuk proses produksinya, dan juga penanaman modal (investasi). Jika melihat situasi&agenda ekonomi dari Indonesia dan Jepang, secara teori terlihat adanya *simbiosis mutualisme* (hubungan atas dasar saling menguntungkan/saling membutuhkan) antara pemerintahan Jepang yang ingin menanamkan investasinya&mencari sumber daya alam energi, dengan pemerintahan Indonesia dibawah Soeharto yang membutuhkan modal untuk membangun ekonominya&mencari pasar untuk ekspor energi guna menambah pemasukan negara. Hal ini pulalah yang melatarbelakangi kedekatan hubungan Indonesia-Jepang pada masa Orde Baru.

Selain dari investasi, Indonesia juga mendapat bantuan dana dari Jepang, baik secara langsung ataupun lewat sebuah institusi multilateral seperti IGGI (*Intergovernmental Group for Indonesia*).¹³ Di awal pemerintahan Soeharto, tahun 1967, Jepang menjanjikan US\$34,3 juta bagi pemerintah Indonesia dalam rangka

¹¹ G. Dwipayana, Nazaruddin Sjamsuddin (Ed.), 1991, *Jejak Langkah Pak Harto*, Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Hal. 363

¹² Istilah bantuan luar negeri mengacu pada perpindahan sumber dana dari satu atau lebih negara maju, dapat berupa dana langsung atau dalam bentuk komoditas barang yang diberikan oleh negara donor. Zulkarnain Djamin, 1984, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Sejak Repelita Pertama*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Hal. 120.

¹³ Lembaga ini merupakan konsorsium negara-negara donor bagi Indonesia.

pemulihan ekonomi Indonesia.¹⁴ Setelahnya, bantuan ekonomi bilateral Jepang untuk Indonesia terangkum dalam ODA (*Official development Assistance*). Dalam rangka pemberian pinjaman yen, Jepang menginvestasikan hibahnya tersebut untuk proyek-proyek besar energi dan sumber alam, salah satunya adalah di sektor perminyakan (Pertamina), proyek LNG dan Proyek Asahan. Impor minyak bumi dan LNG dari Indonesia menjadi isu utama dalam wacana perdagangan ekspor impor Indonesia-Jepang. Jepang juga banyak berinvestasi dengan mendirikan perusahaan-perusahaan patungan di Indonesia (*joint venture*) seperti KTSM (*Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills*).

Namun nampaknya upaya Jepang untuk berperan dalam perekonomian Indonesia menghadapi tantangan pada tahun 1974. Tanggal 15 Januari 1974 terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang menyuarakan anti-Jepang dan anti Pemerintah bersamaan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta. Peristiwa ini lebih akrab dikenal dengan sebutan “Peristiwa Malari”. Dalam aksinya para demonstran membakar mobil dan toko milik Jepang.

Uniknya setelah peristiwa ini, tahun 1975 ekspor Jepang ke Indonesia tetap mengalami peningkatan dari \$1.450.336.000 pada tahun 1974 menjadi \$1.849.801.000, hanya saja impor Jepang dari Indonesia pada tahun yang sama mengalami penurunan dari \$4.571.522.000 pada tahun 1974 menjadi \$3.430.263.000.¹⁵ Tidak pula terjadi perubahan agenda kerjasama ekonomi pemerintah kedepannya, bantuan finansial Jepang lewat ODA dan IGGI pun tetap berjalan. Ini bisa menjadi indikasi bahwa Peristiwa Malari tidak berpengaruh besar terhadap kedekatan hubungan pemerintah dengan negeri sakura tersebut. Meski demikian, kerusuhan ini secara tidak langsung menjadi momok pemikiran Jepang untuk mengurangi kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Hal ini dikemudian hari mengilhami Jepang untuk mengganti strategi diplomasi ekonominya dengan Indonesia secara “*heart to heart*”.¹⁶ Pertanyaan yang

¹⁴ Ani Soetjipto, 2000, “Progress Report Analysis of Japan’s Aid Policy to Indonesia” dalam *Japan’s Official Development Assistance to Indonesia*, Jakarta: Center for Japanese Studies bekerja sama dengan JICA, Hal. 84

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Laporan Ekspor-Impor tahunan 1974 dan 1975*, Jakarta: BPS

¹⁶ *Heart to heart* adalah upaya Jepang untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia agar lebih bersahabat atas dasar saling pengertian. Ini

kemudian muncul adalah: “Mengapa Peristiwa Malari ini tidak berpengaruh besar pada pola hubungan Indonesia-Jepang pada saat itu?”. “Mungkinkah ada peran seorang tokoh yang membuat hubungan Indonesia dengan Jepang tetap stabil meski ada kerusuhan seperti Peristiwa Malari sekalipun?”.

Tak dapat dipungkiri, kedekatan hubungan antara Indonesia-Jepang pada masa Orde Baru ini tidak terlepas dari peran beberapa tokoh, seperti Ahmad Soebardjo, Adam Malik, Ibnu Sutowo, Soedjono Hoemardani, Ali Moertopo, Widjojo Nitisastro, dll. Hubungan Indonesia dengan Jepang, terutama dalam bidang ekonomi, banyak dipengaruhi oleh lobi-lobi Soedjono Hoemardani. Sehingga tak heran jika ia mendapat julukan ‘Dukun Jepang’ atau ‘Haji Tokyo’¹⁷ karena kedekatannya itu, meski julukan ini berkonotasi negatif. Walaupun tidak kental dengan pendidikan ekonomi, pada tahun 1966 Soedjono Hoemardani ditunjuk sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto untuk bidang Ekonomi. Dan faktanya Soedjono Hoemardani memang merupakan seorang figur yang penting dalam membidani hubungan ekonomi Indonesia-Jepang ini. Nama Soedjono Hoemardani baru dikenal pada masa awal Orde Baru, namun sebetulnya karir politik dan militernya bersama Soeharto telah dimulai sejak tahun 1950an. Kedekatan Soedjono Hoemardani dengan Soeharto yang terjalin dari tahun 1956, menjadikan Soedjono Hoemardani sebagai kaki tangan sekaligus penasihat kenegaraan dan spiritual Soeharto pada masa Orde Baru.

Soedjono Hoemardani ditunjuk Soeharto menjadi Staf Pribadi (Spri) yang kemudian diubah menjadi Asisten Pribadi (Aspri), untuk bidang ekonomi dan perdagangan pada 1966 hingga dibubarkannya Aspri pada 1974. Spri dibentuk oleh Soeharto ketika menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet pada 28 Juli 1966. Spri terdiri dari lima Jenderal AD dan lima ahli ekonomi, dengan Alamsjah Ratuperwiranegara sebagai Koordinator Spri. Spri inilah yang dalam masyarakat luas dinggap sebagai “kabinet bayangan”. Ahli-ahli ekonomi Spri itu yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohammad Sadli, dan Subroto. Mereka inilah yang bertugas menyusun rencana ekonomi. Spri maupun Aspri

merupakan realisasi dari Doktrin Fukuda yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Fukuda pada 18 Agustus 1977 di Manila. Doktrin ini merupakan suatu upaya untuk memperbaiki citra bangsa Jepang terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya, dan terhadap dunia pada umumnya.

¹⁷Francois Raillon, 1985, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

merupakan lembaga ekstra yudisial yang tidak ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti halnya lembaga-lembaga lain yang sebelumnya telah dibentuk Soeharto (Optibus, Litsus).

Hadi Soesastro —salah satu rekan dekat Soedjono Hoemardani di CSIS— dalam buah penanya yang berjudul *Pertumbuhan Ekonomi dengan Keadilan*, menyebutkan: “Peranan yang dimainkan Soedjono Hoemardani ini —perihal hubungan Indonesia dengan Jepang masa Orde Baru— mungkin termasuk yang paling nampak dan mungkin juga paling kontroversial, terutama karena diselenggarakannya tanpa banyak ribut-ribut dan tidak di publikasikan walaupun tidak pernah disembunyikan.”¹⁸ Namun pada kenyataannya hubungan Indonesia-Jepang ini memang dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan (baik teknokrat, mahasiswa, ataupun pengusaha). Hal yang melatarbelakangi Soedjono Hoemardani menjalin kedekatan hubungan dengan Jepang adalah pandangannya mengenai “Integrasi Ekonomi Nasional”. Bagi Soedjono Hoemardani, hubungan internasional yang sehat adalah dengan terciptanya integrasi ekonomi internasional (hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain dan ekonomi dunia). Hal ini berarti bahwa hubungan tersebut dapat dinikmati manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.¹⁹ Kedekatannya dengan Jepang ini dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dalam memperoleh modal pembangunan. Proyek Asahan di Sumatera adalah salah satu dari buah lobinya dengan Jepang.

Sampai dengan saat ini cukup banyak karya yang mengangkat tema hubungan Indonesia-Jepang baik berupa buku, karya ilmiah, ataupun jurnal. Karya ilmiah yang banyak penulis temukan mengenai tema ini pada umumnya mengambil kurun waktu era 80an. Karya-karya ilmiah tersebut antara lain laporan penelitian dari Mohammad Nu'man yang berjudul *Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Menarik Investasi Jepang (1986-1989)*, laporan penelitian dari Mohammad Mossadeq yang berjudul *Modal Asing dan Ketergantungan Studi Awal terhadap PMA Jepang di Indonesia*, tesis yang disusun oleh Windratmo dengan judul *Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia dan Diplomasi Jepang Indonesia*

¹⁸ Hadi Soesastro, 1987, *Pertumbuhan Ekonomi dengan Keadilan*. Dalam *Soedjono Hoemardani: Pendiri CSIS 1918-1986*, Jakarta: CSIS, Hal 38

¹⁹ Hadi Soesastro, *Ibid.*, Hal 42

(Studi Kasus: Kebijakan Ekonomi Indonesia di Bidang Mobil Nasional). Kurun waktu yang ditekankan dalam tulisan-tulisan ini adalah dekade 1980an dan 1990an.

Penulis berniat untuk melengkapi tulisan berkisar topik hubungan Indonesia-Jepang ini. Namun karena banyak tulisan yang mengambil tema tahun 1980-1990an, maka diambillah kurun waktu pada awal masa pemerintahan Orde Baru di tahun 1970an, yang menurut penulis masih belum tersentuh. Ada juga tulisan yang mengambil tokoh sebagai objek kajiannya, seperti artikel dari jurnal Southeast Asia Program Publications, Cornell University yang berjudul *Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relations 1966-1974* yang ditulis oleh Michael Malley. Artikel ini merupakan gambaran ringkas mengenai lobi politik Soedjono Hoemardani dengan Pemerintah Jepang dalam kurun waktu 1966 hingga 1974. Hanya saja artikel ini berhenti di tahun 1974 dimana Soedjono menanggalkan jabatannya sebagai Aspri. Dan dalam artikel ini tidak tergambar bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik masing-masing negara yang sejatinya mempengaruhi iklim hubungan/kerja sama antara Indonesia dengan Jepang pada masa itu, terutama setelah terjadinya Peristiwa Malari. Dimana setelah terjadinya Peristiwa Malari, Jepang mencari nuansa baru dalam menjalin hubungan dengan Indonesia dan pada saat itu Soedjono Hoemardani menjabat sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan. Artikel ini juga tidak menyoroti sosok/latar belakang dan pandangan Soedjono Hoemardani sendiri terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Inilah yang menjadi pembeda sekaligus yang melatarbelakangi penulis dalam menggarap tulisan ini. Penulis memilih bahasan tokoh Soedjono Hoemardani karena menurut penulis sosok Soedjono memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam hubungan bilateral kedua negara kala itu. Dalam tulisan ini, penulis berusaha memaparkan gambaran hubungan ekonomi Indonesia-Jepang dengan fokus bahasan dalam aspek ekonomi pada kurun waktu 1967-1978. Dimana periode setelah Peristiwa Malari di tahun 1974 merupakan tonggak waktu yang tidak dapat dipisahkan untuk melihat bagaimana peran Soedjono Hoemardani dalam membidani hubungan Indonesia-Jepang pada kurun waktu tersebut. Tulisan ini juga berusaha untuk tidak mengesampingkan gambaran

kondisi ekonomi, sosial dan politik masing-masing negara, Indonesia maupun Jepang, yang kemudian melatarbelakangi kedua negara ini untuk menjalin hubungan/kerja sama ekonomi. Dan untuk melihat mengapa sosok Soedjono Hoemardani yang dipercaya Pemerintah Orde Baru dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah Jepang, maka penulis juga memaparkan bagaimana latar belakang dari figur seorang Soedjono Hoemardani dan pandangannya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah “Bagaimana peran Soedjono Hoemardani dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang pada kurun waktu 1967-1978?”. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain :

- a) Bagaimana gambaran umum hubungan ekonomi Indonesia-Jepang pada kurun waktu 1957 hingga awal 1970an?
- b) Bagaimana latar belakang Soedjono Hoemardani sebagai sosok yang dipercaya Pemerintah Orde Baru dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah Jepang?
- c) Bagaimana peran Soedjono Hoemardani dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang pada saat itu?

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup inti pembahasan tulisan ini adalah peran dari Soedjono Hoemardani dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang pada kurun waktu 1967 hingga 1978. Ruang lingkup aspek pembahasannya terbatas pada hubungan Indonesia-Jepang dalam aspek ekonomi seperti proyek kerjasama ekonomi, investasi, bantuan ekonomi, ataupun perdagangan yang didalamnya terdapat peran dari Soedjono Hoemardani. Namun tentunya juga memperhatikan aspek politik-sosial Indonesia dan Jepang agar suasana zamannya dapat terlihat lebih jelas dan saling berkaitan. Selain dari gambaran hubungan Indonesia-Jepang, dibahas pula sekilas mengenai sosok seorang Soedjono Hoemardani sebagai tokoh yang memiliki peranan dalam hubungan bilateral ini dan bagaimana pandangannya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Sedangkan lingkup waktu dari tulisan ini dimulai dari tahun 1967 dimana tahun ini merupakan awal dari Pemerintahan Soeharto dan pada saat itu Soedjono Hoemardani menjabat sebagai Spri bidang ekonomi. Diakhiri tahun 1978 dimana pada saat itu Jepang mengubah strategi pendekatan diplomasinya dengan “*heart to heart*” dan Soedjono Hoemardani saat itu berkedudukan sebagai Inspektur Jenderal pembangunan setelah terjadinya serangkaian reaksi anti-Jepang (Peristiwa Malari) yang terjadi di Indonesia. Namun untuk melihat latar belakang dari hubungan Indonesia-Jepang ini, maka disinggung pula sedikit mengenai hubungan Indonesia-Jepang ditarik dari tahun 1950an.

4. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kiprah dari Soedjono Hoemardani dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang pada kurun waktu 1967-1978. Dalam tulisan ini, disinggung juga gambaran dinamika hubungan Indonesia-Jepang yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

5. Metode

Metode yang digunakan merupakan tahapan dari penulisan sejarah, yakni *heuristik, kritik, interpretasi, dan kemudian historiografi*.²⁰ Dalam tahap heuristik guna mengumpulkan sumber primer berupa surat kabar ataupun majalah sezaman, penulis melakukan pencarian sumber di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Litbang Kompas dan Litbang Tempo. Dari Perpustakaan Riset Bank Indonesia (BI), penulis memperoleh laporan tahunan BI dan publikasi BPS. Sedangkan untuk sumber sekundernya banyak ditemukan di PNRI, Perpustakaan Pusat, FIB UI, FISIP UI, FE UI, PKPM & Perpustakaan Pusat Unika Atmajaya, CSIS dan PDII LIPI berupa buku, karya ilmiah ataupun artikel jurnal.

Setelah sumber terkumpul dilakukan tahapan kedua yaitu kritik. Sumber-sumber yang telah diperoleh dikritik baik internal ataupun eksternal. Kritik internal dilakukan dengan cara melakukan analisa agar dapat diperoleh data yang

²⁰ Lihat Nugroho Notosusanto, 1971, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*, Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI. Dalam buku ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *heruristik* adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau. *Kritik* adalah menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya. *Interpretasi* adalah menafsirkan keterangan-keterangan sumber. Sedangkan *Historiografi* merupakan penyajian yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah.

terpercaya untuk digunakan dalam penelitian. Kritik eksternal (otentisitas) dilakukan dengan cara bentuk fisik data yang diperoleh. Kemudian mempertimbangkan apakah suatu sumber bisa digunakan atau tidak setelah dilakukan validasi sumber. Setelah melalui proses kritik sumber, data-data yang diperoleh diinterpretasikan menjadi fakta. Data yang diperoleh, tidak semuanya dimasukkan ke dalam tulisan, dalam hal ini hanya data yang relevan saja yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Laporan penelitian yang penulis dapat dari PDII LIPI, banyak yang tidak mencantumkan keterangan mengenai sumber data/informasi, sehingga harus menelaah kembali lewat tulisan lain untuk memastikan kejelasan sumber data. Selain itu keterangan mengenai tempat, waktu dan tokoh juga seringkali tidak tertulis dengan jelas, hal ini dikarenakan pisau bedah dari tulisan ini di luar ilmu sejarah.

Kemudian langkah terakhir adalah menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk historiografi. Dalam tahap ini, penulis merekonstruksi peristiwa tentang Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang pada Kurun Waktu 1967 hingga 1978, dengan mengangkat seorang tokoh yang berperan dalam menjalin hubungan tersebut, yakni Soedjono Hoemardani. Dengan bentuk tulisan naratif yang disajikan secara deskriptif-analitis serta memperhatikan aspek kronologis.

6. Tinjauan Sumber Pustaka

Sumber-sumber literatur, baik sumber primer maupun sekunder yang mengangkat topik hubungan ekonomi Indonesia-Jepang ini cukup banyak. Dalam melakukan penelitian, penulis banyak meninjau surat kabar sebagai sumber primer, baik yang terbit harian, mingguan maupun tiga bulanan. Salah satu surat kabar harian yang dijadikan sumber antara lain Indonesia Raya (PNI dan PSI) dan Trompet Masyarakat, dimana pemberitaan dari kedua surat kabar ini cenderung kritis dalam mengkritik kebijakan Pemerintah, terutama terkait masalah investasi penanaman modal Jepang di Indonesia. Selain itu ada juga Business News, surat kabar ini terbit tiga mingguan. Sesuai dengan namanya surat kabar ini cenderung memberitakan kondisi pasar, perdagangan, investasi yang dilengkapi dengan angka-angka statistik selain dari pemberitaan verbal. Surat kabar yang lainnya adalah *Suara Karya* —dipelopori oleh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani— dan surat kabar *Pelita*.

Sumber primer lainnya yang berkaitan erat dengan tulisan ini adalah laporan tahunan dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan tahunan BI memuat berbagai informasi mengenai investasi, catatan-catatan perjanjian kerjasama, pinjaman dan bantuan, serta neraca perdagangan luar negeri antara Indonesia dengan Jepang. Sedangkan laporan tahunan BPS memaparkan informasi mengenai ekspor-impor tahunan yang dilakukan Indonesia, khususnya dengan Pemerintah Jepang dalam kurun waktu 1967-1978.

Adapun sumber sekunder yang bersinggungan dengan topik ini berupa karya ilmiah (tesis), laporan penelitian, artikel jurnal, dan juga buku referensi. Salah satunya adalah tesis yang ditulis oleh Windratmo berjudul *Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia dan Diplomasi Jepang Indonesia (Studi Kasus: Kebijakan Ekonomi Indonesia di Bidang Mobil Nasional)*. Tulisan ini mengungkap studi kasus mobil nasional sebagai implikasi dari terjalinnya hubungan dengan Jepang. Dimana penekanan dari tulisan ini adalah dekade 1980an dan 1990an. Juga Laporan penelitian yang ditulis oleh Mohammad Mossadeq yang berjudul *Modal Asing dan Ketergantungan Studi Awal terhadap PMA Jepang di Indonesia*. Laporan penelitian ini menggambarkan investasi Jepang yang masuk ke Indonesia hingga dengan tahun 1987. Hanya saja tulisan dari beliau ini tidak didukung dengan sumber primer oleh karena tulisan ini merupakan studi awal yang dapat dikaji lagi lebih mendalam. Laporan penelitian lainnya yang dijadikan bahan rujukan adalah karya Neneng Konety yang berjudul *Pengaruh Bantuan Ekonomi Jepang terhadap Indonesia dalam Meningkatkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Tulisan ini memberikan informasi mengenai jenis bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia hingga tahun 1990an. Pemaparan tulisan ini menggunakan pisau bedah dan kerangka teori ilmu politik. Dan karya dari Mohammad Nu'man yang berjudul *Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Menarik Investasi Jepang (1986-1989)*. Dimana tulisan ini berisi tentang analisa kebijakan Pemerintah yang berupaya untuk menarik investasi asing, terutama Jepang. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan PMA khususnya dekade 1980an.

Penulis juga merujuk artikel yang ditulis oleh Michael Malley dalam jurnal Southeast Asia Program Publication, Cornell University yang berjudul

Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relations 1966-1974. Artikel ini menggambarkan hubungan Indonesia dan Jepang dari tahun 1966 hingga 1974, dimana Soedjono Hoemardani saat itu berkedudukan sebagai Aspri. Tulisan ini tidak menggambarkan bagaimana kondisi dalam negeri kedua negara saat itu. Tidak tergambar pula siapakah sebenarnya sosok Soedjono Hoemardani. Namun penulis banyak menemukan informasi terkait dalam tulisan ini yang dapat dijadikan sumber rujukan.

Selain itu ada juga buku yang diterbitkan oleh CSIS berjudul *Japan-Indonesia Relations in The Context of Regionalism in Asia*. Buku ini merupakan kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Indonesia-Jepang ketiga di Indonesia pada tanggal 3-6 Mei 1976. Buku ini menginformasikan perkembangan prospek, masalah dan solusi mengenai hubungan Indonesia-Jepang kedepannya. Terbitan CSIS lainnya adalah *Soedjono Hoemardani: Pendiri CSIS 1918-1986*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari orang-orang yang dekat dengan Soedjono Hoemardani dan dipersembahkan untuk mengenang satu tahun kepergiannya. Dalam buku ini terlihat bagaimana penilaian dari para penulis akan sosok seorang Soedjono Hoemardani dan pengalaman si penulis bersamanya. Ada juga buku yang membahas mengenai hubungan Indonesia-Jepang pada masa Orde Lama, yakni karya Masashi Nishihara yang berjudul *Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan pampasan perang: hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1966*. Dimana dalam buku ini digambarkan bagaimana hubungan Indonesia-Jepang pada masa pemerintahan Soekarno dilihat dalam aspek politik dan ekonomi sebagai tonggak awal Jepang menancapkan pengaruhnya setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Penulis juga meninjau sumber sekunder lainnya berupa terbitan tak berkala milik LIPI yang ditulis oleh Lie Tektjeng & Yoshida Teigo berjudul *Some Remarks on The Problems and Difficulties Besetting Present-Day Indonesia-Japanese Relations*. Tulisan ini merupakan artikel dalam jurnal *Bagian Asia Timur* No. IX/11 yang telah dibukukan dan telah disampaikan dalam Konferensi Leverhulme, 10-15 Maret 1969. Dalam tulisan ini dipaparkan masalah-masalah yang terjadi sekitar hubungan Jepang-Indonesia yang dikaitkan dengan kehidupan masyarakat internasional pasca Perang Dunia II. Terbitan tak berkala lainnya adalah *An Indonesian Perspective: Japanese-Indonesian Relations in The*

Seventies yang ditulis oleh Lie Tekjeng. Dimana tulisan ini pernah disampaikan di Internasional House of Japan, Tokyo pada 7 September 1971. Tulisan ini mengkaji hubungan Indonesia-Jepang dilihat dari dua pendekatan, internal/dalam negeri (peristiwa PRRI, Gestapu, pemerintahan awal Soeharto) dan eksternal/luar negeri (dalam konteks Perang Dingin).

7. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari empat bagian, yakni bab 1 yang merupakan pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan, metode, tinjauan sumber pustaka serta sistematika penulisan.

Bab 2 dari tulisan ini mendeskripsikan bagaimana hubungan ekonomi Indonesia-Jepang dalam kurun waktu 1957 hingga awal 1970an. Pada awal bab ini dijelaskan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi, serta hubungan Indonesia-Jepang pada masa pemerintahan Soekarno. Kemudian masuk pada inti pembahasan dari bab ini yakni mengenai hubungan Indonesia-Jepang pada kurun waktu 1967 hingga awal 1970an.

Dalam bab 3, sebagai prolog akan digambarkan sekilas mengenai latar belakang Soedjono Hoemardani dilihat dari perjalanan karirnya dan pandangannya tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian masuk pada inti pembahasan mengenai peran Soedjono Hoemardani dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang yang terjalin pada saat itu. Dalam bab ini akan digambarkan bagaimana kiprahnya dalam menjalin hubungan Indonesia-Jepang pada masa awal Orde Baru dalam rangka mencari modal pembangunan dengan berbagai lobinya dengan Pemerintah Jepang; tentang bagaimana keterkaitan Soedjono Hoemardani dalam Peristiwa Malari; serta perannya dalam hubungan Indonesia-Jepang pasca Malari hingga pada akhirnya Jepang merubah cara diplomasinya secara *heart to heart*.

Terakhir sebagai penutup adalah bab 4 yang berisi kesimpulan dari pemaparan karya tulis ini.

BAB II

HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-JEPANG

1957 HINGGA AWAL 1970AN

Hubungan ekonomi yang terjalin antarnegara bukan hanya sekedar mencakup hubungan timbal balik antara dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi. Namun juga pada kenyataannya mencakup hubungan secara politik ataupun sosial yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya hubungan ekonomi tersebut; meski secara hitam di atas putih, kesepakatan yang tertulis merupakan rentetan kerjasama taktis dalam bidang ekonomi. Seni menjalin hubungan antarnegara dikenal dengan istilah diplomasi. Menurut L.S.Roy dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi*, diplomasi memiliki arti yang akrab dengan hubungan antarnegara dan merupakan seni menyampaikan kepentingan-kepentingan negara melalui perundingan atau secara damai.¹

Dengan demikian, hubungan yang terjalin antarnegara dapat dipastikan memiliki muatan kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional masing-masing negara akan terlihat dari kebijakan pemerintahannya, terutama kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi dalam negerinya (internal), baik kondisi politik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, iklim perpolitikan internasional (eksternal) yang tengah terjadi di masyarakat internasional juga ikut mempengaruhi arah kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa arah dari hubungan diplomatik yang terjalin antara suatu negara dengan negara lain secara tidak langsung tergantung pada dua faktor, internal dan eksternal.

II.1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Jepang dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan luar negeri suatu negara atau yang disebut dengan kebijakan hubungan internasional adalah serangkaian tindakan suatu pemerintah terhadap

¹ L.S. Roy, 1991, *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press

negara lain dalam politik internasional di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun militer, dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan dan keamanan nasional. Tulisan ini membahas persoalan kebijakan hubungan internasional dalam bidang ekonomi.

Ketika Jepang mulai menjalin hubungan dengan Indonesia, kala itu tengah terjadi Perang Dingin –perebutan pengaruh antara dua blok besar, yakni Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur). Tak terkecuali, Indonesia dan Jepang pun menjadi objek perebutan pengaruh bagi kedua negara adikuasa ini. Secara otomatis, perang kepentingan ini mempengaruhi arah kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia maupun Jepang.

II.1.1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Ekonomi Masa Orde Lama dan Awal Orde Baru (1957-1967)

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia ditujukan untuk mencari pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain, seperti halnya negara-negara yang baru merdeka lainnya. Selain itu sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia juga disibukkan dengan pencitraan profil negaranya di mata internasional, misalnya dengan ikut menyelenggarakan KAA (Konferensi Asia Afrika) pada tahun 1955. Meski di lain pihak, kondisi perekonomian Indonesia masih relatif lemah. Dimana Indonesia memerlukan pasokan modal pembangunan ekonomi yang besar, baik dari dalam maupun luar dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Hal ini tidaklah mudah bagi Indonesia untuk menentukan sikap (bekerjasama dengan negara lain) di tengah percaturan politik dunia yang terbagi ke dalam dua kekuatan besar. Dalam menyikapi kondisi seperti ini Indonesia memilih untuk bersikap netral, seperti yang pernah dikatakan oleh Moh. Hatta bahwa politik luar negeri Indonesia bagaikan “mendayung diantara dua karang”.² Hal ini berarti bahwa Indonesia berada pada posisi yang netral diantara dua kekuatan besar dunia.

Namun pada masa Orde lama, arah kebijakan luar negeri Indonesia lebih condong pada Blok Timur yang berpaham sosialis, terutama Cina. Meski hal ini

² Mendayung di Antara Dua Karang, *Tempo*, 20 Agustus 1988.

tidak serta merta mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan sekutu Blok Timur. Hal ini lebih dikarenakan sikap anti kolonialisme & imperialisme Soekarno melihat kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara Asia dan Afrika. Sementara negara-negara yang melakukan kolonialisme ini pada umumnya adalah negara-negara Barat yang berpaham kapitalis. Sedangkan negara-negara yang mengalami kolonialisme ini memiliki pemikiran yang serupa dengan ide-ide yang diusung kaum sosialis untuk bisa bebas dari negara penjajah yang cenderung kapitalis. Sikap anti kolonialisme & imperialisme ini, salah satunya dibuktikan oleh Soekarno dengan dicetuskannya Dwi Kora (Dua Komando Rakyat) pada 3 Mei 1963. Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan “negara boneka Inggris” sebagai bentuk baru kolonialisme & imperialisme.

Selain arah kebijakan luar negeri yang anti kolonialisme & imperialisme, pemerintahan Soekarno juga dikenal mengedepankan kebijakan yang bersifat prestisius, atau lebih dikenal dengan politik mercusuar.³ Dana untuk membiayai proyek-proyek mercusuar tidaklah kecil. Untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek mercusuar ini, dana pembangunan ekonomi yang ada seringkali dikorbankan. Sementara Indonesia sendiri memerlukan pemasukan modal untuk pembangunan ekonomi.

Pasca Perang Kemerdekaan, dalam memandang arah kebijakan ekonomi, para *founding father* sendiri masih dilematis karena pada saat itu terjadi polemik mengenai pembangunan ekonomi. Polemik ini adalah perbedaan pandangan yang menyatakan bahwa “revolusi belum selesai” (Soekarno) dan pandangan yang beranggapan bahwa “revolusi telah selesai” (Moh. Hatta). Soekarno berpandangan bahwa revolusi Indonesia belum selesai selama imperialisme dan feodalisme belum terhapuskan. Jadi selama dua fenomena ini belum diselesaikan, maka Indonesia belum siap untuk membangun. Sedangkan Moh. Hatta berpendapat

³ Politik mercusuar adalah suatu pola kebijakan yang sifatnya merepresentasikan identitas bangsa Indonesia. Kebijakan ini direpresentasikan lewat diselenggarakannya proyek-proyek mercusuar seperti diselenggarakannya Asian Games, Ganefo (Games Nefo (*New Emerging Forces*), Conefo, dibangunnya proyek Sarinah, Monumen Irian Barat, Gedung Pola, dan lain-lain yang menguras banyak dana (Lihat Lampiran 4). Tabel tersebut menggambarkan proyek-proyek yang dijalankan pada masa Pemerintahan Soekarno. Proyek-proyek ini sering kali disebut sebagai proyek mercusuar Soekarno yang dinilai prestisius karena besarnya biaya pembangunan proyek-proyek tersebut.

bahwa semua kegiatan revolusi hendaknya dihentikan agar pemerintah dapat segera memulai pembangunan ekonomi. Pandangan dari Hatta ini diimplementasikan pada masa Demokrasi Parlementer di tahun 1950-1957.

Pada masa ini kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah terlihat mengedepankan nilai-nilai nasionalisme yang kemudian diimplementasikan dengan digalakkannya kebijakan “ekonomi nasional”.⁴ M. Natsir yang menjadi perdana menteri pertama masa Demokrasi Parlementer beranggapan bahwa dalam membangun ekonomi nasional, Indonesia membutuhkan modal asing. Namun menjamurnya modal asing tersebut harus diawasi melalui peraturan pemerintah. Lebih jauh, Natsir juga berpendapat bahwa nasionalisasi perusahaan asing tidak perlu dilakukan, selama keberadaan modal asing belum bisa digantikan oleh perusahaan-perusahaan pribumi. Soemitro Djojohadikusumo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri juga berpendapat bahwa negara harus memainkan peran yang menentukan, terutama pada tahap awal pembangunan dan pengusaha-pengusaha asing mutlak harus diawasi karena belum terdapat kelompok-kelompok pengusaha yang kreatif dari kalangan bangsa Indonesia sendiri.⁵ Kemudian ide-ide yang mengedepankan konsep “ekonomi nasional” ini salah satunya diimplementasikan lewat Gerakan Benteng (program pemerintah untuk para importer pribumi).

Setelah sistem pemerintahan bergulir kembali menjadi sistem presidensial, di masa Demokrasi Terpimpin, konsep pembangunan ekonomi Indonesia diimplementasikan kedalam konsep Ekonomi Terpimpin yang merupakan manifestasi dari Manipol-Usdek (Manifesto Politik-UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Ekonomi terpimpin, dan Keperibadian Bangsa Indonesia). Ekonomi Terpimpin merupakan kerangka kebijakan baru mengenai pembangunan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Dalam fase pertama Demokrasi Terpimpin (1960-1963), peran elit Angkatan Darat (AD) memainkan peran

⁴ Paradigma ekonomi nasional ini muncul pasca Indonesia menjadi negara yang berdaulat, untuk menggantikan paradigma ekonomi kolonial. Dimana sektor perekonomian banyak dikuasai oleh aset dan modal Belanda yang bercokol sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Kebijakan ekonomi nasional ini menggalakkan usaha untuk memperluas penguasaan modal pengusaha nasional/pribumi dalam berbagai sektor ekonomi dengan memberikan bantuan-bantuan kredit dan bimbingan/penyuluhan usaha kepada para pengusaha pribumi/nasional. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 240.

⁵ Soemitro Djojohadikusumo, 1955, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Pembangunan.

penting dalam pemerintahan. Dimana para elit AD sendiri dipengaruhi oleh paham Keynesian. Dalam fase kedua Demokrasi Terpimpin (1963-1965), PKI memainkan peran sentral dalam kehidupan politik. Dengan menguatnya peran PKI, maka dimulailah arah kebijakan Soekarno yang condong ke arah sosialisme yang buktikan dengan dinasionalisasinya perusahaan-perusahaan asing. Tidak hanya itu, pada masa Demokrasi Terpimpin ini jugalah Indonesia muncul sebagai negara yang mengkampanyekan anti imperialisme & kolonialisme seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan hal ini menyebabkan pemerintah saat itu tidak fokus pada kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama yang condong pada Blok Timur, arah kebijakan luar negeri dari pemerintah Orde Baru justru sebaliknya lebih condong pada Blok Barat dengan didasarkan atas motif kerjasama ekonomi internasional. Pemerintah Orde Baru disibukkan dengan pencarian modal yang besar untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang kala itu terpuruk. Oleh karenanya, hubungan Pemerintah Orde Baru dengan negara-negara Barat dimanfaatkan untuk mencari pasokan modal tersebut, terutama dari Jepang yang merupakan sekutu AS. Selain didasarkan atas kebutuhan modal tersebut, kebijakan dan corak ekonomi yang didesain oleh para arsitek ekonomi (ekonom) Orde Baru yang pada umumnya berpendidikan Barat, lebih condong pada karakteristik ekonomi yang dianut oleh negara-negara Barat.

Pemerintahan Orde Baru menitikberatkan agenda negara ke arah *pembangunan*.⁶ Untuk menangani masalah ekonomi, Soeharto merekrut para ekonom sipil dari Universitas Indonesia yang kemudian populer disebut sebagai ‘teknokrat’. Kebanyakan dari teknokrat ini bersekolah di University of California, Berkeley sehingga kelompok ini sering dijuluki “Mafia Berkeley”. Ideologi utama teknokrat ini adalah prinsip-prinsip ekonomi neoklasik yang secara umum bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi masa Orde Lama yang cenderung bersifat ekonomi kerakyatan (sosialis). Untuk menopang ide *pembangunan* ini,

⁶ Definisi *pembangunan* ini begitu luas dan beranekaragam, dalam arti yang paling sederhana dan ideal dapat diartikan sebagai usaha membangun kesejahteraan ekonomi untuk semua lapisan masyarakat. Lihat Syamsul Hadi, 2005, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*, Jakarta: Japan Foundation.

Orde Baru menggunakan teori W.W.Rostow⁷ tentang “*The Take off into Self – Sustained Growth*” (Teori Pertumbuhan Ekonomi).⁸ Ide Rostow ini kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Pemerintah Orde Baru juga menganut *keynessian* yang diperkuat dengan posisi UUD’45 pasal 33, dimana peran dari pemerintah terhadap pengaturan ekonomi perlu diperhitungkan.⁹ Dengan demikian, tak heran jika pada masa Orde Baru haluan politik luar negerinya lebih condong ke Barat.

Pemerintahan Orde Baru memutuskan untuk menerapkan tiga langkah pembangunan ekonomi pada masa awal pemerintahannya. Langkah pertama, menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri sebagai langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri. Kedua, mengendalikan inflasi yang tak terkontrol melalui program impor komoditi besar-besaran yang dibiayai oleh pinjaman-pinjaman hasil renegoisasi. Ketiga, mengundang investasi sebesar-besarnya, terutama investasi asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Pemerintah yakin bahwa pertumbuhan karena suntikan modal dan teknologi, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Rencana ini diumumkan pada tanggal 5 Juli 1966 dalam Ketetapan MPRS No.XXIII tentang “Pembaruan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan”. Rencana ini dirinci ke dalam 3 tahap pembangunan. Pertama, tahap penyelamatan, yakni mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi lebih buruk lagi. Kedua, tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. Ketiga, tahap pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.¹¹

⁷ Walt Withman Rostow adalah seorang teknokrat ekonomi dan politik Amerika Serikat. Ia pernah menjabat Asisten Khusus NSA pada masa pemerintahan Lyndon B. Jhonson

⁸ Tahapan perkembangan suatu masyarakat menurut W.W.Rostow: masyarakat tradisional sebagai masyarakat pra- tinggal landas, tinggal landas, tahap pematangan, dan tahap konsumsi masal. Lihat Hong Lan Oei, “Indonesia's Economic Stabilization and Rehabilitation Program: An Evaluation”, Southeast Asia Program Publications: Cornell University, Vol. 5, April 1968.

⁹ Inti dari gagasan Keynes adalah menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Gagasan ini muncul sebagai tanggapan dari ide pasar bebas Adam Smith yang dianggap gagal karena telah membuahakan depresi hebat tahun 1930. Lihat Jr. Ekelund, Robert B, and Robert F. Herbert, 2007, *A History of Economic Theory and Method, 5 th ed*, Illinois: Waveland Press Inc.

¹⁰ Zulkarnain Djamin, 1984, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Sejak Repelita Pertama*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Hal. 120.

¹¹ Emil Salim, 2000, “Seribu Hari Pertama Orde Baru 1965-1968”, dalam St. Sularto (ed.), *Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Kebijakan ekonomi dan luar negeri Orde Baru berlawanan sepenuhnya dengan kebijakan pada masa Orde Lama. Ketika pemerintah Orde Lama melakukan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang artinya adalah tidak menghendaki keberadaan modal asing. Pemerintah Orde Baru justru membuka diri pada keberadaan modal asing. Pada tanggal 1 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA). Dan pada tanggal 3 Juli 1968 pemerintah memberlakukan UU No.6 tahun 1968 sebagai Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua Undang-Undang itu dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Kebijakan itu di rumuskan dengan bantuan dan nasihat dari ahli-ahli ekonomi dan tenaga-tenaga profesional yang memiliki hubungan dekat dengan kalangan militer.

Kalangan Militer pada masa Orde Baru memiliki kekuatan yang besar dalam pemerintahan yang dilegitimasi lewat Dwi Fungsi ABRI. Konsep ini menyatakan bahwa kalangan militer memiliki kekuatan militer sekaligus kekuatan sosial politik. Kekuatan militer ini semakin besar setelah terjadinya kudeta di tahun 1965. Meski sebenarnya di tahun 1950an, militer juga memang sudah terpolitisasi.¹² Setelah kudeta di tahun 1965 ini, militer menjadi pengambil keputusan terpenting, baik pengambilan keputusan politik dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan kalangan militer memasuki urusan politik luar negeri adalah untuk mengikis anggota-anggota PKI dan simpatisannya dalam tubuh Departemen Luar Negeri. Bahkan militer duduk bersama dengan partai-partai politik dalam Komisi I DPR (Komisi Luar Negeri dan Pertahanan).¹³ Tidak hanya masalah politik luar negeri dan dalam negeri, dengan adanya Dwi Fungsi ini militer juga memiliki kekuasaan dalam ranah ekonomi. Dimana kemudian bermunculan perwira-perwira militer yang berbisnis, sehingga menciptakan patronasi¹⁴ yang

¹² Misalnya saja di tahun 1958, A.H.Nasution mengemukakan suatu ide yang dikenal sebagai "Jalan Tengah" (*Middle Way*). Ia berpendapat bahwa militer tidak akan berusaha untuk mengambil alih pemerintahan, namun tidak juga nonaktif secara politik. Realisasinya adalah militer dapat mengajukan hak untuk memiliki perwakilan di pemerintahan, DPR dan birokrasi. Konsep ini diartikan sebagai peran militer dalam bidang non-keamanan. Ide dari Nasution ini kemudian menjadi awal dari konsep Dwi Fungsi ABRI. Lihat Harold Crouch, "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia", Cambridge University Press. Vol. 31 No. 4, Juli 1979.

¹³ Leo Suryadinata, 1998, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta: LP3ES, hal. 50-53.

¹⁴ Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk membuat perjanjian dalam suatu kontrak kerja.

mengakar. Patronasi militer dalam berbisnis ini, bermula dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di tahun 1957, dimana militer-lah yang banyak mengambil alih aset-aset perusahaan yang dinasionalisasi tersebut. Dan patronasi tersebut semakin meluas setelah dicanangkannya Dwi Fungsi.

II.1.2. Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam Bidang Ekonomi Pasca PD II

Jepang setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II harus rela negaranya diduduki oleh Amerika Serikat (AS) sebagai konsekuensi negara yang kalah perang. Selama masa pendudukan ini dari 1945 hingga 1951, Jepang tidak memiliki kekuatan yang independen untuk mengatur kebijakan luar negerinya sendiri. Hal ini dikarenakan selama masa pendudukan, kebijakan luar negeri Jepang dikontrol oleh sebuah badan yang dinamakan SCAP (*Supreme Commander for the Allied Powers*)¹⁵, tepatnya oleh *The Diplomatic Section of SCAP* (sebuah departemen di bawah SCAP yang bertugas untuk menangani masalah kebijakan luar negeri). Meski bukan berarti seluruh arah kebijakan luar negeri Jepang didasarkan pada putusan SCAP.

Selepas dari Pendudukan AS pada tahun 1951 dengan ditandatanganinya Perjanjian San Francisco, Yoshida Shigeru selaku perdana menteri Jepang kala itu, mengeluarkan tiga prinsip fundamental (Doktrin Yoshida) yang kemudian dijadikan landasan kebijakan luar negeri bagi Jepang selama Perang Dingin. Doktrin Yoshida tersebut menekankan bahwa pola dasar hubungan internasional Jepang Pasca Perang Dunia II terkonsentrasi pada pemulihan kembali pembangunan dalam negeri, menolak keterlibatan dalam perjanjian maupun kerjasama kolektif dalam bidang keamanan, serta menggantungkan politik dan keamanannya pada AS.¹⁶

Merujuk pada isi Doktrin Yoshida, sudah dapat dipastikan bahwa selepas dari pendudukan AS, kebijakan luar negeri Jepang condong pada AS. Hal ini dikarenakan Jepang bernaung dibawah kekuatan aliansi militer AS, sehingga

¹⁵ SCAP merupakan kekuasaan tertinggi pemerintahan pendudukan sekutu di Jepang. Badan ini dibentuk oleh sekutu mengatur kehidupan bernegara Jepang baik yang sifatnya domestik (urusan dalam negeri) maupun non-domestik.

¹⁶ Dhini Afiatanti, 2010, *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap ASEAN pada Masa Perang Dingin dan Setelah Berakhirnya Perang Dingin (1973-1993)*, Depok : FIB UI, hal. 12 dikutip dari Glenn D. Hook, et all., Ed, 2001, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, New York : Sheffield Center for Japanese Studies, hal. 32.

kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus menyesuaikan dengan arah kebijakan AS. Setelah masa Pendudukan AS, Jepang berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara Asia dalam rangka pembangunan ekonomi&industrinya. Dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang mengedepankan tingginya pemasukan negara --seperti kebijakan *Income Doubling Plan* yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Ikeda Hayato, atau yang lebih dikenal dengan GNP-isme Ikeda¹⁷-- memicu Jepang untuk meningkatkan kerjasama internasionalnya di bidang ekonomi.

Sekitar awal tahun 1955, Jepang memandang Asia tenggara (khususnya Indonesia) sebagai partner ekonomi penting bagi penjualan produk Jepang, investasi, dan perolehan sumber energi untuk ekonominya.¹⁸ Tahun 1950an, barang-barang manufaktur Jepang tidak dapat bersaing di pasar Eropa, sehingga Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sebagai Negara Dunia Ketiga dijadikan pasar untuk penjualan produk Jepang.

Strategi Jepang ini dikenal dengan nama “*Nanshin Gaiko*” (diplomasi selatan).¹⁹ Kebijakan luar negeri yang menggambarkan kepentingan nasional Jepang pada masa itu dapat didasarkan pada tiga hal, yaitu mempertahankan ketergantungan pada AS bagi kepentingan keamanan; memperlihatkan sikap terbuka bagi hubungan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; mengadakan konsentrasi bagi pemenuhan energi Jepang untuk mempertahankan perkembangan ekonomi.²⁰ Tingginya upah buruh di Jepang menyebabkan Jepang mencari wilayah lain yang memiliki keberlimpahan tenaga kerja yang murah, salah satunya Indonesia, agar perusahaan Jepang dapat tetap beroperasi dalam sektor ini. Sebenarnya ini merupakan strategi yang memang telah dirancang oleh Jepang, dikenal dengan istilah “*the flying geese (ganko keitai)*”.²¹

¹⁷ Ini merupakan rencana Jepang untuk memperbesar pemasukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita/GNP (*Gross National Product*).

¹⁸ Lie Tektjeng&Yoshida Teigo, 1970, *Some Remarks on The Problems and Difficulties Besetting Present-Day Indonesia-Japanese Relations*, Djakarta: LIPI.

¹⁹ Yang dimaksud selatan adalah kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Lihat R.Sandra Leavitt, “The Lack of Security Cooperation between Southeast Asia and Japan: Yen Yes, Pax Nippon No”, University of California Press, Vol. 45 No.2, Maret-April 2005.

²⁰ J.A.A.Stockwin. 1984. *Pluralisme politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang*. Yogya: UGM Press.

²¹ *The flying geese (ganko keitai)* ini merupakan konsep integrasi ekonomi ala Jepang. konsep ini menjelaskan hubungan antara pertumbuhan industri dan pola perdagangan Jepang dengan segala dampaknya terhadap kegiatan ekonomi eksternal, terutama dengan negara-negara tetangganya yang kurang maju. Pola *ganko keitai* ini telah dijalankan Jepang sejak masa imperialismenya

Di dalam sistem politik Jepang, politik luar negeri merupakan perumusan organik dari hubungan sejajar antara pemegang kekuasaan politik dengan pengendali kekuatan ekonomi. Tiga elemen yang mempengaruhi warna kebijakan politik luar negeri Jepang adalah parlemen dimana di dalamnya adalah kalangan politisi, birokrat pemerintahan, dan pemegang kekuatan finansial yakni para pengusaha dan pemilik modal. Seperti yang diutarakan Ali Moertopo dalam bukunya yang berjudul *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun* tentang pengambilan keputusan ekonomi di Jepang. Pengambilan keputusan ekonomi pemerintahan Jepang memiliki keterkaitan antara kepentingan dari pemilik pemodal, politisi (terutama LDP²²), dan birokrat.²³

II.2. Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang pada Masa Orde Lama

Dari awal Indonesia mengenyam kemerdekaan, bangsa yang baru lahir ini terus berusaha untuk membangun tatanan ekonomi yang stabil dan mandiri. Tidak sedikit dari generasi awal pemikir ekonomi bangsa ini yang memberikan gagasan-gagasan ekonominya, seperti Syafrudin Prawiranegara, Moh. Hatta, Jusuf Wibisono, Soemitro Djojohadikusumo. Namun usaha pembangunan ekonomi ini nampaknya dirintangi berbagai hambatan politik dengan kedatangan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, munculnya gerakan-gerakan separatisme (DI/TII, PKI Madiun 1948, Andi Aziz, RMS, PRRI/PERMESTA), serta jatuh banggunya kabinet pada masa Demokrasi Parlementer yang berimplikasi pada tidak stabilnya ekonomi dan tidak berjalannya program pembangunan secara utuh dan berkesinambungan. Ditambah lagi dengan menjauhnya modal asing (terutama Belanda) sejak terjadinya nasionalisasi perusahaan Belanda. Padahal modal asing (Belanda) ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sejak masa kolonial bahkan hingga Indonesia pertama kali mengenyam kemerdekaan.²⁴ Di

terhadap Korea dan Taiwan. Lihat Heru Utomo Kuntjoro-Jakti, 1995, *Ekonomi-Politik Internasional di Asia Pasifik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

²² LDP merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di Jepang dari tahun 1955 hingga 1993.

²³ Ali Moertopo, 1972, *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*, Jakarta: CSIS.

²⁴ Oleh karena itu banyak dari pemikir ekonomi Indonesia yang berfikir untuk menciptakan ekonomi nasional yang mandiri, sekaligus untuk mempersempit ruang gerak modal asing yang terlalu menonjol di tatanan ekonomi sebuah negara yang merdeka. Salah satunya adalah Soemitro Djojohadikusumo yang berpendapat untuk kembali membangun perekonomian Indonesia yang baru. Caranya adalah dengan mengubah struktur ekonomi. Dari ekonomi kolonial ke tatanan ekonomi nasional. Lihat Sartono Kartodirjo, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia (VI)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

sisi lain, cadangan valuta asing Indonesia juga turun dari US\$511 pada tahun 1951 menjadi US\$255 pada 1956.²⁵

Kegoncangan ekonomi timbul setelah terjadinya pengambilalihan kekayaan Belanda dan pengusiran warga negara Belanda, dimana hal ini memungkinkan terjadinya patronasi diantara elit yang mapan terutama angkatan bersenjata.²⁶ Masalah-masalah ekonomi inilah yang kemudian menjadi agenda untuk diselesaikan di era setelah Demokrasi Parlementer. Keluarnya Dekrit Presiden menandai terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari parlementer kembali ke presidensial, yang kemudian dikenal dengan istilah Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini terjadi kekurangan modal untuk pembangunan ekonomi, tidak berjalannya program pembangunan ekonomi secara utuh dan berkesinambungan, serta inflasi yang tinggi dan program ekonomi terpimpin yang tak kunjung membuahkan hasil. Hal ini membuat pemerintah membuka diri untuk menjalin hubungan dengan Jepang. Jepang menjadi salah satu negara penyuplai modal pembangunan lewat berbagai bantuan dananya. Meski demikian Indonesia dibawah Soekarno tetap menjaga jarak dari Jepang karena dianggap sebagai neo-imperialisme & kolonialisme.

Pasokan modal dari Jepang pada masa Pemerintahan Soekarno salah satunya didapat dari dana pampasan perang. Pampasan perang merupakan resolusi dari Perjanjian San Francisco 1951 yang menghendaki Jepang untuk memberikan ganti rugi pada negara-negara yang telah diduduki selama Perang Dunia II. Pampasan perang yang ditawarkan oleh Jepang ini menjadi angin segar bagi Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Meskipun muncul juga kekhawatiran atas maksud Jepang ini sebagai trauma historis bangsa yang pernah diduduki. Selain itu adanya anggapan bahwa negara-negara Barat (seperti halnya Jepang) membawa pengaruh imperialisme & kolonialisme, membuat hubungan Indonesia-Jepang pada masa pemerintahan Soekarno tidak terlalu dekat.

Perjanjian San Francisco tidak menyebutkan secara detail jumlah dan jenis ganti rugi pampasan perang untuk masing-masing negara. Antara tahun 1956-1977 Jepang menyerahkan sekitar US\$1,5 milyar untuk sepuluh negara (jumlah

²⁵ Masashi Nishihara, 1994, *Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan pampasan perang: hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1996*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

²⁶ Michael Leifer, 1989, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, Hal. 78.

ini tidak pernah melampaui 0,20% dari GNP Jepang).²⁷ Dibalik pampasan perang tersebut terkandung muatan politik yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik kembali dengan negara-negara yang pernah diduduki, termasuk di dalamnya Indonesia. Hal yang tak dapat dibantahkan dari konsekuensi disepakatinya pampasan perang ini salah satunya adalah menguatnya hegemoni ekonomi Jepang di Indonesia. Hegemoni ekonomi Jepang yang bermula di tahun 1957 ini, pada akhirnya semakin menguat pada masa Pemerintahan Soeharto.

Hubungan Indonesia-Jepang ini, secara formalitas politik dimulai sejak diratifikasinya perjanjian perdamaian Indonesia-Jepang pada masa pemerintahan Kishi, yang kemudian disusul dengan dibukanya Kedutaan Besar Jepang di Jakarta pada tahun 1958, dan Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo. Menurut Suchjar Tedjahadikusuma, selaku ketua *Dairy Export Incentive Program* (DEIP), hubungan Indonesia-Jepang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu perjanjian damai yang dibuat diluar perjanjian San Francisco; pembayaran pampasan perang; kesediaan Jepang untuk mengatur kegiatan ekonominya ke Indonesia menurut garis-garis yang dibuat Indonesia dalam rencana pembangunan ekonomi nasional.²⁸

Hubungan ekonomi Indonesia-Jepang pada masa Pemerintahan Soekarno berkisar pada masalah harta pampasan perang. Misi pampasan perang untuk Indonesia ini telah dilakukan sejak 15 Desember 1951 dengan diketuai oleh Djuanda selaku menteri perhubungan, yang kemudian menjadi perdana menteri pada tahun 1957, dengan tuntutan awal sebesar US\$17,5 milyar. Lobi pampasan perang yang berlangsung dari tahun 1951 hingga 1956 ini berjalan alot. Kemudian Pemerintah pada tahun 1956 menurunkan tuntutannya dengan meminta Jepang memberikan dana senilai US\$1 milyar. Tuntutan ini ditanggapi Jepang pada bulan September 1957 melalui "*kobayashi proposal*"²⁹ dengan tawaran dana sekitar US\$223 juta untuk pampasan perang dan sisanya sebagai bentuk kerjasama

²⁷ Mossadeq Muhammad Bahri, 1998, *Modal Asing dan Ketergantungan Studi Awal terhadap PMA Jepang di Indonesia*, Depok: Lembaga Penelitian UI.

²⁸ *Harian Umum*, 1 November 1952

²⁹ Tahun 1956 PM Jepang, Kishi, menunjuk Kobayashi Ataru, seorang pengusaha terkemuka Jepang, sebagai penasihat khusus ekonomi untuk negara-negara Asia, sekaligus sebagai pelobi pampasan perang dengan Indonesia. Usulan dari Kobayashi ini diistilahkan *Kobayashi Proposal*.

ekonomi sejumlah US\$117 juta dan bantuan ekonomi dalam kredit sejumlah US\$400 juta.³⁰

Pada akhirnya, pampasan perang Jepang untuk Indonesia disepakati senilai \$223,08 juta. Sejumlah uang ini dibayarkan selama periode dua belas tahun dalam bentuk barang modal dan jasa. Setiap tahun, normatifnya pemerintah Jepang dan Indonesia membuat rencana tentang jenis-jenis proyek yang harus dilaksanakan dengan dana tahunan sebesar \$20 juta selama sebelas tahun dan \$3,08 juta pada tahun ke-12. Namun pada pelaksanaan aktualnya, pembayaran dan kontraknya seringkali terlambat, besaran dananya pun tidak seperti yang digambarkan dikesepakatan awal.

Dana pampasan perang ini banyak digunakan untuk proyek-proyek prestise Soekarno seperti Hotel Indonesia, gedung Wisma Nusantara, Toserba Sarinah, dan Wisma Indonesia. Ada 26 proyek utama yang dibiayai dengan dana pampasan perang. Proyek-proyek itu antara lain proyek irigasi pengendali banjir di Jawa Timur; pabrik kertas di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan; pabrik tekstil di Bandung dan Jakarta; PLTA di Jawa Timur; dan proyek yang terbilang paling mahal mencapai \$19.237.000 untuk membangun dam di Karangates, Hulu Sungai Brantas, Jawa Timur; serta proyek program pendidikan dan pelatihan bagi para pemuda Indonesia.³¹

Pampasan perang ini dipergunakan Jepang untuk memasarkan produknya, dimana pihak Jepang diuntungkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya ekspor produk Jepang ke Indonesia dari 13,6% pada tahun 1958 menjadi 20,8% pada tahun 1962, dan menjadi 26,8% pada tahun 1966.³² Selain dari pampasan perang, Jepang juga memberikan kredit dan hutang perdagangan. Ini merupakan bukti yang menunjukkan pentingnya Indonesia bagi Jepang. Tercatat bahwa Jepang memberikan bantuan modal bagi perusahaan-perusahaan milik negara pada tahun 1957-1965 senilai US\$70,35 juta yang diperlukan untuk proses "*production sharing on investment*"³³ dalam usaha-usaha di bidang perminyakan, kayu, perikanan, pertambangan, minyak goreng.³⁴

³⁰ *Pewarta Kemlu* 3, No. 11 / 12 (1957).

³¹ Masashi Nishihara, *Op cit*, Hal. 118.

³² Masashi Nishihara, *Op cit*, Hal. 8 – 35.

³³ Ini merupakan bentuk kerjasama dimana pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional. Pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi perusahaan

Dalam menjalin hubungan dengan Indonesia, Jepang banyak melakukan lobi-lobi. Keberhasilan Jepang melobi Soekarno banyak dilakukan oleh Miss Nemoto (Ratna Sari Dewi) yang diperkenalkan oleh Presiden Tonichi Traiding Company, Kubo Masao, ketika Soekarno mengunjungi Jepang pada 6 Juni 1956. Bahkan perusahaan yang dipimpin Tonichi berhasil mendapatkan 6 proyek yang menguntungkan. Tidak hanya lobi ekonomi, Jepang juga memotori beberapa lobi-lobi politik, dari mulai lobi perdamaian hingga lobi anti-Soekarno. Mereka mengumpulkan dana bagi para pelobi Indonesia yang datang ke Jepang untuk melakukan aktivitas pelobiannya. Misalnya saja pelobian yang terjadi antara Nishijima dengan Ahmad Subardjo dan Adam Malik yang bertandang ke Tokyo; Kuhara, Nakajima, dan Fukuda yang tetap mempertahankan hubungan dengan Soemitro Djojohadikusumo dan para pemimpin PRRI. Adapun lobi pribadi ditingkat pemerintahan, dapat dilihat dari hubungan Ahmad Subardjo dengan Duta Besar Saito, Shirahata, Kai, dan Malik.³⁵

II.3. Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang pada Masa Awal Orde Baru

Dengan berakhirnya Orde Lama yang nuansa pemerintahannya identik dengan PKI, dimulailah masa pemerintahan Orde Lama dimana nuansa pemerintahannya identik dengan kelompok militer dibawah pimpinan Soeharto. Tampuk kekuasaan beralih dari tangan Soekarno ke Soeharto pada bulan maret 1967. Pada tanggal 20 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaannya pada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/66, yakni Soeharto. Dan pada Sidang Istimewa Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai Presiden berdasarkan TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967. Soeharto mewarisi berbagai keterpurukan ekonomi, dari mulai inflasi, hutang-hutang luar negeri, ledakan jumlah penduduk, serta pemasukan negara dari ekspor yang nilainya relatif menurun. Permasalahan-permasalahan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu Pemerintahan Orde Baru untuk menjalin kedekatan dengan negara-negara Barat sebagai pemilik modal, seperti Jepang. Ini yang kemudian membedakan corak hubungan luar

yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional yang mendapat kredit tersebut untuk mengekspor hasil produksinya ke negara pemberi kredit.

³⁴ Richard Robinson, 1990, *Indonesia: The Rise of Capital*, Canberra: Southeast Asia Publication Series.

³⁵ Masashi Nishihara, *Op cit*, Hal. 133 – 171.

negeri Indonesia-Jepang pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Sehingga pada masa Orde Baru, hubungan Indonesia dengan Jepang dapat dikatakan lebih dekat dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

II.3.1. Masuknya Modal Jepang pada Masa Awal Orde Baru

Dengan konsep *pembangunan* yang dijalankan Pemerintah Orde Baru, diperlukan modal pembangunan yang sangat besar. Oleh karena itu masuknya arus modal asing menjadi pilihan yang dirasa tepat, mengingat modal domestik yang tidak begitu kuat dan usaha domestik yang masih perlu disokong oleh perusahaan asing/Multinational Cooperation (MNC). Pada tahap awal perbaikan ekonomi/fase rehabilitasi ekonomi (1966-1973), dimana tingkat inflasi warisan pemerintah Orde Lama mencapai 650%, pemerintah Orde Baru meluncurkan kebijakan liberal untuk menarik modal asing dan domestik (etnis Cina). Untuk mendukung kebijakan penarikan investasi ini, maka direalisasikan dengan Undang-undang Investasi Asing tahun 1967, yang terdiri dari insentif-insentif pemerintah untuk modal asing.³⁶ Termasuk di dalamnya enam tahun masa '*tax holiday*' (bebas pajak) dan bebas bea masuk untuk mesin dan alat produksi lainnya selama tahun-tahun pertama produksi. Berdasarkan UU ini pasal 21, perusahaan asing mendapat jaminan pemerintah untuk tidak dinasionalisasi di masa depan. Bahkan Pemerintah Orde Baru juga mengembalikan perusahaan yang telah dinasionalisasi dengan memberikan kompensasi.

Dengan adanya jaminan ini, komitmen ekonomi Jepang terhadap Indonesia secara signifikan semakin meningkat, tercatat tahun 1971 saja investasi Jepang sudah mencapai US\$473,7 juta.³⁷ Investasi yang biasa terjadi adalah dalam bentuk *joint venture*. Jepang merupakan investor terbesar dalam ekonomi Indonesia selama periode 1967-1980, dengan jumlah sekitar 41% (Lihat Lampiran 5). Bagaimana pun kebijakan investasi asing yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yang termuat dalam UU PMA membawa angin segar untuk negara-negara lain berinvestasi di Indonesia. Dan mengapa Jepang menjadi investor

³⁶ Badan Penerbit Yayasan Dana Bantuan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, 1983, *Presiden Soeharto: Bapak Pembangunan Indonesia: Evaluasi Pembangunan Pemerintah Orde Baru*, Jakarta: BPYDBKMI.

³⁷ Bank Indonesia, 1971, *Annuals of Public and Co-Operative Economy*, Jakarta: Bank Indonesia.

paling besar untuk Indonesia? Hal ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi dan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Jepang saat itu.

Sejalan dengan strategi industri yang dijalankan pemerintah Orde Baru, hampir semua investasi Jepang di Indonesia bercirikan Industri Substitusi Impor (ISI).³⁸ Investasi Jepang banyak diarahkan pada industri padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi, pelat baja, dimana di Jepang sendiri untuk jenis industri seperti ini kehilangan keunggulan komparatifnya. Dalam periode 1970an, industri tekstil dan produk logam mencapai sekitar 18% dari total investasi Jepang, industri kimia sekitar 16,5%, dan otomotif sekitar 10,8%.³⁹ Indonesia tercatat sebagai salah satu negara Asia yang paling banyak mengimpor barang-barang modal dan teknologi dari Jepang, hingga tahun 1982.⁴⁰

Selain dari investasi, Indonesia juga mendapat sokongan dana dari bantuan ekonomi Jepang, baik secara langsung ataupun lewat sebuah institusi. Di awal pemerintahan Soeharto, tahun 1967, Jepang menjanjikan US\$34,3 juta bagi pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia.⁴¹ Setelahnya, bantuan ekonomi bilateral Jepang untuk Indonesia terangkum dalam ODA (*Official development Assistance*). ODA sejatinya merupakan salah satu strategi Jepang untuk dapat membangun dan mempertahankan hubungan baik di sektor ekonomi dengan Indonesia. Bantuan finansial dan strategis Jepang untuk Indonesia disalurkan lewat kesepakatan-kesepakatan yang terangkum dalam ODA ini. Lihat Lampiran 6 tentang jumlah bantuan ODA Jepang bagi Indonesia dalam kurun waktu 1966-1978. Dalam tabel tersebut, bantuan yang paling banyak diberikan adalah dalam bentuk pinjaman dengan angka pinjaman tertinggi di

³⁸ ISI sebetulnya digagas oleh dunia Barat untuk perbaikan ekonomi di negara-negara berkembang yang bertujuan untuk mengurangi impor dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri dengan menghasilkan barang substitusi impor. Dalam prakteknya, misalkan di India pada kurun waktu sebelum 1984, ISI membutuhkan berbagai kebijakan proteksionisme dari pemerintah untuk melindungi industri domestik. Di Indonesia pada masa Orde Baru, kebijakan pembangunan ISI ini tetap tidak dapat lepas tangan dari bantuan investasi asing yang menjadi sumber pengadaan modal dan barang-barang modal dari asing, khususnya Jepang.

³⁹ Bank Indonesia, 1978, *Annuals of Public and Co-Operative Economy*, Jakarta: Bank Indonesia.

⁴⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1986, *Technology Transfer of Japanese Engineering Firms in Indonesia*, Jakarta: LIPI.

⁴¹ Ani Soetjipto, 2000, "Progress Report Analysis of Japan's Aid Policy to Indonesia" dalam *Japan's Official Development Assistance to Indonesia*, Jakarta: Center for Japanese Studies bekerja sama dengan JICA, Hal. 84.

tahun 1973 dan 1978. Sedangkan hibah dan kerjasama mencapai angka tertinggi di tahun 1977 dan 1978.

Di luar ODA, Jepang juga mengambil peran besar dalam *Intergovernmental Group for Indonesia* (IGGI) yang dibentuk pada tahun 1966. Lembaga ini merupakan konsorsium negara-negara donor bagi Indonesia. Tujuan dibentuknya IGGI ini adalah untuk meninjau perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, guna menentukan kebutuhan akan bantuan-bantuan luar negeri. dalam merumuskan tujuannya tersebut, IGGI menggelar konferensi secara periodik yang untuk pertama kalinya konferensi tersebut digelar di Amsterdam, Februari 1967. Pihak-pihak yang terlibat dalam IGGI antara lain Australia, Belgia, Perancis, Jerman Barat, Italia, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika sebagai peserta, sedangkan Austria, Kanada, Norwegia, New Zeland dan Swiss sebagai peninjau. Dalam konferensi yang biasa digelar IGGI juga hadir wakil dari IMF, IBRD, ADB, OECD, dan UNDP. Jepang memainkan peranan yang cukup vital dalam pengadaan dana pinjaman untuk Indonesia yang didonasikan lewat institusi ini.

Bantuan kredit dari Jepang, juga modal Jepang yang membengkak di Indonesia, khususnya dalam bidang industri, membuat posisi ekonomi Jepang semakin kuat di Indonesia. Bahkan sedikit banyak karakteristik perekonomian Jepang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Bagi sebagian kalangan, seperti Soedjono Hoemardani, Ali Murtopo, dan Panglaykim, karakteristik perekonomian Jepang yang bersifat saling terkait antara satu dengan yang lainnya (antara induk perusahaan di Jepang dengan anak perusahaan di luar Jepang, antara perusahaan dengan kalangan birokrat dan politisi) menjadi *role model* untuk diterapkan di Indonesia. Ide ini pernah menjadi wacana dalam pemerintahan Orde Baru, meski kemudian tidak berjalan dengan apa yang direncanakan.

Pada awal tahun 1970an, pemerintah Soeharto menggelar kampanye “Akselerasi Modernisasi 25 Tahun” yang diusung oleh CSIS (*Center for Strategic and International Studies*), dimana Soedjono Hoemardani menjadi salah satu pendiri institusi ini. Dalam kampanyenya tersebut, dikatakan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara modern hanya dalam tempo 25 tahun, dengan strategi industrialisasi yang tepat berdasarkan penerapan model Jepang. Berkaca dari pengalaman Jepang, Dr. Panglaykim, yang juga seorang pemikir

CSIS, merumuskan sebuah konsep tentang “*Indonesian Corporated*”. Ide ini menghendaki terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang saling terkait antara negara dan sektor swasta, konglomerasi, dan memaksimalkan intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi. Untuk menindaklanjuti ide ini, serangkaian pertemuan antara birokrat, pengusaha Indonesia dengan mitra mereka dari Jepang (mulai dari pemerintah hingga ke pengusahanya) digelar guna meningkatkan peran serta Jepang dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.⁴²

Kekuatan dari para pengusaha Jepang ini merupakan kombinasi dari dukungan pemerintah, rasa misi nasional, jaringan perusahaan yang kuat, serta konglomerasi yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Perusahaan-perusahaan besar Jepang bergerak dengan mengadakan usaha patungan (*joint venture*), penanaman modal langsung, dan pendirian kantor-kantor cabang. Pengusaha Jepang cenderung melihat usaha patungan sebagai bagian dari sistem konglomerasi yang terintegrasi dengan induknya yaitu melihatnya sebagai bagian dari suatu keluarga. Hal positifnya adalah mayoritas kepentingan diserahkan pada partner asing karena mereka mengemban misi nasional yang tinggi. Konsekuensi yang muncul sekaligus sebagai bahaya laten bagi partner nasional, yakni adanya pengontrolan yang kuat dari partner asing terhadap berjalannya usaha patungan tersebut (misal: dalam bentuk perjanjian kerja dan keuangan). Dalam *joint venture*, Jepang menguasai hampir 68% perusahaan impor bahan baku Jepang di tahun 1972.⁴³

Keterlibatan Jepang dalam industrialisasi Indonesia, pada dasarnya didorong oleh kebutuhan internal Jepang sendiri, yaitu keharusan melakukan rangkaian rekonstruksi industri yang dilakukan pada masa pemerintahan Kakuei Tanaka (1972-1974). Dimana salah satunya programnya adalah upaya penggalangan kerjasama dengan negara-negara berkembang di berbagai bidang terutama energi, serta pelaksanaan rekonstruksi industri berskala kawasan. Program politik Tanaka ini didukung oleh bantuan pembiayaan pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta/pengusaha.⁴⁴

⁴² Heru Utomo Kuntjoro – Jakti, *Op cit*, hal. 135 – 136.

⁴³ Yanuar Ikbar. 1992. *Deregulasi Bidang Perekonomian Indonesia: Suatu Penelaahan terhadap Peningkatan Investasi Jepang*. Bandung: FISIP Unpad.

⁴⁴ Heru Utomo Kuntjoro – Jakti, *Op cit*, hal. 140.

Bantuan-bantuan resmi pemerintah Tanaka banyak yang berhubungan dengan pembangunan sarana infrastruktur yang dirancang agar dapat memberikan manfaatnya terhadap investasi Jepang di Indonesia. Hal ini tentu sangat menguntungkan pihak swasta Jepang yang berinvestasi di Indonesia. Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur tersebut, mereka menggunakan produknya sendiri. Kebijakan Tanaka yang seperti ini menjadi nilai positif bagi pemerintahnya. Dengan demikian Tanaka mendapat dukungan yang lebih besar dari pihak swasta dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dengan dukungan pihak swasta/pengusaha yang besar tersebut, Tanaka dengan mudah bisa menjalankan program rekonstruksi industrinya. Usaha untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan berkembang pun menjadi lebih mudah dengan asupan dana yang lebih besar dari pihak swasta/pengusaha.⁴⁵

Dalam rangka menjalin hubungan ekonomi dengan Indonesia, pemerintahan Tanaka fokus pada upaya pengadaan minyak dan LNG sebagai bahan bakar industri dalam rangka rekonstruksi industrinya. Upaya penggalangan kerjasama dengan Indonesia ini merupakan langkah politik Tanaka untuk bisa dekat dengan Indonesia. Mengingat lobi Indonesia di Tokyo dikuasai oleh fraksi Kishi, Sato dan Fukuda. Meskipun mereka masih dalam satu partai dengan Tanaka, yakni LDP, namun Tanaka bermaksud untuk memotong pengaruh mereka agar Indonesia juga bisa dekat dengan fraksi Tanaka.⁴⁶

II.3.2. Pengaruh *Oil Boom* terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Awal dasawarsa 1970an, Indonesia mendapatkan banyak pemasukan dari sektor ekspor minyak. Pertamina (Perusahaan Tambang Minyak Nasional)⁴⁷

⁴⁵ Meskipun Tanaka dapat membangun modal Jepang dengan jumlah yang lebih besar di kawasan negara-negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara, namun pada masa pemerintahannya pulalah muncul reaksi ketidakpuasan atas dominasi modal Jepang tersebut. Dimana reaksi ketidakpuasan ini berujung pada aksi-aksi unjuk rasa di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) di tahun 1974. Mengenai permasalahan ini, penulis membahasnya lebih lanjut dalam Bab III (Soedjono Hoemardani dalam Peristiwa Malari).

⁴⁶ Terutomo Ozawa, "Japan's Multinational Enterprise: The Political Economy of Outward Dependency", Cambridge University Press, Vol. 30 No. 4, Juli 1978.

⁴⁷ Pertamina pertama kali berdiri bernama Permina, didirikan Ibnu Sutowo dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 1957. Keterlibatan secara pribadi Ibnu Sutowo dan Angkatan Darat menyebabkan polemik tersendiri bagi Ibnu Sutowo dan sekaligus menjadikan Pertamina bagian yang tak terpisahkan dari 'bisnis tentara'. Lihat Mara Karma, 2001, *Ibnu Sutowo*:

menjadi sumber dana pembangunan yang paling kuat, sebagai akibat dari *oil boom*. Peristiwa yang disebut-sebut sebagai *oil boom* adalah masa dimana harga minyak dunia melonjak naik. Naiknya harga minyak ini disebabkan oleh peperangan yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan negara-negara Arab sebagai kawasan penghasil minyak. Peperangan ini menimbulkan kekacauan politik yang kemudian berujung pada tindakan embargo minyak dari organisasi pengekspor minyak bumi, yakni OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*). Dimana organisasi ini bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak.

Pada bulan Oktober 1973, beberapa negara Arab yang tergabung dalam OPEC, seperti Mesir dan Suriah, menyatakan bahwa mereka akan melakukan embargo minyak sebagai respon terhadap tindakan AS yang menyokong militer Israel selama perang Yom Kippur 1973.⁴⁸ OPEC menyatakan bahwa pihaknya akan membatasi atau menghentikan pengiriman minyak ke Amerika Serikat dan negara lain jika mereka mendukung Israel dalam konflik tersebut. Tindakan AS ini secara tidak langsung berimbas pada negara-negara yang tergabung dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan juga Jepang sebagai sekutu AS. Meski Jepang adalah sekutu AS, namun dalam persoalan Timur Tengah ini Jepang berusaha untuk memisahkan diri dari kebijakan AS agar terhindar dari dampak buruk embargo tersebut.

Dalam konflik Arab-Israel ini, Jepang bersikap mendukung pihak Arab. Meski dari awal sebenarnya Jepang tidak menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pihak Arab tersebut. Namun ketika konflik Arab-Israel mulai memanas dan pihak Arab pun berniat untuk kembali menaikkan 5% harga minyaknya untuk Jepang. Tokyo mulai menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pihak Arab dengan mengirimkan misi ke Timur Tengah yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Jepang kala itu, yakni Takeo Miki. Dalam perjalanan dinas tersebut yang menghabiskan waktu selama 18 hari ini, Miki

Mengemban Misi Revolusi sebagai Dokter, Tentara, Pejuang Minyak Bumi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁴⁸ Anne Booth (ed.), 1994, *Ledakan Harga Minyak dan Dampaknya Kebijakan dan Kinerja Ekonomi Indonesia dalam Era Orde Baru*. Jakarta: UI Press.

mengunjungi Mesir, Iran, Irak, Suriah, Saudi Arabia, Abu Dhabi Qatar dan Kuwait. Jepang menjelaskan akibat-akibat krisis minyak terhadap ekonomi dan kehidupan sehari-hari rakyat Jepang kepada negara-negara Arab penghasil minyak tersebut. Dan Misi Miki ini membuahkan hasil. Negara-negara Arab tidak hanya berhasil dibujuk untuk tidak menaikkan 5% harga minyak, bahkan mereka memutuskan untuk menaikkan kembali impor minyak mereka kepada Jepang sebesar 10%.⁴⁹ Krisis minyak yang berdampak besar bagi kehidupan ekonomi Jepang ini, akhirnya harus membuat Jepang bersebrangan sikap dengan sekutunya, AS.

Sebenarnya krisis akan minyak ini telah berlangsung dari akhir tahun 1960an. Dimana masyarakat dunia dihadapkan pada permintaan minyak yang tinggi, sehingga mengakibatkan harga minyak itu sendiri naik. Dan puncak dari kenaikan harga minyak itu adalah di tahun 1970. Krisis minyak ini diperparah dengan terjadinya *oil boom* ini.⁵⁰ Hal ini memang berdampak negatif, namun bagi negara-negara penghasil minyak, salah satunya Indonesia, mendapat dampak positif dengan pemasukan negara yang meningkat di sektor perdagangan migas.

Meningkatnya pemasukan dalam sektor migas ini disebabkan oleh naiknya harga ekspor akan minyak. Harga ekspor Indonesia untuk minyak mentah naik dari US\$ 2,96 per barel pada April 1973 menjadi US\$ 4,75 di bulan Oktober. Dan naik lagi menjadi US\$12,6 pada bulan Juli 1974. Di tahun 1974 ini, nilai ekspor minyak Indonesia mencapai 74%. Padahal di tahun 1966 ekspor minyak Indonesia hanya bernilai 30%.⁵¹ Hubungan Indonesia dan Jepang pada awal tahun 1970an

⁴⁹ Dalam Misi Miki tersebut Jepang juga memberikan janji kepada negara-negara Arab atas kesediaan Tokyo untuk memberikan bantuan teknik dan keuangan. Jepang menjanjikan bantuan untuk merehabilitasi Terusan Suez yang nasibnya tidak memiliki kejelasan sejak perang tahun 1967, agar dapat dilayari kembali. Dalam misinya tersebut, Miki juga menekankan bahwa Jepang berniat untuk memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara Arab melalui persetujuan tingkat pemerintahan. Lihat Sukses Miki & Misi Tanaka, *Tempo* (12 Januari 1974).

⁵⁰ Untuk mengatasi konflik yang berkelanjutan ini, akhirnya Nixon, Presiden AS masa itu, beserta Israel memulai negosiasi dengan Mesir dan Suriah. Akhir dari negosiasi tersebut, Israel setuju untuk menarik pasukannya dari Sinai pada 18 Januari dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan pasukannya dari Dataran Tinggi Golan pada bulan Mei 1974. Negara-negara Arab pun menarik embargo minyaknya pada Maret 1974. *Oil Boom* di tahun 1973-1974 ini merupakan *oil boom* fase pertama. *Oil Boom* terjadi lagi di akhir dasawarsa 1970an, yakni pada tahun 1979-1980. *Oil boom* ini adalah fase kedua, dimana dunia kembali digoncang dengan kenaikan harga minyak. Lihat Anne Booth, *Ibid*, hal. 129-140.

⁵¹ M.C.Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, Hal. 300 – 301.

ini juga didominasi dengan perdagangan minyak. Indonesia menjadi alternatif bagi Jepang dalam pengadaan minyak bagi industri mereka.

Meskipun Jepang mendapat keuntungan dengan bersekutu dengan pihak Arab, seperti peningkatan kembali impor minyak ke Jepang sebesar 10% dan penarikan kembali keputusan menaikkan harga minyak sebesar 5%, namun keputusan tersebut tidak bisa menutupi semua kebutuhan normal Jepang akan minyak. Sebab sejak negara-negara Arab melancarkan aksi boikot minyak, diperkirakan mereka telah menurunkan impor minyaknya kepada Jepang lebih dari 30%.⁵² Krisis minyak ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Jepang turun dari 9% menjadi hampir 0% pada tahun 1974.⁵³ Jadi Jepang harus mencari jalan lain untuk mendapat pasokan minyak bagi kebutuhan normal industrinya tersebut. Dan dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang penting bagi Jepang sebagai alternatif pemasok sumber energi dengan mengimpor minyak mentah dari Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari Lampiran 7, sebuah tabel yang menggambarkan negara-negara pemasok minyak mentah bagi Jepang. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pemasok minyak yang penting bagi Jepang. Meski tidak menjadi negara pemasok paling banyak akan kebutuhan minyak Jepang, namun Indonesia menempati posisi ke-3 (*oil boom* pertama) sebagai pemasok minyak terbesar, setelah Saudi Arabia dan Iran pada tahun 1973. Dan menjadi pemasok minyak ke-2 terbesar setelah Saudi Arabia di tahun 1979 (*oil boom* kedua). Tabel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara pemasok minyak terpenting di kawasan Asia Tenggara bagi Jepang.

Dalam hal ini Jepang memandang kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang penting setelah negara-negara di Timur Tengah bagi pengadaan sumber energi. Untuk menyelamatkan perekonomian di masa mendatang, Jepang akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk ikut terlibat dalam memberikan bantuan keuangan dan teknis bagi proyek-proyek minyak dan LNG di Indonesia.

⁵² Sukses Miki & Misi Tanaka, *Tempo* (12 Januari 1974).

⁵³ Windratmo, 1998, *Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia dan Diplomasi Jepang-Indonesia Studi Kasus: Kebijakan Ekonomi Indonesia di Bidang Mobil Nasional*, Jakarta: FISIP UI, hal. 51 dikutip dari Marta Caldwell, 1978, "The Dilema's of Japan and Dependence" dalam Ronald A. Morse (Ed.), *The Politics of Japan's Energy Strategy*, Berkeley: Institute of East Asian Studies, hal. 65.

Sebagaimana pernyataan dari mantan MITI (Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional) Jepang, Yasuhiro Nakasone, yang menyatakan bahwa *"energy had become as important defense, promoting good relations with oil producing nations..."*.⁵⁴

Sementara banyak negara-negara di dunia tengah diliputi keterpurukan akibat melonjaknya harga minyak, di tahun-tahun ini Indonesia justru sibuk membangun industri minyak, LNG, dan pengolahannya (pemurnian minyak, kompleks petrokimia, dan lain-lain). Dimana Jepang turut menanamkan modalnya untuk industri ini. Antara tahun 1972 hingga 1974 terjadi serentetan persetujuan antara Indonesia dan Jepang menyangkut minyak dan LNG. Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya kontrak penjualan minyak pada April 1972 dan gas alam Indonesia pada November 1973 kepada Jepang.⁵⁵ Di tahun 1973 dan 1974, Jepang juga memberikan pinjaman sebanyak 62 milyar yen untuk membangun 35 proyek pengembangan minyak.⁵⁶ Kondisi ini membuat angka investasi Jepang dan nilai perdagangan antar kedua negara mengalami peningkatan. Nilai investasi Jepang di tahun 1973 mencapai US\$ 603,2 juta dan mengalami peningkatan di tahun 1975 hingga mencapai US\$ 2.163,5 juta.⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan minyak menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan dasar pemerintah Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Tanaka. Namun menurut beberapa ahli ekonomi, seperti Dr. Lie Tek Tjeng, perdagangan ini dianggap merugikan Indonesia. Pasalnya kedua bahan bakar ini dipisahkan dari bahan mentah, padahal jika dijual beserta dengan bahan mentahnya posisi tawarnya akan menjadi lebih besar.⁵⁸ Meski demikian, saat itu Indonesia tetap memilih untuk menikmati pemasukan yang didapat dari sektor migas tersebut. Walaupun dari kaca mata ahli ekonomi kebijakan seperti ini dipandang pragmatis dengan anggapan bahwa untuk meningkatkan pemasukan negara, pemerintah berani untuk mengesampingkan konsekuensi tersebut.

⁵⁴ Windratmo, *Ibid*, hal.51.

⁵⁵ Menyambut Sang Tamu, *Tempo* (19 Januari 1974).

⁵⁶ Penundaan Pelunasan Pinjaman RI dari Jepang, *Suara Karya* (14 Desember 1976).

⁵⁷ Bank Indonesia, 1973 dan 1975, *Annuals of Public and Co-Operative Economy*, Jakarta: Bank Indonesia.

⁵⁸ Ayo Bermain dengan Jepang, *Tempo*, 19 Januari 1974.

BAB III

PERAN SOEDJONO HOEMARDANI DALAM HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-JEPANG 1967-1978

Soedjono Hoemardani merupakan sosok yang menarik untuk dikaji. Banyak hal yang menarik untuk dipertanyakan tentang figurnya sekaligus perannya dalam pemerintahan, terutama dalam kancah perpolitikan Orde Baru. Soedjono tidak kental dengan pendidikan di bidang ekonomi, namun mengapa ia dipercaya memegang jabatan sebagai Aspri untuk bidang ekonomi dan perdagangan? Soedjono yang sangat kental dengan pengalaman militernya, mengapa bisa menjadi penasihat kenegaraan, bahkan hingga menjadi penasihat spiritual Soeharto kala itu? Soedjono disebut-sebut sebagai *dalang* dalam panggung perpolitikan Orde Baru. Oleh kalangan yang kontra terhadap kebijakan pemerintahan yang terbuka dengan modal asing, Soedjono adalah sosok yang dipersalahkan akan penguasaan investasi Jepang yang masif di Indonesia. Namun secara bersamaan, Soedjono juga merupakan sosok yang disegani dan dipercaya oleh orang-orang terdekatnya baik dikalangan militer maupun sipil, bahkan oleh beberapa pebisnis Jepang, Cina, maupun pengusaha nasional.

III.1. Latar Belakang Soedjono Hoemardani

Untuk melihat siapakah Soedjono Hoemardani dan mengapa ia bisa dipercaya untuk menjalankan peran sentralnya sebagai pelobi ekonomi dengan pemerintah Jepang pada masa Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan karirnya di kemiliteran yang kemudian merambah ke ranah bisnis dan birokrasi pemerintahan. Serta bagaimana cara pandangya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

III.1.1. Perjalanan Karir Soedjono Hoemardani

Soedjono Hoemardani lahir pada tanggal 7 September 1918. Ia merupakan seorang ayah yang dikaruniai 12 putra/putri dari pernikahannya dengan

Soetamtinah¹. Dimana dalam penanggalan Jawa, hari tersebut bertepatan pada Sabtu Kliwon, 30 Dulkangidah, Tahun Be.² Soedjono semasa kecilnya akrab dipanggil Mas Djonit. Ia dibesarkan di keluarga wirausahawan. Ayahnya, Raden Hoemardani adalah seorang pengusaha pemasok berbagai jenis bahan makanan dan pakaian untuk para pamong dan abdi kraton serta instansi lainnya di daerah Surakarta.

Soedjono tergolong orang yang beruntung karena bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Ia menamatkan pendidikan pertamanya di *Hollands Inlandsche School* (HIS) —sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda khusus untuk orang pribumi terkemuka/ningrat— pada 1934 di Solo. Karena sang ayah menginginkan Soedjono untuk dapat meneruskan usaha keluarganya, akhirnya ia disekolahkan di *Gemeentelijke Handels School* (sekolah lanjutan khusus perdagangan pada masa pemerintahan kolonial Belanda) di Semarang. Tiga tahun setelahnya ia kembali ke solo untuk mengurus usaha ayahnya dan menjadi bendahara Indonesia Muda.³

Namun, jiwa pejuang nenek moyangnya, Raden Ngabei Djojokartiko, menorah lebih tebal dalam diri Soedjono muda.⁴ Ia lebih memilih berkecimpung di dunia militer dibandingkan menjadi saudagar. Pada masa mudanya Soedjono ikut serta dalam Perang Asia Timur Raya. Awalnya ia menjabat Fukudanco di Keibodan. Pada masa Perang Kemerdekaan, Soedjono tergabung kedalam Resimen Infantri XIV yang berkedudukan di daerah Surakarta. Di sana ia bergerilya di bawah komando Gatot Subroto yang saat itu berkedudukan sebagai Gubernur Militer daerah Surakarta.

Meski berkecimpung di dunia militer, ternyata jiwa wirausaha yang diwariskan keluarganya tidak hilang. Dengan pengalaman praktis dari ayahnya

¹ Isteri dari Soedjono Hoemardani, Soetamtinah adalah putri dari K.R.M.H.T.Purwodiningrat dan merupakan buyut dari Paku Buwono IX. Pada umur 8 tahun ia dipertunangkan dengan Soedjono yang saat itu berusia 16 tahun. Dan 8 tahun kemudian di tahun 1944 mereka resmi duduk di pelaminan.

² Masyarakat Jawa menamai tahun menjadi delapan (windu), yang salah satunya adalah Tahun Be. Dalam sistem Penanggalan Jawa, Tahun Be ini adalah tahun dimana tanggal 1 Suro dan 12 Mulud jatuh pada hari Rabu Kliwon; 1 Syawal pada Rebo Legi; dan Idul Adha pada Senin Wage.

³ Michael Sean Malley, 1991, "Soedjono Hoemardani dan Orde Baru", dalam *Di Atas Panggung Sejarah: Dari Sultan ke Ali Moertopo Edisi Khusus 20 Tahun*. Prisma: PT. Pustaka LP3ES, hal. 105 dikutip dari Soedjono Hoemardani, wawancara dengan Ann Gregory, 12 dan 13 Maret 1969.

⁴ Raden Ngabei Djojokartiko adalah seorang demang sekaligus juga merupakan seorang pejuang di Desa Janti pada masa Perang Giyanti.

dan ilmu yang ia dapatkan dari *Gemeentelijke Handels School*, membawa Soedjono menduduki posisi-posisi penting di jantung militer, yakni sebagai kepala bagian ekonomi dan keuangan. Ia pernah menjabat sebagai kepala bagian ekonomi dan keuangan BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). Di tahun 1945 ketika ia masih berpangkat Letnan Dua (Letda), sudah dipercaya untuk menjadi bendahara Resimen 27 Divisi IV.⁵ Dan tahun 1946, ia naik pangkat lagi menjadi Letnan Satu (Lettu), sekaligus menjabat sebagai anggota P1 bagian keuangan Divisi IV Surakarta.⁶ Ia menjabat sebagai anggota P1 sampai dengan tahun 1949. Pada masa itu posisi-posisi tersebut langka di dinas kemiliteran.

Pasca Perang Kemerdekaan, Soedjono kembali naik pangkat menjadi kapten pada tahun 1950 dan masih berdinasi di divisi yang sama. Kemudian pada tahun 1951 ia dipindahkan oleh A.H.Nasution dari Surakarta ke Semarang. Di Semarang Soedjono menjabat sebagai *Comptabiliteit* dan kemudian pada tahun 1953 menjabat sebagai asisten administrasi dan keuangan di bawah Kolonel Gatot Subroto yang diangkat sebagai Panglima Divisi Diponegoro/T&T IV Semarang. Di sinilah Soedjono mengenal dan menjalin kedekatan dengan Soeharto. Dimana pada Juli 1956, Letnan Kolonel Soeharto menjadi Kepala Staf Divisi Diponegoro, yang kemudian menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Namun tak lama kemudian, pada tahun 1957 Soedjono Hoemardani dipindah ke Bandung dengan jabatan sebagai Asisten II Damad (Daerah Militer Angkatan Darat) Divisi Siliwangi/T&T III sekaligus merangkap sebagai Kepala Urusan Keuangan Teritorial IV.⁷ Ketika dinas di Bandung ini Soedjono menerima kenaikan pangkat sebagai mayor. Pada akhir tahun 1957, Soedjono sudah kembali aktif bertugas di Semarang. Namun dalam waktu yang bersamaan ia juga tidak menanggalkan jabatannya di Bandung. Sehingga di tahun 1958 Soedjono merangkap dua jabatan sekaligus, yakni sebagai Asisten II Damad di Bandung dan sebagai Kepala Urusan Keuangan Teritorial IV di Semarang.

Di akhir tahun 1957, Soedjono mulai membentuk perusahaan-perusahaan swasta atas nama Divisi Diponegoro, Kolonel Soeharto, dan Republik Indonesia.

⁵ Harry Tjan Silalahi, 1987, "Kata Sebuah Riwayat", dalam CSIS, *Soedjono Hoemardani: Pendiri CSIS 1918-1986*, Jakarta: CSIS, hal. 16

⁶ *Kompas*, 14 Maret 1986.

⁷ *Sin Min*, 4 Januari 1957 dan *Duta Masyarakat*, 14 Januari 1957.

Ia mendirikan dua yayasan atas nama Divisi Diponegoro, yakni Jajasan Dana Pembangunan Territorium IV (JDPT IV) yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian Jawa Tengah dan Jajasan Territorium IV (JT IV) yang bertujuan untuk membantu perwira militer yang telah pensiun. Pada Desember 1957 dan Januari 1958, Soedjono bersama dengan Mayor Suwarno dan Mayor Sutanto mendirikan tiga perusahaan dengan investasi dari JT IV. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah P.T. N.V. Garam di Pati; P.T. Sido Open di Salatiga yang bergerak di bidang perdagangan umum, transportasi dan industri; serta P.T. Sido Dadi Muljo di Surabaya yang bergerak di bidang yang serupa dengan P.T. Sido Open. Tiga perusahaan ini mendapat kucuran dana paling besar dari JT IV, walaupun ada juga investasi dari beberapa perwira pensiunan namun jumlahnya kecil. Meski sebagian besar investasi berasal dari JT IV, yayasan ini hanya menerima 10% dari laba perusahaan.⁸

Beberapa bulan kemudian Soedjono mendirikan dua usaha yang lebih besar dari sebelumnya bersama pengusaha Bob Hasan —anak angkat mantan Panglima Divisi Diponegoro, Gatot Subroto. Hanya saja Soedjono tidak lama memegang kedua usaha ini karena posisi wakil pemegang saham dan komisaris diambil alih oleh Walikota Semarang, Hadisubeno Sosrowerdoyo, seorang tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang antikomunis. Pada bulan Mei 1958, P.T. Dwi Bakti didirikan di Semarang atas nama Republik Indonesia dan Panglima Divisi Diponegoro. Soedjono membeli seperempat saham atas perusahaan ini. Sisanya dibeli oleh Kolonel Dr. Raden Sutomo selaku Ketua Bidang Finek (Finansial dan Keuangan), Sukatja (seorang pengusaha dari Jakarta), dan Bob Hasan. Pada waktu yang bersamaan, Soedjono bersama tiga orang ini juga merupakan pemilik saham atas P.T. Pangeran Lines —sebuah perusahaan pelayaran di Semarang. Dimana sebagian besar saham perusahaan ini dimiliki oleh Sutomo dan Soedjono atas nama Republik Indonesia dan Panglima T&T IV. Dalam kedua usaha ini Sutomo dan Soedjono Hoemardani menjabat sebagai

⁸ Michael Sean Malley, *Op Cit*, hal. 106 dikutip dari Indonesia, *Berita Negara, Tambahan, Perseroan2 Terbatas, Perseroan2 Firma atau Komanditer, dan Perkumpulan2 Koperasi (BNTPT)* no. 893, 897 dan 880 (1959).

presiden komisaris dan komisaris, dimana mereka masing-masing mendapat 2,5% laba perusahaan.⁹

Pada tahun 1959, A.H.Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) melancarkan gerakan pembasmian korupsi dalam tubuh militer. Sebenarnya Nasution telah lebih dulu mencanangkan kebijakan ini dikalangan partai-partai politik di Jakarta pada tahun 1956. Dijalankannya kebijakan ini merupakan jawaban dari pemerintah atas kritik-kritik yang datang dari para perwira militer di luar Jawa. Sebaliknya, latar belakang dari dijalankannya pembasmian korupsi di tubuh militer ini adalah desakan dari partai-partai politik yang menilai bahwa peluang tindak korupsi di tubuh militer semakin meluas, terutama setelah dikeluarkannya Undang-undang Darurat oleh Soekarno. Dengan dilakukannya pengambilalihan (nasionalisasi) kekayaan Belanda dan pengusiran warga negara Belanda, hal ini memungkinkan terjadinya patronasi diantara elit yang mapan terutama di kalangan militer.¹⁰

Gerakan pembasmian korupsi ini direalisasikan oleh Nasution pada bulan Agustus 1959. Dan pada 13 Oktober 1959, Inspektur Jenderal Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Sungkono mengumumkan kepada pers tentang hasil pemeriksaan dua yayasan yang didirikan oleh Soedjono, yakni JDPT IV dan JT IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dana JDPT IV lebih besar dibandingkan dengan JT IV. Dana yang telah dikumpulkan JDPT IV sebanyak Rp.42.174.000, sedangkan uang yang telah dipinjamkan sebanyak Rp.33.576.500. Sumber-sumber dana yang didapat JDPT IV ini sangat beragam, diantaranya didapat dari pemungutan dana kopra, garam, cukai, gula, telepon, listrik, undian, GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia), semen, kendaraan bermotor, radio, kapuk, cengkeh, dan lain-lain.¹¹ Padahal ketika JDPT IV pertama kali berdiri di tahun 1957, dana yang telah terkumpul hanya mencapai Rp.419.352.¹²

Meningkatnya modal yayasan ini menunjukkan bahwa Soedjono memiliki andil yang besar. Soeharto pernah mengungkapkan dalam otobiografinya bahwa peranan Soedjono dalam pendirian dan pengelolaan dua yayasan itu memang

⁹ Michael Sean Malley, *Op Cit*, hal.107 dikutip dari *BNTPT* no. 263 (1960) dan *BNTPT* no.826 (1959).

¹⁰ Michael Leifer, 1989, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, Hal. 78.

¹¹ *Duta Masyarakat*, 16 Oktober 1959.

¹² *Sin Min*, 13 Juli 1957.

sangatlah besar.¹³ Sehari sebelum Soeharto menanggalkan jabatannya sebagai panglima Divisi Diponegoro pada 14 Oktober 1959, ia sempat memuji keberhasilan para pengurus JDPT IV dalam mengelola yayasan tersebut.

Dari gambaran ini bisa dilihat bahwa Soedjono meski berkarir di dinas kemiliteran, namun jiwa pengusaha warisan keluarganya masih mendarah daging. Melihat kenyataan ini, tidak heran jika pada masa Orde Baru, Soedjono dipercaya oleh Soeharto memangku posisi teknokrat ekonomi meski ia tidak melepaskan atribut kemiliterannya. Ditambah dengan adanya kebijakan Pemerintah Orde Baru yang mengizinkan militer untuk ikut bergelut di bidang non-militer (ekonomi/berbisnis). Dalam karir militernya, tahun 1959 Soedjono menjabat sebagai Perwira Staf Inspektorat Keuangan. Dan pada tahun 1960 ia dipindahtugaskan dari Semarang ke Jakarta. Di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta, ia menjabat sebagai Pamen (Perwira Menengah) Deputy III Urusan Perbendaharaan dan kemudian menjabat sebagai P.U.I Staf Deputy III KSAD.¹⁴

Satu tahun kemudian ia naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) dengan kedudukan sebagai Deputy III KSAD. Dan pada tahun 1963, ia menjabat sebagai Paban I Asisten 7 (keuangan) Panglima Angkatan Darat (Pangad). Masih di tahun yang sama, atas rekomendasi dari atase Angkatan Darat Amerika Serikat di Jakarta, Kolonel George Benson, ia mendapat kesempatan untuk belajar keuangan militer di Amerika Serikat. Selama 10 bulan, ia mengikuti kursus *Finance Officer Advance* di Sekolah Keuangan Angkatan Darat Amerika, di Fort Benjamin Harrison, Indianapolis, Indiana. Dan di tahun 1965, Soedjono naik pangkat lagi menjadi kolonel penuh dan mulai bekerja sebagai Deputy Asisten/Wa Asisten 7 (keuangan) di bawah Mayor Jenderal Alamsyah Ratuperwiranegara.¹⁵

Di tahun 1966, Soedjono berkedudukan sebagai Pembantu Khusus Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) dan merupakan anggota Staf Pribadi (Spri)¹⁶ Urusan Ekonomi Keuangan Presidium Kabinet Ampera. Spri kemudian diubah menjadi Aspri (Asisten Pribadi), dan Soedjono pun menjabat

¹³ G.Dwipayana dan Ramadhan K.H, 1988, *Suharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, hal.82.

¹⁴ Harry Tjan Silalahi, *Op Cit*, hal.17

¹⁵ Michael Sean Malley, *Op Cit*, hal. 109 dikutip dari Soedjono Hoemardani, wawancara dengan Aan Gregory, (13 April 1969).

¹⁶ Spri merupakan lembaga ekstra yudisial yang dibentuk oleh Soeharto ketika menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet pada 28 Juli 1966.

Aspri Presiden Urusan Ekonomi dan Perdagangan pada tahun 1969. Di tahun 1971, ia naik pangkat menjadi Mayor Jenderal TNI.

Dengan karir militernya yang melejit cepat, sangat memungkinkan bagi Soedjono untuk meraih berbagai penghargaan dan tanda jasa. Setidaknya ada 16 tanda jasa yang diperoleh Soedjono. Bintang tanda jasa itu antara lain Bintang Gerilya¹⁷ dan Bintang Maha Putra Utama¹⁸. Dari beberapa negara ia juga memperoleh tanda jasa sebagai penghargaan dalam usaha mempererat hubungan bilateral. Tanda jasa tersebut antara lain diperoleh dari Kamboja (Medaile Grand Officer Del'otdre Dumetire De Montaraphon), Korea (The Ancient Order of Sikatuna Medal Maginoo) dan Jepang (Bintang Harta Suci Kelas Satu).¹⁹ Dari penghargaan yang ia dapat dari beberapa negara ini, menunjukkan bahwa ia piawai dan berperan dalam penjalinan hubungan bilateral Indonesia semasa Orde Baru, meski secara yuridis ia bukan bagian dari Departemen Luar Negeri.

III.1.2. Pandangan Soedjono Hoemardani terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia

Meski Soedjono Hoemardani merupakan salah seorang petinggi militer, namun ternyata ia memiliki pandangan yang cukup ideal tentang bagaimana seharusnya perekonomian Indonesia dibangun. Pandangan Soedjono akan operasionalisasi ekonomi Indonesia ini disandarkan pada asas demokrasi ekonomi dalam kerangka UUD 1945. Landasannya adalah observasinya mengenai ketidakselarasan dalam masyarakat.²⁰ Dalam buku yang ia tulis, *Renungan tentang Pembangunan*, Soedjono menekankan perlunya pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dengan berasaskan keadilan. Polanya adalah dengan menciptakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah dan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, serta antara sektor ekonomi tradisional dengan sektor ekonomi modern.

Dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Soedjono menjelaskan tentang kesamaan pandangan yang ia miliki akan arah pembangunan

¹⁷ Tanda jasa yang diberikan pada orang yang ikut serta dalam Perang Kemerdekaan.

¹⁸ Ini merupakan bintang penghargaan sipil yang tertinggi. Bintang ini setingkat dibawah Bintang Republik Indonesia. Tanda jasa ini diberikan kepada mereka yang berjasa secara luar biasa di dunia militer.

¹⁹ Harry Tjan Silalahi, *Op Cit*, hal. 17.

²⁰ Soedjono Hoemardani, 1981, *Renungan tentang Pembangunan*, Jakarta: CSIS, Hal 18 – 24.

ekonomi Indonesia dengan konsep *Wa no Seiji* (kebijakan harmoni)²¹ yang menjadi dasar pengelolaan ekonomi Jepang. Konsep *Wa no Seiji* ini di Jepang tercermin dalam pengambilan keputusan/kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh tiga elemen penting antara pemilik modal, politisi (terutama LDP), dan birokrat.²² Dimana konsep seperti ini menggambarkan sebuah keharmonisan (*Wa no Seiji*) dalam pengambilan kebijakan ekonomi di Jepang. Menurut Hadi Soesastro, prinsip *Wa no Seiji* yang dimaksud oleh Soedjono dalam konteks ke-Indonesiaan, berkaca pada keperihatannya atas ketidakselarasan yang terjadi di Indonesia. Bagi Soedjono, sistem ekonomi Indonesia yang mengacu pada UUD 1945, dibangun dengan tiga kekuatan ekonomi nasional yaitu sektor negara, sektor masyarakat yang dihimpun dalam koperasi, dan sektor swasta nasional. Menurutnya keadilan yang mencerminkan *Wa no Seiji* adalah tumbuhnya ketiga elemen kekuatan ekonomi tersebut dengan saling memperkuat.²³

Lebih jauh Hadi Soesastro menambahkan bahwa dalam mewujudkan konsep *Wa no Seiji* ini, Soedjono berusaha menempatkan dirinya sebagai penghubung untuk menjembatani perbedaan yang sering mencuat antara pemerintah dengan dunia usaha. Disamping itu Soedjono juga mendorong agar sektor swasta nasional ikut berpartisipasi aktif bersama dengan pemerintah untuk mengembangkan sektor masyarakat yang dihimpun dalam koperasi, atau yang Soedjono sebut sebagai ‘golongan ekonomi lemah’. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini adalah dengan digalakkannya subsidi bagi usaha ‘golongan ekonomi lemah’. Oleh karenanya, ketika A.R. Soehoed selaku menteri perindustrian mengkampanyekan gagasan ‘bapak angkat-anak angkat’ di bidang perindustrian, Soedjono mendukung gagasan ini. Istilah ini sebenarnya merujuk pada usaha *joint venture* (usaha patungan) antara perusahaan asing sebagai penyumbang modal dengan perusahaan nasional yang membutuhkan kucuran modal.

²¹ Hadi Soesastro, 1987, “Pertumbuhan Ekonomi dengan Keadilan”, dalam CSIS, *Soedjono Hoemardani Pendiri CSIS 1918-1986*, Jakarta: CSIS, hal. 39 dikutip dari laporan kunjungan Soedjono Hoemardani ke Tokyo yang berjudul “Jepang di Bawah Perdana Menteri Z. Suzuki”, tidak diterbitkan, November 1980.

²² Ali Moertopo, 1972, *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*, Jakarta: CSIS.

²³ Hadi Soesastro, *Op Cit*, hal.41.

Ide pembangunan ekonomi Soedjono ini memang terkesan ideal, namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah “Apakah ide yang besar ini benar-benar terwujud dalam tataran praktis?”. Akan sangat disesalkan jika ide yang besar ini hanya sebatas retorika tanpa implementasi yang nyata. Jika memang ide besar ini telah diupayakan, namun tidak berujung pada keharmonisan ekonomi seperti yang digambarkan dalam konsep *Wa no Seiji*. Maka berarti ada salah satu elemen dari 3 sektor yang dimaksud yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan kepincangan yang justru membuat hubungan diantara ketiga elemen tersebut, serta kondisi perekonomian saat itu tidak harmonis.

Melihat karir Soedjono di kemiliteran, dimana ia selalu menempati posisi-posisi penting di jantung komando militer, yakni di bagian keuangan. Tentu hal ini menjadi nilai lebih yang dimiliki Soedjono dalam karirnya. Ditambah lagi dengan kemampuannya dalam menggeluti dunia usaha yang ia dapatkan dari bangku sekolah dan pengalaman praktis dari keluarganya. Selama berkarir di militer pun, ia tak lepas dari mengurus proyek-proyek pembangunan usaha. Yayasan JDPT IV dan JT IV, serta perusahaan-perusahaan yang ia didirikan, menjadi bukti akan kepiawaiannya dalam mengelola usaha. Maka tak heran jika pada masa Orde Baru, Soedjono dipercaya menjadi penasihat kepresidenan untuk bidang ekonomi. Bahkan akhirnya menjadi penyambung lidah antara Indonesia dengan Jepang dalam berbagai kesepakatan ekonomi.

Soedjono juga tidak sulit menjalin kedekatan dengan Soeharto karena mereka pernah bekerja dalam satu divisi yang sama di Divisi Diponegoro/T&T IV Semarang. Selain itu, ide pembenahan ekonomi yang diusung Soedjono (*Wa no Seiji* ala Jepang) yang menghendaki adanya keharmonisan diantara sektor-sektor pelaku ekonomi, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Orde Baru yang mengedepankan pembangunan ekonomi lewat bantuan investasi asing. Dengan kondisi yang demikian dan latar belakang dari Soedjono, sangat memungkinkan baginya untuk mengambil peran besar dalam perpolitikan Orde Baru, yang kemudian membuka peluang baginya untuk menjalin kedekatan dengan pemerintah Jepang.

III.2. Awal Keterlibatan Soedjono Hoemardani dalam Hubungan Indonesia-Jepang

Di tahun-tahun pertama Orde Baru, Soeharto membentuk staf pengawas pribadi dengan sebutan Spri (Staf Pribadi). Pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Soekarno mengosongkan posisi presiden, Soeharto membentuk Spri yang terdiri dari 8 orang penasehat, enam orang dari unsur militer dan dua lainnya dari sipil dengan Alamsjah Ratuperwiranegara sebagai koordinatornya. Spri inilah yang dalam masyarakat luas dinggap sebagai “kabinet bayangan”. Ahli-ahli ekonomi Spri antara lain Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohammad Sadli, dan Subroto.

Diantara unsur militer dalam Spri, yang paling berpengaruh adalah Alamsjah Prawiranegara dan Soedjono Hoemardani. Keduanya dipercaya oleh Soeharto dan pernah bekerja dalam satu divisi yang sama. Soejono adalah kepala bagian keuangan di Divisi Diponegoro yang pada masa itu berada di bawah komando Soeharto. Sementara Alamsjah Prawiranegara adalah asisten keuangan Soeharto di Markas Besar AD di Jakarta pada awal tahun 1960an. Pada saat itu, Soedjono merupakan salah satu dari tiga junior yang menjadi staf pribadi dibawah arahan Alamsyah yang dianggap sebagai perlambang pengusaha militer.²⁴

Latar belakang Soedjono di bidang keuangan militer dan kesuksesannya sebagai staf keuangan Divisi Diponegoro di bawah pimpinan Soeharto pada tahun 1950an, membuatnya memperoleh kepercayaan dan sekaligus dukungan dari Soeharto untuk menjadi penasihat kepresidenan dan untuk mengambil inisiatif finansial dalam pemerintahan Orde Baru. Soedjono bersama dengan beberapa jenderal AD seperti Alamsjah, Daryatmo dan Kartakusuma, sering mengiringi Soeharto dalam melakukan pertemuan-pertemuan.²⁵ Soedjono dianggap sebagai penasihat yang penting meski jabatannya saat itu hanya kolonel, berbeda dengan penasihat-penasihat lainnya yang sudah berpangkat jenderal. Mengenai hal ini, bisa dilihat lewat catatan seorang peneliti asing yang mewawancarai Soedjono pada awal tahun 1969. Peneliti tersebut mencatat:

Pada hari-hari pertama (setelah kup) Soeharto mengandalkan banyak orang untuk memberi nasihat..... Kemudian dia menjadi lebih dekat dengan beberapa orang. Spri resmi dibentuk

²⁴ Harold Crouch, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia”, dalam Cambridge University Press, Vol. 31 No. 4, Juli 1979.

²⁵ *Kompas*, 12 Juli 1966.

pada Juli 1966. Soedjono Hoemardani sudah lama dekat dengan dia. Dia sudah bertemu dengan Soeharto setiap hari sejak kup.²⁶

Sejak awal mula pemerintahan Orde Baru, Soedjono dipercaya untuk melakukan perjalanan ke negara-negara yang dianggap penting bagi Indonesia dalam mencapai stabilitas dan perkembangan ekonomi. Meski sebenarnya Soedjono tidak memiliki pengalaman dalam berdiplomasi dengan pemerintah negara asing. Pada bulan September 1966, Soedjono melakukan kunjungan pertamanya ke luar negeri. Pada waktu itu Soedjono berkunjung ke Belanda, Amerika Serikat (AS) dan Jepang bersama dengan delegasi dari Departemen Luar Negeri di bawah Adam Malik.

Di New York, AS, Adam Malik mengumumkan keputusan Indonesia untuk kembali menjadi bagian dari PBB. Soedjono menemani Adam Malik dan Anwar Sani, (Direktorat Jenderal Hubungan Luar Negeri) untuk mengadakan pertempuan di Gedung Putih dengan Lyndon B. Johnson dan dua penasehatnya, Walt Rostow dan William Jordan, serta Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Marshall Green. Dalam pertemuan tersebut, dapat dilihat bahwa Johnson sangat tertarik pada isu komunisme di Asia Tenggara. Secara khusus, Johnson menanyakan tentang pandangan Indonesia mengenai konflik Vietnam kepada mereka. Apa yang bisa dilakukan Indonesia dan AS untuk menangani konflik tersebut dan apakah dalam pandangan Adam Malik, komunis di Indonesia dapat dipastikan sudah mati. Dalam pertemuan tersebut tidak terlihat peran aktif Soedjono, yang lebih berperan saat itu adalah Adam Malik.²⁷

Setelah meninggalkan AS, delegasi terbang ke Tokyo. Disinilah Soedjono pertama kali diperkenalkan kepada anggota *Indonesia Lobby*.²⁸ Pelobi yang berpengaruh di Jepang, antara lain Nakajima Shinzaburo, seorang pebisnis – Nakajima merupakan salah satu pengusaha yang memberikan dana bagi pemberontak PRRI; Takeo Kimura, politisi konservatif dan kepala sekertaris

²⁶ Michael Sean Malley, *Op Cit*, hal. 109 dikutip dari Aan Gregory, “Catatan dari Wawancara dengan Soedjono Hoemardani”, (15 Maret 1969).

²⁷ Michael Malley, “Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relations 1966-1974” dalam *Southeast Asia Program Publications*, Cornell University, Vol. 48, Oktober 1989, hal.48.

²⁸ *Indonesia Lobby* sebenarnya bukan sebuah organisasi resmi, melainkan sebuah kelompok politisi, pengusaha, dan bekas perwira militer Jepang, yang membujuk pemerintah Jepang untuk mendukung proyek-proyek yang menguntungkan mereka. Orang Indonesia yang membutuhkan bantuan modal dari Jepang sering kali menghubungi mereka.

kabinet; dan Takeo Fukuda, menteri keuangan.²⁹ Perkenalan ini menjadi sinyal/rambu-rambu bagi Soedjono agar segera memposisikan dirinya sebagai perantara yang penting antara pemerintah Orde Baru dengan *Indonesia Lobby*. Secara pelan namun pasti, hubungan Indonesia dengan Jepang mengalami peningkatan.

Untuk yang kedua kalinya Soedjono kembali bertandang ke Jepang di tahun 1967. Soedjono bersama dengan Ali Murtopo dan beberapa pejabat negara lainnya berangkat ke Jepang sebagai *advance group* untuk mempersiapkan kunjungan Soeharto ke *negeri sakura* tersebut. Kunjungan tersebut dilakukan seusai Sidang Istimewa yang mengangkat Soeharto sebagai presiden. Selain untuk mempersiapkan kedatangan Soeharto ke Jepang, di sana Soedjono bertugas untuk memperkenalkan pemerintah Orde Baru kepada pemerintah Jepang. Saat itu Soedjono berhasil meyakinkan pemerintah Jepang yang pada saat itu di bawah pimpinan Perdana Menteri Sato akan pentingnya memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan membantu pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde baru. Bahkan secara pribadi pada pertemuan tersebut, Soedjono membawa Fukuda³⁰ ke kamar hotel Soeharto untuk diperkenalkan secara langsung. Ini memperlihatkan bahwa baru setahun setelah kunjungannya yang pertama ke Jepang, ia sudah memiliki kontak yang baik dengan politisi-politisi Jepang.

Dalam hal ini Soedjono berhasil merintis hubungan baik dengan Jepang. Sebagai wujud permulaan hubungan baik tersebut adalah dengan ditandatanganinya sebuah kesepakatan dengan pemerintah Jepang. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kredit sebesar US\$ 30 juta kepada Indonesia.³¹ Meski jumlah ini tidaklah banyak, namun ini bisa dikatakan permulaan yang berjalan dengan baik untuk dapat menjalin kembali hubungan dengan Jepang.³²

²⁹ Masashi Nishihara, 1994, *Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan pampasan perang: hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1996*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

³⁰ Fukuda adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) LDP yang kemudian menjadi perdana menteri di tahun 1976-1978.

³¹ Sofjan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, 1987, "Soedjono Hoemardani dan Hubungan Indonesia-Jepang", dalam CSIS, *Soedjono Hoemardani Pendiri CSIS 1918-1986*. Jakarta: CSIS, hal. 82.

³² Namun sebagian kalangan, khususnya Deplu, menganggap bahwa kunjungan tersebut tidak berhasil karena dalam kunjungan tersebut tidak disepakati satu perjanjian pun seperti yang

Di tahun yang sama, Soedjono menerima kunjungan dari Kubota Yutaka, seorang pengusaha Jepang yang berkunjung untuk membicarakan kemungkinan dijalankannya kembali proyek konstruksi asahan di Sumatera yang terhenti sejak tahun 1963 karena ditinggalkan oleh tim yang menangani proyek ini sebelumnya, yakni tim dari Rusia. Menurut A.R. Soehoed, yang kemudian menjadi Kepala Proyek Asahan, pada tahun 1967 Kubota mengunjungi Soedjono di Jakarta untuk mengajukan rencana dalam memulai kembali riset Proyek Asahan, yang pendanaannya disediakan oleh Nippon Koei.³³ Kubota tertarik mengembangkan potensi hydro-elektrik sungai Asahan sejak akhir tahun 1930an. Ketika Perang Dunia II dimana saat itu Jepang menduduki Sumatera, ia mengetahui misi survei pembangunan sumber air. Sejak itu, Kubota segera memendirikan firma konsultasi mesin, Nippon Koei. Selama tahun 1950an, ia telah melakukan berbagai lobi untuk mendapat peluang mengembangkan proyek Sungai Asahan sebagai bagian dari proyek pampasan perang. Namun tidak berhasil. Meski dalam Proyek Asahan ini Kubota tidak berhasil melobi, namun firma miliknya memegang sebagian besar proyek infrastruktur dalam dana pampasan perang.³⁴ Dalam pertemuan dengan Kubota ini, Soedjono menyepakati rencana Kubota ini. Dan melalui persetujuan dari Soeharto dengan persyaratan bahwa proyek tersebut tidak mengganggu APBN dan bantuan luar negeri,³⁵ Kubota menerima izin untuk melanjutkan kembali risetnya pada proyek ini.

Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Kubota mendekati Soedjono. Hal ini masih sulit untuk diklarifikasi. Namun satu hal yang menjadi kemungkinan adalah bahwa Kimura telah merekomendasikan Soedjono kepada Kubota. Pertemuan Soedjono dengan *Indonesia Lobby* selama kunjungannya ke Jepang di tahun 1966 telah membangun kepercayaan pada Soedjono. Kimura percaya bahwa Soedjono mudah untuk didekati oleh para investor Jepang yang berkepentingan untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk Proyek Asahan ini, Kimura

diharapkan Indonesia sebelumnya. Jepang hanya memberikan sedikit bantuan. Lihat Leo Suryadinata, 1998, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta: LP3ES, hal. 55-56.

³³ A.R. Soehoed, 1975, *Asahan: Impian yang Menjadi Kenyataan*, Tokyo: Proyek Asahan.

³⁴ Masashi Nishihara, *Ibid*, hal. 66-67.

³⁵ Proyek Asahan Pasti Dimulai Tahun 1973, *Kompas* (10 April 1972).

sendiri kemudian dikenal sebagai pendukung kuat berjalannya Proyek Asahan.³⁶ Kimura kemudian dikenal dengan pernyataannya yang cukup fenomenal bahwa ia berkomitmen untuk melakukan *hara kiri* (bunuh diri) jika proyek ini tidak berhasil. Pernyataan ini dilontarkan ketika ia mengunjungi Indonesia pada awal tahun 1970an. Pernyataan ini ditujukan sebagai simbol keseriusan Jepang untuk bekerjasama dengan Indonesia.

Proyek Asahan ini menjadi proyek kerjasama Indonesia-Jepang terbesar yang ditangani oleh Soedjono. Namun upaya untuk mencapai kesepakatan ditandatanganinya tender proyek tersebut mengalami berberapa hambatan. Perundingan-perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam mendanai proyek ini memakan waktu yang cukup lama. Pengajuan rencana Kubota untuk membangun proyek ini sudah dirintis dari tahun 1967, namun penandatanganan perjanjian dasar Proyek Peleburan Alumunium dan Proyek PLTA Asahan tersebut baru tercapai pada 7 Januari 1974.³⁷ Meski sebenarnya pada Juli 1970 Nippon Koei, perusahaan milik Kubota telah melakukan studi kelayakan pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di tepi Sungai Asahan, setelah sebelumnya Kubota menyerahkan laporan penelitiannya tentang proyek tersebut kepada Soedjono di bulan Juli 1969.³⁸ Namun ketika pemerintah menawarkan kontrak untuk pembangunan Proyek Asahan seluruhnya, termasuk pelabuhan laut, pelabuhan alumunium, dan PLTA pada awal 1972. Tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan tawaran sebelum 15 Juli 1972, dimana tanggal tersebut ditentukan sebagai hari terakhir penetapan tender.³⁹ Dimulai dari sinilah keberlanjutan Proyek Asahan ini mengalami kendala, terutama masalah sumber dana dan perusahaan Jepang mana yang bersedia untuk memberikan pinjaman dana tersebut.⁴⁰ Karena untuk pembangunan proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar sejumlah US\$ 600 juta. Oleh karenanya proyek ini tidak hanya menguras

³⁶ Bisuk Siahaan, 1984, *Sejarah pembangunan proyek Asahan: Membangunkan raksasa yang sedang tidur*, Jakarta: Bisuk Siahaan.

³⁷ Perundingan Tahap Kedua Proyek Asahan Dimulai, *Suara Karya* (13 September 1974).

³⁸ Bisuk Siahaan, *Ibid*, hal. 242.

³⁹ Proyek Asahan: Setelah 67 Tahun, *Topik* (Juli 1975).

⁴⁰ Untuk lebih rinci mengenai pembangunan proyek asahan ini bisa dilihat dalam A.R.Soehoed, 1975, *Asahan: Impian yang Menjadi Kenyataan*, Tokyo: Proyek Asahan. Atau Bisuk Siahaan, 1984, *Sejarah pembangunan proyek Asahan: Membangunkan raksasa yang sedang tidur*, Jakarta.

perhatian perusahaan-perusahaan Jepang sebagai penyandang dana, namun juga memerlukan dukungan politik dari kabinet maupun Diet.⁴¹

Dengan disetujuinya Proyek Asahan tersebut lewat perantara Soedjono, ini menunjukkan bahwa Soedjono mulai kembali menangani proyek-proyek seperti yang telah ia lakukan semasa berkantor di Semarang dulu. Selain Proyek Asahan, Soedjono juga menangani usaha lainnya di tahun 1967 ini dengan kedudukannya sebagai Spri. Ia mengorganisasikan kembali Bank Windu Kentjana —yang didirikan oleh Lim Sioe Liong pada tahun 1954— dimana saham dari bank ini dibagi-bagi antara tiga yayasan militer. Soedjono ditunjuk sebagai komisaris, sedangkan Suryo Wiryo, yang juga anggota Spri, ditunjuk sebagai komisaris utama. Mereka berdua berhak menerima 5% dari laba bank ini.⁴²

Tahun 1968, muncul berbagai kritik (tuduhan tindak korupsi) dari kalangan mahasiswa dan pers terhadap aktivitas-aktivitas bisnis ini, terlebih lagi aktivitas bisnis tersebut dilakukan oleh beberapa Spri terdekat Soeharto. Sebagai respon atas kritikan ini, Soeharto akhirnya membubarkan Spri pada pertengahan Juni 1968. Namun tiga anggota staf pribadinya yang juga adalah Angkatan Darat, segera diangkat kembali sebagai Asisten Pribadi (Aspri). Tidak ada Spri, namun muncul Aspri yang kedudukannya sama-sama penasihat/asisten pribadi presiden. Namun peta kekuatan dalam lingkaran Aspri berbeda dengan Spri. Alamsjah tidak diangkat menjadi bagian dari Aspri, sebagaimana Soeharto mengangkat Suryo Wiryohadiputro, Soedjono dan Ali Murtopo.

Di Aspri inilah hubungan Soedjono dan Soeharto semakin dekat. Peranan ia dalam pemerintahan semakin menentukan, meskipun di sisi lain tindak-tanduk Soedjono mulai banyak dikritik oleh pers dan mahasiswa. Namun oleh Soeharto, ia dipercaya untuk menangani hubungan baik dengan Jepang. Oleh karenanya tak heran Soedjono kemudian dikenal sebagai arsitektur yang membenahi kembali dan membangun hubungan luar negeri dengan Jepang. Di masa awal Orde Baru, ia menjadi penyambung lidah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang dalam konteks kenegaraan.

Soedjono juga memainkan perannya dalam mendapatkan kredit dari Jepang yang disalurkan lewat IGGI (*Intergovernmental Group for Indonesia*),

⁴¹ Jalan Pintas Asahan, *Tempo* (3 Agustus 1974).

⁴² Michael Sean Malley, *Op Cit*, hal. 110 dikutip dari BNTPT no.74 (1968).

badan konsorsium negara-negara donor bagi Indonesia, dimana Jepang menjadi salah satu anggotanya. Namun dalam konteks pengusaha kredit lewat IGGI ini, Soedjono menyadari bahwa bantuan itu tidak bisa menjadi pijakan utuh bagi pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia. Sebagaimana yang ia ungkapkan dalam tulisannya yang berjudul *Aspek Strategi dari Hubungan antara Indonesia dan Jepang*:

Hingga kini, sumber pembiayaan yang penting, kalau tidak yang utama, bagi pembangunan kita adalah bantuan dari negara-negara kreditor yang terhimpun dalam IGGI. Tetapi telah terdapat petunjuk-petunjuk bahwa bantuan itu akan menurun. Sebabnya adalah bahwa bantuan itu tergantung pada struktur dan perkembangan politik dalam negeri setiap negara kreditor.⁴³

Bantuan dana dari Jepang tidak hanya diberikan lewat IGGI, namun beberapa kredit juga diberikan langsung tanpa perantara (bantuan bilateral). Sekitar tahun 1971/1972, ketika Indonesia mengalami kegagalan panen, Jepang memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia sebesar 150 ribu ton beras. Dimana Soedjono memainkan peranan kunci dalam pemberian bantuan ini. Sejak kunjungan pertamanya ke Jepang, hampir setiap tahun ia melakukan kunjungan ke *negeri sakura* tersebut. Ia membuka kontak-kontak resmi maupun pribadi dengan berbagai kalangan di sana. Ia menjalin hubungan dengan partai politik yang berkuasa di sana, yakni LDP, serta pejabat pemerintah dan birokrasi, terutama menteri-menteri dari kementerian yang dianggap penting. Hubungan resmi dan personal itu terjalin dengan birokrat dari Kementerian Luar Negeri (Gaimusho), Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan. Selain itu, hubungan itu juga terjalin dengan anggota-anggota Parlemen Jepang (Diet) dan partai-partai oposisi, khususnya Partai Sosialis Demokrat dan Partai Sosialis Komeito.⁴⁴

Selain dengan para birokrat dan politisi, Soedjono juga menjalin hubungan dengan media massa Jepang. Dimana hubungan ini ia manfaatkan untuk mempromosikan perkembangan dan kemajuan pemerintahan Orde Baru sebagai bentuk pencitraan positif di mata Jepang. Ia juga banyak menjalin hubungan dengan kalangan pengusaha, pebisnis dan pemilik modal industri yang

⁴³ Soedjono Hoemardani, 1981, "Aspek Strategi dari Hubungan antara Indonesia dan Jepang" dalam Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (Ed.), *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik*, Jakarta: CSIS, hal. 563

⁴⁴ Sofjan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, *Op Cit*, hal. 83.

berpengaruh. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pengusaha Jepang memiliki posisi yang penting sebagai salah satu pemegang kekuatan ekonomi negara selain dari kalangan birokrat dan politisi. Pengusaha-pengusaha ini memiliki perusahaan-perusahaan raksasa (*Zaibatsu*) yang berpengaruh bagi perekonomian dan perpolitikan Jepang. *Zaibatsu* adalah sekelompok keluarga orang kaya yang sukses dalam perindustrian, perdagangan dan perniagaan besar.⁴⁵

Oleh karenanya, Soedjono merasa perlu untuk menjalin kedekatan dengan para pengusaha pemilik perusahaan-perusahaan tersebut, terutama untuk meyakinkan agar mereka mau menanamkan modalnya di Indonesia. Soedjono juga pernah mengungkapkan seberapa pentingnya keharusan menjalin kedekatan dengan para pengusaha/pebisnis:

Bila kita berurusan dengan Jepang, kita dihadapkan tidak saja dengan pemerintah tetapi juga dengan para menejer dari korporasi-korporasi raksasa yang sangat dominan dalam perumusan setiap langkah politik luar negeri. Mereka ini secara finansial lebih kuat dari pada Pemerintah Jepang sendiri. Maka mereka ini mampu melakukan tekanan pada pemerintah untuk membuat keputusan-keputusan kebijakan yang menguntungkan mereka.⁴⁶

Dalam tulisannya tersebut, berulang kali ia menekankan akan pentingnya menjalin kedekatan dengan kalangan pengusaha Jepang. Menurut penuturannya dalam tulisan tersebut, perusahaan-perusahaan raksasa tersebut ikut andil dalam penentuan kebijakan luar negeri Jepang. Ia juga menambahkan:

Dalam hubungan ekonomi dengan Jepang, satu faktor yang harus diperhitungkan adalah peranan lembaga-lembaga yang mengarahkan bantuan luar negeri Jepang. Politik luar negeri Jepang sangat dipengaruhi oleh menejer-menejer perusahaan raksasa, karena hubungan luar negeri Jepang hampir seluruhnya diwarani oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan perdagangan.⁴⁷

Dari usaha Soedjono dalam menjalin kedekatan dengan kalangan pengusaha Jepang dalam konteks kenegaraan, tak dapat dipungkiri bahwa kemudian hubungan tersebut berlanjut pada hubungan yang lebih personal. Tidak hanya dengan kalangan pengusaha, hubungan personal itu pun terjalin dengan

⁴⁵ *Zaibatsu* Jepang sebelum PD II terdiri dari perusahaan Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo dan Yasuda. *Zaibatsu* ini menguasai lebih dari 2/3 perekonomian Jepang. Kelas *Zaibatsu* bergabung dengan kelas Samurai dan Bangsawan. Jadi *Zaibatsu* ini benar-benar merupakan suatu kelompok "Feodal-Military-Industrial Complex". Jika sebelum PD II, perekonomian Jepang dikuasai oleh *Zaibatsu*, maka setelah PD II perekonomian Jepang dikuasai oleh *neo-Zaibatsu* yang terdiri dari korporasi monopoli, seperti Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itoh, Sumitomo dan Nisso-Iwai. Dan kelompok *neo-Zaibatsu* ini juga menguasai lebih dari 2/3 perekonomian nasional Jepang pada masanya. Testamen Tanaka & Neo-Zaibatsu, *Tempo* (23 Februari 1974).

⁴⁶ Soedjono Hoemardani, *Op Cit*, hal. 565.

⁴⁷ Soedjono Hoemardani, *Ibid*, hal. 563.

kalangan birokrat dan politisi. Ia mengenal secara personal Perdana Menteri Sato hingga Perdana Menteri Nakasone.⁴⁸ Pada setiap kunjungannya ke Jepang, ia selalu dijamu di luar acara resmi oleh tokoh-tokoh pimpinan Jepang dari kalangan pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Soedjono sendiri dalam setiap kunjungannya ke Jepang selalu melakukan kunjungan pada kerabat dan koleganya di Jepang, baik secara resmi maupun khususnya secara informal. Bahkan karena memang sudah dekat, Soedjono juga sering menjamu tamunya dari Jepang secara pribadi ketika sedang berkunjung ke Indonesia.⁴⁹

III.3. Soedjono Hoemardani dan Peristiwa Malari

Hubungan Indonesia dengan Jepang semakin lama semakin erat. Nama Soedjono Hoemardani pun semakin dikenal sebagai salah satu dari *Japan Lobiists* yang paling berpengaruh dalam penjalinan hubungan tersebut. Dan seiring dengan semakin dikenalnya Soedjono yang membuat hubungan Indonesia dengan Jepang semakin erat, secara bersamaan semakin banyak bermunculan kritik atas ketidakpuasan terhadap situasi tersebut yang dianggap merugikan pengusaha nasional. Kritik-kritik tersebut terpusat di kalangan mahasiswa dan pers. Mereka mengkritik penguasaan modal Jepang yang semakin masif dalam ekonomi Indonesia. Tak dapat dipungkiri, Soedjono pun menjadi salah satu sasaran kritik mereka. Di akhir tahun 1973, kritik-kritik tersebut mulai memanas lewat unjuk rasa, terutama terjadi di kampus-kampus di Jakarta dan Bandung. Francois Raillon dalam bukunya yang berjudul *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974* menyebutkan bahwa sepanjang bulan November dan Desember 1973 unjuk rasa terhadap dominasi modal Jepang dan Aspri, terutama terhadap Soedjono yang dikenal sebagai dukun lobi Jepang semakin meningkat.⁵⁰

Dan puncak dari unjuk rasa tersebut terjadi pada 15 Januari 1974 ketika perdana menteri Kakui Tanaka melakukan kunjungannya ke Indonesia.⁵¹ Unjuk

⁴⁸ Sato Eisaku memangku jabatan perdana menteri Jepang pada November 1964-Juli 1972. Di masa kepemimpinan Sato Eisaku inilah Soedjono Hoemardani mulai berkiprah menjalankan perannya sebagai pelobi. Sedangkan Yasuhiro Nakasone memangku jabatan pada November 1982-Juni 1987. Di masa jabatan Nakasone inilah Soedjono meninggal dunia. Dan sampai dengan akhir hayatnya, ia masih berhubungan dengan para pejabat tinggi Jepang.

⁴⁹ Sofjan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, *Op Cit*, hal. 86.

⁵⁰ Francois Raillon, 1985, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

⁵¹ Agenda yang dibahas dalam kunjungan ini adalah mengenai persoalan minyak bumi yang menjadi topik pembicaraan utama, selain dari gas alam dan soal perkayuan. Pihak Jepang juga

rasa ini menyuarakan ketidakpuasan masyarakat luas terhadap pembangunan ekonomi yang dianggap berbelok jadi melayani kepentingan petinggi pemerintah dan partnernya (pengusaha Cina, terutama investor Jepang). Kerusuhan massa di pertengahan bulan Januari 1974 ini kemudian dikenal dengan sebutan “Peristiwa Malari”. Akronim dari Malapetaka 15 Januari, di tahun 1974.

Kerusuhan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah kombinasi berbagai persoalan, yakni persaingan antar-elite, ketidakpuasan pribumi kelas menengah terkait dominasi modal asing (terutama Jepang) dan etnis Cina, ambruknya industri-industri kecil dan menengah milik pribumi, serta protes akan munculnya oportuniste ekonomi dikalangan intelektual/figur-figur yang berpengaruh dalam pemerintahan.⁵² Sebenarnya penyebab dari kerusuhan ini memang kompleks, tidak hanya terkait sentimen terhadap modal Jepang yang membuat pengusaha nasional kelas menengah merasa dirugikan, namun juga ada pertentangan antar-elite dalam tubuh pemerintah Orde Baru kala itu. Menurut Raillon, antara tahun 1972-1973 terjadi perebutan pengaruh dalam tubuh pemerintah antara *kelompok Amerika* dengan *kelompok Jepang*. Dimana *kelompok Amerika* terdiri dari para teknokrat dan jenderal-jenderal tertentu. Salah satu jenderal tersebut adalah Jenderal Sumitro selaku Pangkopkamtib. Kelompok ini menghendaki revisi terhadap cara-cara pembangunan yang ditempuh pada masa itu. Sedangkan kelompok yang kedua adalah yang mendukung kelanjutan dari cara pembangunan yang dibiayai oleh bantuan luar negeri pada masa itu, terutama bantuan dari Jepang. Oleh karenanya disebut sebagai *kelompok Jepang*. Kelompok ini dipimpin oleh para Aspri yang salah satunya adalah Ali Murtopo dan Soedjono.⁵³

Tidak hanya di Indonesia, bahkan pertentangan antara kelompok yang pro-Amerika dan pro-Jepang juga terasa di kawasan Asia-Pasifik. Pada umumnya mereka lebih menginginkan kehadiran Amerika dibanding Jepang. Padahal pada dasarnya, kebijakan Jepang pada masa itu mengekor pada politik luar negeri Amerika. Bahkan Amerika dengan sengaja mendorong Jepang untuk memainkan

diisukan membicarakan kerja sama kebudayaan. Dimana akan diadakan pembangunan Pusat kebudayaan Jepang di Jakarta. Dan pihak Indonesia diisukan mengajukan gagasan Ali Murtopo tentang kerja sama Asia Pasifik dengan Sidney, dimana Jakarta dan Tokio sebagai porosnya. Lihat Menyambut Sang Tamu, *Tempo* (19 Januari 1974).

⁵²Syamsul Hadi, 2005, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*, Jakarta: Japan Foundation, hal. 173.

⁵³ Francois Raillon, *Op Cit*, hal.84-86.

peranan ekonomi-politik yang lebih aktif dalam berbagai bentuk kerjasama regional di Asia-Pasifik. Namun, dikarenakan alasan historis dan meningkatnya dominasi ekonomi Jepang di awal tahun 1970an ini, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik sendiri umumnya lebih mempertahankan kehadiran Amerika daripada membiarkan Jepang memegang peranan kunci di wilayah ini. Jepang pun sadar bahwa negara-negara di kawasan Asia-Pasifik lebih merasa terjamin oleh kehadiran Amerika.⁵⁴ Oleh karenanya, Tanaka sebagai perdana menteri Jepang kala itu merasa cemas akan kian memanasnya aksi unjuk rasa terhadap dominasi ekonomi Jepang yang terjadi di beberapa negara di kawasan tersebut, seperti yang terjadi di Indonesia dan Thailand.

Dalam unjuk rasa di pertengahan bulan Januari 1974 ini, massa meminta agar Aspri dibubarkan. Berbagai poster anti Aspri seperti "Bubarkan Aspri", "Aspri singkatan Anak Kesayangan Presiden", "Soedjono dalang makelar Jepang" dan "Ali Moertopo calo politik" terpampang di mana-mana.⁵⁵ Bahkan massa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Golkar di Jakarta dan secara langsung menghujat nama Soedjono.⁵⁶ Sebagai simbolisasi kemarahan massa, gambar dan boneka Soedjono, Ali Murtopo, dan Tanaka diarak dan dibakar.⁵⁷ Bahkan massa menyindir Aspri dan Tanaka dengan syair ala lagu betawi.

Tanaka, e-e-e- Tanaka... Kenape ente diem-diem aje... Mangkanya aye diem-diem aje...
Kerna aye punya Aspri... Aspri, e-e--e Aspri... Kenape ente tenang-tenang aje...
Mangkanye aye tenang-tenang aje... Kerna aye punya komisi.⁵⁸

Sedangkan simbolisasi terhadap penolakan dominasi modal Jepang, massa membakar mobil buatan Jepang seperti Mazda, Honda, Daihatzu dan Corrola, juga merusak showroom perusahaan Toyota Astra Motor.⁵⁹ Dengan masuknya modal Jepang secara besar-besaran memberikan peluang bisnis baru yang luas bagi kalangan militer yang dekat dengan birokrat dan sipil (etnis Cina). Sedangkan di sisi lain, hal ini justru mengancam posisi pengusaha nasional yang serba kekurangan modal maupun koneksi. Banyak perusahaan milik pribumi, terutama yang bergerak di bidang pertekstilan, terdesak oleh investor Jepang

⁵⁴ Jepang dan Amerika di Asia-Pasifik, *Tempo* (19 Januari 1974).

⁵⁵ Malari di Mata Soemitro, *Tempo* (7 Mei 1994).

⁵⁶ Ayo Bermain dengan Jepang, *Tempo*, 19 Januari 1974.

⁵⁷ Francois Raillon, *Op Cit* dan CSIS, *Op Cit*, hal.89.

⁵⁸ Katakanlah dengan Senyum, *Tempo* (19 Januari 1974).

⁵⁹ Musibah bagi Golongan Menengah &....., *Tempo* (26 Januari 1974).

hingga terpaksa gulung tikar. Sementara buruhnya yang kehilangan pekerjaan di pabrik padat karya sebelumnya, tidak terserap di pabrik baru yang padat modal.⁶⁰ Oleh karenanya, tidak heran jika kerusuhan ini direpresentasikan sebagai kebencian mereka terhadap dominasi modal Jepang dan etnis Cina lokal.

Selain itu, ada juga faktor tekanan psikologis masyarakat akibat dari tindakan semena-mena dari orang-orang Jepang yang membuat sebagian masyarakat Indonesia membenci pihak Jepang. Misalnya saja, orang Jepang jika memberikan perintah mengacungkan telunjuk kirinya atau member isyarat dengan kaki, ada juga laporan yang menyatakan bahwa teknisi Indonesia yang bekerja di perusahaan patungan Jepang dibenturkan kepalanya ke besi.⁶¹ Kasus lainnya adalah peristiwa Sekolah Jepang yang menghina orang Indonesia, ada juga kasus pemecatan sewenang-wenang tanpa tunjangan 17 karyawan dari 11 perusahaan Jepang pada akhir tahun 1973.⁶² Perasaan tertindas dan anggapan bahwa Jepang adalah "*Economic Animal*" ini, juga menjadi salah satu latar belakang pemicu Peristiwa Malari.

Kemarahan masyarakat terhadap penguasaan modal Jepang dalam sektor ekonomi dan sikap perusahaan Jepang yang sewenang-wenang ini, sangat wajar jika kemudian berimbas pada kemarahan masyarakat terhadap Soedjono. Ia menjadi salah satu pelatuk kemarahan masyarakat dalam peristiwa ini. Karena berkat Soedjonolah pengusaha Jepang bisa dengan mudah meluaskan bisnisnya di Indonesia. Pengusaha Jepang yang berkunjung ke Indonesia untuk melihat peluang membuka usahanya, biasanya menemui Soedjono. Dan Soedjonolah yang membantu mereka memberikan informasi, saran, dan kolega bisnis.

Hal ini membuat pengusaha Jepang dengan mudah bisa membuka usahanya di Indonesia. Padahal tidak banyak orang Jepang yang mengenal Indonesia. Seorang professor Jepang dari Universitas Kyoto, Toru Yano, yang pada saat itu sekaligus menjabat sebagai penasehat Departemen Luar Negeri Jepang mengatakan: "Hanya sejumlah kecil orang tahu tentang Indonesia di Jepang, dan orang itulah yang memainkan hubungan kedua negara melalui sejumlah kecil orang penting di Jakarta", demikian professor tersebut

⁶⁰ Syamsul Hadi, *Op Cit*, hal. 172-174.

⁶¹ Jepun yang Buruk, *Tempo* (30 Oktober 1971).

⁶² Ayo Bermain dengan Jepang, *Tempo* (19 Januari 1974).

memaparkan.⁶³ Karena mendapat akses yang mudah itulah para pengusaha Jepang dapat dengan nyaman menjalankan bisnisnya.

Bahkan dalam sebuah wawancara, Soedjono menuturkan sendiri bahwa ia memang membantu para pengusaha Jepang yang bermaksud membuka bisnisnya.

Segala macam pengusaha datang datang untuk bertemu dengan saya, bukan hanya yang dari Jepang..... Tentu saja banyak orang yang datang ke sini berasal dari Jepang karena hubungan kami baik..... Biasanya mereka sudah tahu siapa calon mitranya. Tetapi kadang-kadang kami memberitahukan kalau mitranya baik atau jelek, atau memperkenalkan mitra yang baik. Keadaan birokrasi kami tidak begitu baik. Kadang-kadang memakan waktu lama untuk mendapatkan izin dari berbagai badan pemerintah. Jadi kami mencoba melancarkan jalannya, mempercepatnya.⁶⁴

Soedjono memang sangat mendukung kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan-perusahaan asing milik Jepang yang beroperasi di Indonesia (*joint venture*). Oleh karenanya ia mempermudah urusan mereka dalam membuka bisnisnya dan menggalang kerjasama dengan perusahaan nasional. Tak jarang juga ia memperkenalkan secara langsung mitra usaha (pribumi) kepada pengusaha Jepang. Ia menganggap usaha seperti ini penting karena menurutnya jika Indonesia ingin berhubungan baik dengan Jepang, hanya dengan menjalin hubungan dengan pemerintah Jepang saja tidak cukup. Ia menilai bahwa kalangan industri dan pemilik modal juga harus diperhatikan. Mengingat bahwa mereka juga ikut berperan dalam politik luar negeri Jepang. Ia pernah menulis:

Di sini kita dihadapkan lagi dengan tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh industri-industri Jepang di luar Jepang. Mereka secara langsung terlibat dengan “induk” mereka di Jepang dalam perumusan politik luar negeri Jepang. Industri-industri Jepang di luar Jepang berangsur-angsur akan menguasai keputusan-keputusan politik luar negeri Jepang dan keputusan-keputusan ini akan didasarkan semata-mata atas pertimbangan-pertimbangan ekonomi sembari melibatkan Pemerintah Jepang dalam menyediakan keamanan politik. ...⁶⁵

Dalam tulisannya ini, Soedjono menyampaikan persepsi akan perlunya menjalin hubungan dengan anak-anak perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung anak-anak perusahaan tersebut memegang andil terhadap arah politik luar negeri Jepang. Dimana anak-anak perusahaan tersebut menginduk ke perusahaan yang berkantor pusat di Jepang. Sementara perusahaan-perusahaan itu juga memiliki suara yang besar dalam pemerintahan.

⁶³ Menyambut Sang Tamu, *Tempo* (19 Januari 1974).

⁶⁴ Michael Sean Malley, *Op Cit*, hal. 118 dikutip dari Soedjono Hoemardani, wawancara dengan Franklin B. Weinstein (26 Februari 1973).

⁶⁵ Soedjono Hoemardani, *Op Cit*, hal. 566.

Atas dasar ini, Soedjono menganggap perlu untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Ia menganggap bahwa ini merupakan bagian dari skenario penjalinan hubungan diplomasi dengan Jepang. Pendekatan terhadap Pemerintah Jepang lewat anak-anak perusahaannya yang ada di Indonesia. Selain atas dasar itu, Soedjono juga menilai bahwa pengusaha nasional tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha yang stabil. Jepang-lah yang memiliki modal untuk membuat usaha-usaha kaum pribumi tersebut tetap berjalan. Oleh karenanya menurut Soedjono sudah sewajarnya para pengusaha pribumi memberikan tempat bagi para pengusaha Jepang untuk ikut mengambil peran dalam usaha-usaha mereka. Untuk pertanyaan mengapa Soedjono memilih Jepang dan bukan negara lain. Hal ini sudah bisa terjawab dengan melihat kedekatan hubungan Soedjono dengan Pemerintah Jepang. Untuk masalah keterbukaannya terhadap modal Jepang ini, Soedjono sudah sering mengutarakannya lewat beberapa media massa. Salah satunya adalah keterangannya dalam majalah *Ekspres*.

Kita memberikan kesempatan bagi semuanya jang mau turut membangun. Mereka jang punja rentjana dan konsep. Tidak pandang bulu apakah ia pribumi atau bukan. Semua modal harus dimanfaatkan dari mana datangjapun.....⁶⁶

Selain dalam majalah *Ekspres*, Soedjono juga pernah memberi keterangan dalam *Tempo* mengenai pandangan keterbukannya terhadap modal Jepang.

Tjoba toh, ada orang Indonesia jang sama sekali tidak punja kapital. Tapi ja ada sadja pengusaha Djepang jang memindjamkan tanpa rente. Maksudnja supaja pengusaha Indonesia bisa ikut dalam usaha bersama. Lihat kalau 10% sadja dari kapital harus disetor orang Indonesia tidak mampu, bagaimana bisa menjalahkan kalau Djepang pegang monopoli. Itu sebabnja banjak pengusaha Indonesia jang andilnja kini masih dalam taraf minoritas.⁶⁷

Demikianlah Soedjono memandang modal Jepang dan anak-anak perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Melihat dari berbagai keterangannya di atas, Soedjono memang memandang ini positif. Namun tak dapat dipungkiri bahwa cara pandang yang demikian bisa membuat sebagian kalangan, terutama kalangan pengusaha nasional, memandang Soedjono negatif. Dan tidak heran jika pada Peristiwa Malari ini Soedjono menjadi sasaran kemarahan rakyat karena dianggap sebagai kaki tangan Jepang dan tidak memihak pada rakyat. Melihat dari

⁶⁶ Walaupun Tjuma Sandalan, Semua Pintu Terbuka Baginja, *Ekspres* (10 Mei 1971).

⁶⁷ Soedjono Hoemardani tentang Orang Djepang, *Tempo* (22 Januari 1972).

kaca mata ia sebagai pelobi Jepang, ia memang beranggapan bahwa semua itu adalah bagian dari cara berdiplomasi dengan Jepang. Menurutnya berdiplomasi dengan Jepang tidak bisa dilakukan lewat cara-cara konvensional yang hanya dilakukan lewat pertemuan kenegaraan, pertukaran kebudayaan, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Menurutnya berdiplomasi dengan Jepang harus dilakukan dengan cara yang komprehensif. Tentang bagaimana cara berdiplomasi dengan Jepang yang komprehensif tersebut, Soedjono memaparkannya sebagai berikut:

Jelas bahwa diplomasi yang konvensional tidak akan mampu menjawab tantangan-tantangan yang timbul dalam hubungan antara Jepang dan Indonesia. Indonesia akan secara langsung merasakan akibat-akibat perkembangan dan tingkah laku Jepang meskipun ia tidak terlibat didalamnya. Satu-satunya jalan keluar adalah suatu diplomasi yang lebih luas dalam substansi dan saluran-saluran oleh karena kita berurusan tidak hanya dengan Pemerintah Jepang tetapi juga dengan industri-industri Jepang di luar Jepang. Maka diplomasi kita harus melibatkan sektor usaha dan lembaga-lembaga penelitian oleh karena dalam diplomasi masa kini partisipasi lembaga-lembaga penelitian tidak lagi merupakan sesuatu hal yang baru. Agar dapat melibatkan sektor usaha dalam diplomasi, kita harus mempersiapkan lembaga-lembaga yang dapat melakukan dialog dengan industri-industri Jepang.⁶⁸

Oleh karenanya atas dasar pemikiran tersebut, sebagai wadah dari cara berdiplomasi yang tidak konvensional, dimulai dari tahun 1973 diselenggarakanlah dialog dengan pihak Jepang dalam bentuk Konferensi Indonesia-Jepang yang diadakan secara berkala oleh CSIS (*Center for Strategic and Internasional Studies*). Dialog ini dikenal juga dengan sebutan Japan-Indonesia Colloquium, dimana dalam dialog ini dihadirkan para cendekiawan dan ilmuwan, pejabat pemerintah, para pengusaha, banker, mahasiswa, pengajar, budayawan, dan lain-lain. Dalam dialog tersebut dibahas persoalan-persoalan menyangkut kepentingan hubungan kedua negara. Hasil dari dialog tersebut diupayakan untuk membantu pemerintah Indonesia maupun Jepang dalam meningkatkan kerjasama dan hubungan antara kedua belah pihak. Dalam dialog ini, Soedjono hampir selalu bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia yang membuka dan menutup konferensi bilateral tersebut.⁶⁹

Konferensi Indonesia-Jepang yang pertama diadakan pada bulan Desember 1973 di Gedung CSIS, Tanah Abang III/27. Dalam konferensi yang

⁶⁸ Soedjono Hoemardani, *Op Cit*, hal. 566.

⁶⁹ Sofjan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, *Op Cit*, hal.88.

pertama ini, Soedjono pun menjadi Ketua Delegasi Indonesia, dan menyampaikan pidato pembukaan konferensi tersebut.

Sejauh menyangkut Indonesia, pemilihan waktu (untuk konferensi ini) tepat, kalau diperhatikan bahwa masyarakat sebenarnya terlibat dalam diskusi terbuka tentang investasi asing, termasuk yang dari Jepang, dalam konteks strategi pembangunan Indonesia yang masih mencari keseimbangan.⁷⁰

Soedjono dalam pidatonya menyinggung “pemilihan waktu (untuk konferensi ini) tepat”, hal ini dimaksudkan bahwa konferensi tersebut sebenarnya diadakan untuk meredam aspirasi anti-Jepang dan anti-Soedjono yang kala itu sedang memanas hingga kemudian berujung pada Peristiwa Malari.

III.4. Peran Soedjono Hoemardani dalam Hubungan Indonesia-Jepang Pasca Peristiwa Malari

Sepanjang periode 1973 hingga awal 1974 merupakan masa krisis dari hubungan Indonesia dengan Jepang. Kedekatan Pemerintah Orde Baru dengan Jepang ternyata menjadi bencana di masa awal pemerintahannya. Hingga memunculkan protes keras dari masyarakat yang berujung pada kerusuhan di pertengahan Januari 1974. Untuk meredam kerusuhan tersebut, Soeharto mengadakan dialog dengan para pimpinan mahasiswa tiga hari setelahnya, yakni pada tanggal 18 Januari. Meski ini merupakan dialog terbuka, namun para mahasiswa merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban dalam dialog tersebut. Salah satunya ketika mahasiswa bertanya “Mengapa saluran-saluran resmi penanaman modal asing diabaikan, tetapi disalurkan melalui Soedjono?” dan “Apa benar Ali Murtopo calo politik?”. Soeharto hanya menjawab “Semua tanggung jawab saya. Dan semua yang dilakukan Aspri adalah sepengetahuan saya”. Bahkan dalam dialog tersebut, Soeharto lebih banyak menjawab dengan senyuman dan anggukan.⁷¹

Tidak hanya Soeharto, perdana menteri Jepang, Tanaka, juga ternyata mempunyai niat baik untuk memperbaiki sikapnya setelah melihat kecaman-kecaman keras yang ia terima selama penghujung 1973. Dalam kunjungan Tanaka ke Indonesia pada pertengahan Januari 1974, sebenarnya terdengar isu bahwa Tanaka datang dengan "angin baru". Hal ini berarti bahwa Jepang berniat untuk

⁷⁰ Soedjono Hoemardani, 1974 “To Promote Good Relations Between the Republics of Indonesia and Japan”, dalam *Japanese-Indonesian Relations in the Seventies*, Jakarta: CSIS, hal. 10.

⁷¹ Katakanlah dengan Senyum, *Tempo* (19 Januari 1974).

melakukan perbaikan sikap yang selama ini banyak menjadi bahan kecaman. Namun isu ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena pihak Jepang tertutup untuk memberikan informasi kepada publik. Ketika berjumpa dengan pers sebelum kepulangan Tanaka ke Tokyo, ia juga hanya memberikan sedikit waktu untuk berdialog.⁷²

Dan dalam menanggapi kecaman tentang keberadaan Aspri yang ditentang oleh masyarakat, Soeharto akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa semenjak 18 Januari, ia meniadakan Aspri. Saat itu Soeharto memandang bahwa jabatan Aspri sudah tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, para Aspri dikembalikan lagi ke jabatan-jabatan mereka semasa itu. Soedjono kembali ke jabatannya semula sebagai anggota DPR/MPR, sedangkan Ali Murtopo berkedudukan sebagai bagian dari Bakin (Badan Koordinasi Intelejen Negara) dan Surjo menduduki jabatan sebagai pimpinan Hotel Indonesia. Keputusan 18 Januari tersebut tidak hanya menyangkut nasib Aspri, namun juga nasib Jenderal Soemitro, dimana ia tidak lagi menjabat Pangkopkamtib karena jabatan tersebut diambilalih oleh Soeharto. Sehingga ia hanya memangku jabatan sebagai Wakil Panglima ABRI.⁷³

Dan bagaimana tanggapan Jenderal Soemitro mengenai pembubaran Aspri? Ia sendiri mengatakan bahwa dengan dibubarkannya Aspri, maka posisi Soedjono dan Ali Murtopo tak lagi berhubungan langsung dengan Soeharto.⁷⁴ Pasca Peristiwa Malari sosok dan peran Soedjono kemudian kurang dikenal dalam pemerintahan. Sehingga agak sulit untuk menemukan data-data mengenai peran Soedjono di kancah pemerintahan setelah Peristiwa Malari ini. Namun diasumsikan Soedjono memainkan peranannya di belakang panggung perpolitikan Orde Baru setelah itu.

Mengapa perannya dikatakan di belakang panggung? Karena peranan Soedjono dalam pemerintahan Orde Baru pasca Peristiwa Malari ini tidak terlihat dengan jelas di mata masyarakat. Namun sebenarnya Soedjono masih memainkan peranannya dalam pemerintahan. Bahkan hubungan Soedjono dengan Soeharto pun masih dekat secara personal. Hal ini bisa dilihat dengan diangkatnya Soedjono sebagai Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, tak lama setelah Aspri

⁷² Menyambut Kedatangan Tanaka, *Tempo* (19 Januari 1974).

⁷³ Presiden adalah Pangkopkamtib... Presiden adalah Pangkopkamtib..., *Tempo* (2 Februari 1974).

⁷⁴ Malari di Mata Soemitro, *Tempo* (7 Mei 1994).

dibubarkan.⁷⁵ Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional merupakan suatu badan yang membantu Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan dan memelihara stabilitas ekonomi.⁷⁶ Dengan ditunjuknya Soedjono sebagai salah satu anggota dewan, ini menjadi jalan masuk bagi Soedjono untuk kembali ke kancah perpolitikan Orde Baru.

Dan di pertengahan tahun 1974, Soedjono ditunjuk oleh Soeharto sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan. Pada tanggal 18 Juli 1974, Soeharto mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) No. 102/M/1974 tentang pengangkatan empat orang Inspektur Jenderal Pembangunan, yaitu E. Soekasah Somawidjaja, Marsekal Madya TNI Sutopo, Mayor Jenderal TNI Soedjono Hoemardani, dan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) dr. Sudjono. Kepres tersebut merupakan pelengkap dari Kepres No. 25/1974 tentang pembentukan Inspektur Jenderal Proyek-proyek Pembangunan yang dikeluarkan pada bulan April 1974.⁷⁷ Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang) ini merupakan staf khusus kepresidenan yang bertugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dalam rangka proyek sektoral, proyek Inpres, proyek bantuan desa dan proyek daerah. Jadi tugas pokok dari badan ini adalah untuk pengawasan, seperti yang disampaikan Soeharto dalam upacara pelantikan para Irjenbang:

Di bidang perencanaan dan pelaksanaan selama Repelita I, kita sudah makin kaya dengan pengalaman, akan tetapi di bidang pengawasan masih banyak yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan..... Irjenbang sebagai “mata dan telinga” bukanlah badan pemerintahan yang baru.⁷⁸

Badan ini langsung bertanggung jawab kepada presiden dan menerima perintah langsung dari presiden atau wakil presiden. Dari keempat Irjenbang ini, Soedjono ditunjuk sebagai Irjenbang Proyek-proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota Madya dan Inpres Bantuan Pembangunan Desa.

Meski Soedjono bisa kembali ke panggung perpolitikan Orde Baru, namun nama dan perannya tidak terlihat nyata seperti ketika ia menduduki posisi Aspri. Hal yang masih dapat terlihat adalah bahwa ia tetap ada dalam struktur

⁷⁵ Michael Sean Malley, *Op Cit*, hal. 11 dikutip dari Eileen Tang dan Tong Mun Cheong, 1975, “Indonesia in Focus” dalam *Southeast Asian Affairs 1975*, Singapore: ISEAS, hal. 51.

⁷⁶ Kepres RI No.18 Tahun 1973. 27 April 2012. <http://www.sipruu.ditjenpum.go.id>.

⁷⁷ Presiden Angkat 4 orang Irjen Pembangunan, *Suara Karya* (19 Juli 1974).

⁷⁸ Presiden lantik 4 orang Irjenbang: Administrasi yang Tak Beres Menghambat Pembangunan, *Suara Karya* (24 Juli 1974).

Pemerintahan Orde Baru. Hanya saja pasca Malari ini, ia bermain di belakang panggung. Dan bagaimana hubungan Soedjono dengan Pemerintah Jepang? Soedjono masih tetap menjalin hubungan dengan Pemerintah Jepang, baik secara personal maupun dalam rangka membawa misi kenegaraan. Hanya saja hubungannya dengan Pemerintah Jepang tidak seintensif seperti ketika ia menjabat sebagai Aspri. Sehingga peran Soedjono dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang tidak lagi signifikan. Namun dalam beberapa kebijakan pemerintah yang masih ada kaitannya dengan Jepang, Soedjono seringkali dilibatkan.

Dalam rangka pembentukan Komite Indonesia-Jepang pada Agustus 1974, Soedjono yang saat itu berkedudukan sebagai Irjenbang menghadiri peresmian pembentukan organisasi ini. Komite yang terdiri dari 13 orang pihak Indonesia dan 12 orang pihak Jepang ini merupakan organisasi yang bergerak di bawah komando Kadin (Kamar Dagang Indonesia) yang dibentuk untuk membina hubungan baik antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Jepang.⁷⁹ Ini merupakan suatu upaya Pemerintah untuk membina kembali hubungan dengan Pemerintah Jepang atas dasar saling pengertian pasca Peristiwa Malari. Dalam program-program yang dicanangkan oleh organisasi ini, Soedjono sering kali juga memberikan dukungan.⁸⁰ Ini bisa membuktikan bahwa Soedjono masih dilibatkan dalam pengambilan sikap pemerintah yang ada kaitannya dengan kerjasama dengan Jepang.

Tidak hanya itu, Soedjono juga masih dipercaya oleh Pemerintah sebagai ikon dalam pembinaan hubungan dengan Jepang. Dalam rangka memenuhi undangan-undangan dari Pemerintah Jepang dan kunjungan resmi kenegaraan, Soedjono sering kali ditunjuk sebagai perwakilan resmi Pemerintah. Ketika Perdana Menteri Sato meninggal dunia, ia diutus sebagai perwakilan resmi dari Pemerintah Orde Baru untuk menghadiri pemakaman jenazah PM Sato. Tidak hanya ketika PM Sato meninggal dunia, juga ketika Takeo Kimura —Anggota Diet yang sekaligus berperan sebagai Ketua Komite Kerjasama Parlementer

⁷⁹ Komite Indonesia-Jepang dari Kadin Terbentuk, *Tempo* (7 Agustus 1974).

⁸⁰ Salah satunya adalah dukungan terhadap program yang mengusulkan pemberdayaan konsultan-konsultan Indonesia dalam proyek-proyek pembangunan Pemerintah. Lihat Konsultan-konsultan Indonesia Harapkan Kesempatan Kerja Lebih Luas, *Suara Karya* (14 Agustus 1974).

Indonesia-Jepang— meninggal dunia, ia juga diutus sebagai perwakilan resmi untuk menghadiri pemakamannya.⁸¹ Dalam hal ini berarti Soedjono masih dipercaya oleh Pemerintah Orde Baru untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Jepang atas nama Pemerintah Indonesia.

Dan meski kedudukan Soedjono saat itu bukanlah sebagai pejabat negara urusan luar negeri dan bukan juga sebagai asisten kepresidenan urusan ekonomi, ia beberapa kali ditunjuk Pemerintah untuk menemui para pejabat Jepang untuk persoalan kenegaraan. Pada masa awal Pemerintahan Zenko Suzuki, ia ditugaskan untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Dalam kunjungannya tersebut, di hadapan Perdana Menteri Jepang ia berusaha untuk menyampaikan tentang kesamaan persepsi pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang bahwa Indonesia dan Jepang memiliki konsep pembangunan yang sama dengan ditopang oleh tiga pilar sektor ekonomi (seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya mengenai pandangan Soedjono terhadap pembangunan Indonesia).⁸² Jadi pasca Peristiwa Malari ini, Soedjono masih memainkan peranannya dalam pembinaan hubungan dengan Pemerintah Jepang. Namun memang tak dapat dipungkiri bahwa peran Soedjono —baik dalam perpolitikan Orde Baru maupun perannya dalam hubungan Indonesia-Jepang— pasca Peristiwa Malari, jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum peristiwa ini terjadi.

Setelah Peristiwa Malari ini, Pemerintah Orde Baru meluncurkan beberapa kebijakan untuk mendukung industri kecil dan menengah yang dimiliki pengusaha nasional dengan meminta investor asing menggandeng partner pribumi dalam kegiatan bisnisnya (*joint venture*). Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang menghendaki pengusaha nasional untuk meningkatkan modalnya menjadi 51% dalam jangka waktu 10 tahun.⁸³ Sehingga perbandingan modal asing dan pengusaha nasional menjadi 49% berbanding 51% dalam perusahaan *joint venture* tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi pengusaha nasional dalam usaha patungan tersebut.

⁸¹ Sofjan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, *Op Cit*, hal.90.

⁸² Hadi Soesastro, *Op Cit*, hal. 39.

⁸³ Sebelumnya dalam peraturan perusahaan *joint venture* tersebut menghendaki pengusaha nasional untuk memiliki hak atas penyertaan saham sebesar 10-25%. Lihat Perbandingan Modal Asing-Nasional harus Jadi 49:51, *Suara karya* (23 September 1974).

Sebenarnya jangankan untuk menguasai saham sebesar 51%, untuk mencapai penguasaan saham 10-25% saja sudah dirasa berat bagi pengusaha menengah nasional. Jadi kebijakan baru pemerintah ini dirasa tidak efisien dalam menjembatani kesenjangan antara pengusaha menengah nasional dengan pengusaha Jepang yang memiliki modal besar. Sekalipun ada pengusaha nasional yang menyanggupi syarat tersebut, sebagian besar dari mereka adalah dari kalangan militer dan sanak keluarga birokrat yang berpengaruh. Jadi bisa dikatakan bahwa 28 dari 30 orang pribumi yang menjadi partner bisnis Jepang adalah orang-orang yang terseleksi karena kedekatan hubungan mereka dengan orang-orang penting di pemerintahan. Bahkan sebagian dari mereka, penyertaan sahamnya pun didanai oleh partner bisnis asing (Jepang).⁸⁴

Sementara pihak Tokyo sendiri dalam menanggapi kerusuhan anti-modal Jepang yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Januari 1974, Jepang menghentikan bantuan dan hibah pangan pada tahun 1974. Ini merupakan isyarat politik dari Jepang berkaitan dengan peristiwa tersebut.⁸⁵ Tidak hanya terkait bantuan pangan, ODA Jepang yang dari tahun 1966 hingga 1973 nominalnya terus meningkat, di tahun 1974 ini karena Peristiwa Malari, ODA Jepang mengalami penurunan (Lihat Lampiran 6).

Sikap Jepang sendiri menanggapi peraturan baru Pemerintah Indonesia mengenai *joint venture*, dimana investor asing harus melakukan *joint venture* dengan perusahaan nasional (baik swasta maupun pemerintah) dan adanya keharusan pengusaha nasional untuk meningkatkan modalnya menjadi 51% dalam waktu 10 tahun, membuat angka investasi Jepang di Indonesia menurun. Di tahun 1976 investasi Jepang menurun, dengan nominal yang hanya mencapai US\$ 54 juta.⁸⁶ Diasumsikan kebijakan tersebut mempengaruhi nilai investasi Jepang karena investor Jepang memiliki sikap yang loyal pada perusahaan induknya yang berada di Jepang. Mereka memiliki misi nasional yang sangat kuat dan cenderung untuk mengabdikan kepada induk perusahaannya di Jepang dari pada ke partner perusahaan *joint venture*-nya. Sedangkan kebijakan pemerintah yang

⁸⁴ Richard Robinson, 2000, *Buku Hitam Rezim Soeharto*, Jakarta: Totalitas, hal. 27 – 28.

⁸⁵ Evi Fitriani, 2000, “The Japanese Aspect of Japan’s ODA to Indonesia” dalam *Japan’s Official Development Assistance to Indonesia*, Jakarta: Center for Japanese Studies dan JICA.

⁸⁶ Mohammad Nu’man, 1992, *Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Menarik Investasi Jepang (1986-1989)*, Bandung: FISIP Unpad, hal.71.

mengharuskan pengusaha nasional untuk meningkatkan modalnya akan membuat pengusaha nasional tersebut dominan terhadap usaha patungan tersebut. Dengan kondisi yang demikian, Jepang lebih memilih untuk mengurangi nilai investasinya.

Di samping itu, di tahun 1970an ini, AS juga muncul sebagai salah satu negara penerima modal karena keterpurukan ekonominya. Jepang lebih tertarik menanamkan sahamnya di AS dibandingkan di Indonesia karena pihak AS memberikan suku bunga yang tinggi dan memberikan bentuk penyimpanan investasi yang lebih variatif dengan mengizinkan penanaman investasi dalam bentuk tabungan tidak hanya dalam bentuk saham. Sehingga AS menjadi alternatif lain bagi Jepang untuk menanamkan investasinya di luar negeri.⁸⁷ Tidak hanya AS, Jepang juga semakin meningkatkan investasinya ke Arab Saudi dan negara-negara Amerika Latin, seperti Brazil. Sedangkan ekspornya, Jepang lebih memilih untuk memasuki pasar Amerika dan Eropa Barat.⁸⁸ Jadi pasca Malari, Jepang lebih banyak bermain dengan negara-negara di benua Amerika dan Eropa dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sedangkan Arab Saudi didekati untuk memperoleh pasokan minyak yang lebih besar.

Meskipun investasi Jepang di Indonesia menurun, namun Jepang tidak ingin kehilangan gigi taringnya untuk mendapatkan asupan minyak murah dari Indonesia. Oleh karena Jepang menjadikan bantuan ODA untuk Indonesia sebagai alat diplomasi untuk mendapatkan minyak murah. Bantuan ODA Jepang tetap berjalan untuk Indonesia. Meski di tahun 1974 bantuan ODA menurun, namun tahun 1975 hingga 1978 bantuan ODA Jepang meningkat kembali (Lihat Lampiran 6). Tidak hanya ODA, Jepang juga masih mempertahankan investasinya dalam proyek-proyek pengadaan energi. Kucuran modal Jepang yang dialokasikan untuk Proyek Asahan tetap berjalan. Sebenarnya dalam Proyek Asahan tersebut, bukan royek PLTA yang menjadi alasan kuat bagi Jepang untuk tetap melanjutkan proyek tersebut meski harus menelan biaya sebesar 131,7 milyar Yen. Tapi justru pabrik peleburan alumina menjadi aluminium batangan. Karena jika pabrik ini sudah berdiri, maka akan menjadi saingan berat bagi industri yang sejenis di

⁸⁷ Mohammad Nu'man, *Ibid*, hal. 72.

⁸⁸ Muka Baru Jepang? Sering-sering saja Mr. Goodwill, *Tempo* (20 Agustus 1977).

Australia.⁸⁹ Dan ini akan menghasilkan banyak keuntungan bagi Jepang. Selain dari Proyek Asahan, bantuan dari Jepang untuk proyek pengadaan energi juga tetap diberikan untuk Pertamina.

Kebutuhan Jepang akan sumber energi, menjadi hal penting yang mendasari Jepang untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Sangat mustahil bagi Jepang untuk tetap menjaga jarak dengan Indonesia sehubungan dengan embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab. Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, dianggap penting bagi Jepang sebagai pemasok minyak, gas, tambang mineral, dan kayu. Tidak hanya persoalan energi, Bahkan stabilitas politik Indonesia penting di mata Jepang. Karena Selat Malaka dan Selat Lombok menjadi jalur penting bagi Jepang untuk pengiriman minyak dari Timur Tengah. Sehingga jalur tersebut harus bebas dari intrik politik yang bisa menyebabkan gangguan keamanan di kawasan tersebut agar kepentingannya tidak terganggu.

Sikap anti-Jepang yang bermunculan di tahun 1973-1974 menjadi pukulan keras bagi Jepang dalam usahanya untuk menguasai perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Hingga pada akhirnya kondisi ini membuat karir Tanaka berada di ujung tombak. Selain kecaman dari luar, Tanaka juga dihadapkan dengan kecaman dari dalam negerinya sendiri. Krisis minyak, inflasi dan polusi yang menimbulkan kematian masal di negerinya menjadi batu sandungan bagi Tanaka.⁹⁰ Popularitas LDP pun makin merosot.⁹¹ Enam kursi walikota yang diduduki LDP jatuh ke tangan partai-partai oposisi yang mengisukan gerakan anti-Tanaka. Dari 252 kursi Parlemen yang diperebutkan, LDP hanya sanggup merebut 126 kursi (sebelumnya 134 kursi).⁹²

Meski beberapa kursi telah jatuh ke tangan partai oposisi, namun suara LDP masih tetap kuat untuk menempati posisi perdana menteri. Sebagai pengganti

⁸⁹ Jalan Pintas Asahan, *Tempo* (3 Agustus 1974).

⁹⁰ Gagasan Tanaka tentang rekonstruksi industri, membuat polusi di negara tersebut meningkat. Polusi tersebut mengakibatkan 279 petani mengidap penyakit dan 57 orang meninggal dunia akibat polusi air oleh bahan kimia buangan pabrik Chisso, 119 petani meninggal akibat polusi pabrik kimia Mitsui, di provinsi Royama ada 72 orang patah tulang akibat bahan kimia cadmium yang meracuni sungai Juntsu. Bahkan Tokyo sendiri pernah mendadak terserang awan gelap di udara cerah musim panas 18 Juli 1972. Lihat Menyambut Sang Tamu, *Tempo* (19 Januari 1974).

⁹¹ Lihat Jepang Menghadapi Pemilu, *Suara Karya* (27 November 1976) dan LDP Kecewakan Pemilih karena Skandal Penyuapan, *Suara Karya* (6 Desember 1976).

⁹² Erosi di Tengah Inflasi, *Tempo* (20 Juli 1974).

Tanaka, LDP mengusung Takeo Miki sebagai penggantinya di penghujung tahun 1974. Takeo Miki menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada masa pemerintahan PM Tanaka. Pada masa pemerintahan PM Tanaka, Miki sukses membawa misi Jepang untuk negara-negara Arab di penghujung tahun 1973 terkait kepentingan minyak negaranya.⁹³ LDP mengusung Miki karena figurinya lebih dipercaya rakyat Jepang, meski sebenarnya dukungan dari LDP sendiri terhadap Miki tidaklah besar, bahkan mayoritas suara menolaknya. Rakyat Jepang saat itu sedang mengalami krisis kepercayaan politik terhadap LDP dikarenakan korupsi yang semakin merajalela di tubuh partai dan pemerintahan yang dipimpinya. Oleh karena itu figur Miki yang dipercaya rakyat dianggap sebagai opsi terakhir untuk memenangkan pemilu dari partai oposisinya seperti Partai Demokrat Sosialis, Partai Komunis, dan partai lainnya.⁹⁴

Arah kebijakan pemerintahan Miki lebih menitikberatkan pada pembenahan ekonomi nasional Jepang yang merosot akibat krisis minyak yang membuat Jepang mengalami inflasi. Selain itu, ia juga memiliki agenda pembenahan negara dari skandal korupsi yang merajalela, salah satunya adalah skandal penyusunan Lockheed. Dimana skandal ini menimpa beberapa anggota LDP sebagai tersangka, termasuk mantan PM Jepang sebelumnya, Kakuei Tanaka.⁹⁵ Miki bertekad untuk menyapu kekotoran dalam politik Jepang kala itu. Oleh karenanya ia dijuluki *Mistah Krin* oleh masyarakat Jepang, yang memiliki arti "Orang yang Jujur".⁹⁶

Sementara kebijakan Pemerintah Miki menyangkut hubungan ekonomi dengan Indonesia, tidak ada hal yang signifikan/menonjol karena pemerintahannya lebih fokus pada masalah dalam negeri. Bahkan cenderung lebih mengabaikan diplomasinya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian Pemerintahannya masih tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya terhadap Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia dalam

⁹³ Sukses Miki dan Misi Tanaka, *Tempo* (12 Januari 1974).

⁹⁴ *Tempo* (20 Juli 1974), *Op Cit.*

⁹⁵ Tanaka dituduh melanggar peraturan devisa asing dengan menerima uang 500 Juta yen dari perusahaan kapal terbang AS, Lockheed. Uang itu disalurkan kepada mereka dari perusahaan Lockheed melalui perusahaan raksasa Marubeni, agen Lockheed di Jepang sewaktu Tanaka masih menjadi perdana menteri. Dalam pengusutan kasus Lockheed ini, tentu saja usaha Miki dihambat oleh para pembesar partainya sendiri. Bahkan mereka mencoba untuk menjatuhkannya dari kursi perdana menteri. Lihat Manusia Serakah, *Tempo* (4 September 1976).

⁹⁶ Tepuk Tangan untuk Mistah Krin, *Tempo* (7 Agustus 1976).

rangka pengadaan sumber energi. Hubungan Jepang terhadap Indonesia pada masa pemerintahannya sebatas pemanfaatan suplai minyak dan LNG dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia pun hanya sebatas memanfaatkan bantuan ODA Jepang dan pemasukan kas negara dari hasil ekspor minyak ke Jepang.⁹⁷ Pada masa Pemerintahannya, Miki memang mengabaikan diplomasi ke Asia Tenggara karena disibukkan dengan skandal Lockheed serta diplomasinya ke Eropa dan Amerika. Dimana pada masa Pemerintahannya, ia tidak pernah mengunjungi satu negara pun di kawasan Asia Tenggara.⁹⁸

Di penghujung tahun 1976 Takeo Miki lengser dari jabatan perdana menteri karena dianggap tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam membenahan ekonomi Jepang. Bahkan ia dituduh telah membuat ekonomi Jepang merosot oleh lawan politiknya yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai perdana menteri. Pada 24 Desember 1976, Takeo Fukuda menggantikan Takeo Miki.⁹⁹ Awal masa Pemerintahan Fukuda disibukkan dengan penciptaan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi nasional. Sementara politik luar negeri Pemerintahannya dianggap membawa angin baru dalam menciptakan hubungan diplomasi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Takeo Fukuda berusaha membawa nuansa baru terhadap iklim hubungan ekonomi Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia bermaksud untuk membina hubungan yang lebih bersifat "dari hati ke hati".¹⁰⁰ Di bulan Agustus 1977, Fukuda bertemu dengan lima kepala pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan maksud kedatangannya: "Saya ingin melihat Jepang sebagai teman sejati Asia Tenggara". Dalam pertempuan tersebut, kelima pemimpin negara tersebut juga meminta kepada Fukuda agar pemerintahannya bersedia untuk memberikan bantuan utang sebesar \$ 1 milyar untuk membangun lima proyek industri ASEAN.¹⁰¹ Dan Fukuda menyatakan bahwa ia dengan

⁹⁷ Misbach. 1985. *Hubungan Jepang-Indonesia pada masa Pemerintahan Takeo Fukuda*. Jember: FISIP Universitas Jember, hal. 20-21.

⁹⁸ PM Miki akan Kunjungi Negara-negara ASEAN, *Suara Karya* (30 November 1976).

⁹⁹ Fukuda setelah Kalah, *Tempo* (1 Januari 1977).

¹⁰⁰ Fukuda Diminta Terlalu Banyak?, *Tempo* (6 Agustus 1977).

¹⁰¹ Kelima proyek tersebut adalah pembangunan pabrik pupuk Urea di Malaysia dan Indonesia, mesin disel di Singapura, super fosfat di Pilipina dan soda ash di Muangthai. Sebenarnya pengajuan bantuan ini sudah dilakukan sebelumnya oleh delegasi 7 Menteri ASEAN yang

senang hati akan mempertimbangkannya. Hal ini membuat Jepang terasa lebih dekat di hati para pemimpin ASEAN tersebut.¹⁰²

Menanggapi soal permintaan dari para pemimpin ASEAN tersebut, Fukuda mengajukan satu persyaratan bahwa Jepang tidak akan memberikan bantuannya, jika proyek-proyek ASEAN tersebut tidak menjamin akan menguntungkannya. Selain membicarakan bantuan \$ 1 Milyar tersebut, dalam pertemuan tersebut Jepang juga menyatakan kesediaanya membuka pasar lebih luas bagi barang-barang impor dari ASEAN. Dan Jepang juga berniat untuk membantu kepentingan ASEAN dalam dialog Utara-Selatan, di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Fukuda juga menjamin bahwa bantuan bilateral Jepang dengan setiap negara ASEAN tidak akan berkurang sebagai akibat dari peningkatan kerjasama multilateralnya dengan ASEAN. Fukuda juga menyetujui agar kerjasama di bidang sosial-budaya ditingkatkan agar tercapai saling pengertian dan kepercayaan.¹⁰³

Gagasan Fukuda dalam menciptakan nuansa baru dalam berhubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara ini, kemudian dikenal dengan istilah “Doktrin Fukuda”. Doktrin ini merupakan suatu upaya untuk memperbaiki citra bangsa Jepang di mata negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Setelah sebelumnya Jepang memiliki citra yang negatif di kawasan Asia Tenggara, khususnya ketika Jepang dipimpin oleh Tanaka. Dan kemudian menjauh dari Asia Tenggara karena lebih memilih untuk bermain dengan negara-negara di Amerika dan Eropa. Namun di masa Pemerintahan Fukuda, Jepang kembali lagi ke Asia Tenggara. Mengapa Jepang kembali lagi ke Asia Tenggara? Menurut Radius Prawiro yang saat itu berkedudukan sebagai menteri perdagangan, kemungkinan akan hal itu banyak, namun pada umumnya disebabkan karena gagalnya politik AS di Vietnam yang membuat kawasan Indo Cina kemudian dikuasai oleh komunis. Dan ASEAN, di samping Korea Selatan dan Taiwan, dipandang sebagai benteng terakhir untuk membendung komunis. Jepang tidak ingin melihat Asia Tenggara menjadi tidak stabil.¹⁰⁴

langsung berkunjung ke Tokyo dengan meminta bantuan sebesar \$ 1,6 milyar. Namun akhirnya hanya disetujui \$ 1 milyar. Lihat *Tempo* (6 Agustus 1977), *Ibid.*

¹⁰² Mereka Memuji Fukuda, *Tempo* (13 Agustus 1977).

¹⁰³ *Tempo* (13 Agustus 1977), *Ibid.*

¹⁰⁴ Muka Baru Jepang? Sering-sering saja Mr. Goodwill, *Tempo* (20 Agustus 1977).

Kemudian bagaimana hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa Pemerintahan Fukuda ini? Sebetulnya Pemerintah Indonesia, sudah lama menaruh perhatian kepada Fukuda agar terpilih menjadi perdana menteri. Ketika Sato turun dari jabatannya, Indonesia berharap agar Fukuda terpilih menjadi penggantinya. Pada saat itu, Soeharto berkunjung ke Tokyo secara mendadak. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada Fukuda agar menjadi pengganti Sato dalam proses pemilihan umumnya selanjutnya. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa garis kebijakan Fukuda lebih dekat dengan garis kebijakan Eisaku Sato dibanding kandidat lainnya.¹⁰⁵ Pemerintah Orde Baru telah bersusah payah menjalin kedekatan dengan Pemerintah Sato. Jadi Pemerintah Orde Baru berharap agar kedekatan hubungan yang telah diupayakan tersebut tetap berlanjut, tidak putus hanya karena bergantinya tampuk kekuasaan. Dan dengan terpilihnya Fukuda sebagai puncak pimpinan tertinggi Jepang di tahun 1976, tentu hubungan Indonesia dengan Jepang menjadi semakin dekat dibanding pemerintahan Jepang sebelumnya. Apalagi Fukuda membawa nuansa baru yang lebih bersahabat.

Dan realisasi dari Doktrin Fukuda memang terbukti berdampak pada peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang lebih bersahabat atas dasar saling pengertian (*heart to heart*). Hubungan baik ini sudah mulai terasa sejak doktrin itu dicetuskan. Ketika Fukuda berkunjung ke Indonesia sepulang dari pertemuan dengan para pemimpin ASEAN, ia memberikan pinjaman kepada Indonesia sebanyak \$ 2 milyar. Sekaligus berinvestasi dengan nilai yang sama pula. Dan di luar pinjaman IGGI, Jepang juga sudah menyetujui memberikan pinjaman kepada Indonesia sebanyak 6.500 juta Yen (sekitar \$ 6 juta) untuk pembelian beras. Pemerintahnya juga sudah setuju untuk memberikan pinjaman \$ 4,5 juta untuk memperbaiki dan memperluas pengadaan pangan di Indonesia. Selain dari pinjaman-pinjaman, Jepang juga memberikan hadiah untuk membantu usaha pangan sebanyak 1.300 juta Yen (sekitar 5 5,75 juta); 240 juta Yen untuk pembelian fasilitas jaringan telekomunikasi dalam negeri; dan 600 juta Yen untuk mendirikan pusat penyelidikan penyakit hewan di Medan dan Tanjung Karang. Tidak hanya itu, pada saat kunjungan Fukuda tersebut pihak Indonesia menawarkan gagasan untuk membuat *Central Terminal Oil Station* (Pusat

¹⁰⁵ Indonesia Memilih Fukuda?, *Tempo* (20 Mei 1972).

Penyimpanan Minyak) di Selat Lombok.¹⁰⁶ Selama kunjungan tiga harinya ke Indonesia, Takeo Fukuda juga membuat acara untuk bertemu dengan kaum bisnis Jepang, yang umumnya berkantor di gedung Wisma Nusantara Jakarta.

Gagasan Fukuda dalam memandang ASEAN dengan cara pandang yang baru ini memang membuahkan hasil yang baik bagi peningkatan hubungan dengan Jepang. Pandangan Fukuda ini memiliki kesamaan dengan pandangan Soedjono yang sama-sama memandang Asia Tenggara sebagai basis yang tepat dalam peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Soedjono memandang bahwa hubungan antara Indonesia dengan Jepang haruslah dikaitkan dengan kepentingan kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Karena ASEAN menjadi fokus dan sokoguru politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Oleh sebab itu, nasib Indonesia sangat erat kaitannya dengan ASEAN.

Pada tingkat regional, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya perlu mengambil sikap bersama dalam diplomasi menghadapi Jepang. Sikap ini melibatkan perumusan tentang bagaimana Jepang dapat secara kreatif ikut bersama-sama memikul tanggung jawab atas keamanan kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Peranan Jepang yang kreatif adalah dalam membantu pembangunan negara-negara Asia Tenggara. Bersama-sama kita dapat meyakinkan Jepang bahwa meskipun rumusan itu juga dituntut oleh negara-negara berkembang yang lain di Amerika Latin, Afrika, dan lain-lain. Asia Tenggara dan kawasan Asia-Pasifik lebih penting bagi Jepang karena Jepang terletak di Asia dan hubungan Jepang dengan Asia tentu saja mempunyai ciri khusus.

Dengan sikap bersama, ASEAN dapat melakukan diplomasi yang ofensif terhadap Jepang, tetapi ini harus disertai dengan kesediaan negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara umumnya untuk mengakomodasi dan mengalihkan sifat agresif Jepang.¹⁰⁷

Dalam hal ini, Soedjono dan Fukuda sama-sama menganggap bahwa ASEAN penting bagi Indonesia dan Jepang, ataupun bagi hubungan bilateral kedua negara.

Selain memiliki pandangan yang sama, sosok Fukuda ini juga dikenal dekat dengan pribadi Soedjono. Pada waktu Fukuda diangkat menjadi menteri luar negeri, sebelum memangku jabatan sebagai perdana menteri, Soedjono diundang sebagai tamu resminya ke Jepang.¹⁰⁸ Pertemuan ini merupakan konsolidasi politik antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Soedjono dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Fukuda. Penjajakan nasib hubungan antara Jepang

¹⁰⁶ Sebenarnya gagasan ini pernah dibicarakan ketika Tanaka masih menjadi perdana menteri. Bagi Indonesia, hal ini dianggap penting karena dengan begitu tanker-tanker raksasa yang datang dari Timur Tengah bisa langsung diangkut ke Jepang lewat selat Lombok. Tidak perlu lagi mengalihkan muatan minyak ke tanker-tanker yang berukuran lebih kecil karena harus melewati Selat Malaka. Namun pada saat kunjungannya tersebut, Fukuda masih menanggukuhkan persoalan terminal ini. Lihat *Tempo* (20 Agustus 1977), *Op Cit*.

¹⁰⁷ Soedjono Hoemardani, *Op Cit*, hal. 566-567.

¹⁰⁸ Sofjan Wanandi dan J. Soedjati Djiwandono, *Op Cit*, hal. 86.

dengan Indonesia ketika Fukuda nantinya menduduki posisi perdana menteri. Bahkan sebelum Faksi Tanaka berusaha untuk menjalin kedekatan dengan *Indonesia Lobbyists* di awal-awal pemerintahan PM Tanaka, Faksi Fukuda telah lebih dulu memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Oleh karenanya tidak heran ketika Jepang hendak mengadakan pemilihan perdana menteri di tahun 1972, Indonesia lebih mendukung Fukuda dibanding calon dari LDP lainnya.

Terkait konsep pembangunan ekonomi yang tercipta atas keharmonisan hubungan antar elite pemerintahan seperti yang dipandang oleh Soedjono. Dimana di Jepang konsep seperti ini dikenal dengan sebutan *wa no seiji*. Sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menghendaki keharmonisan hubungan antara sektor negara, sektor masyarakat yang dihimpun lewat koperasi dan sektor swasta nasional, nampaknya gagal untuk diciptakan. Peristiwa Malari, dimana Soedjono dianggap sebagai salah satu penyulut kerusuhan tersebut menjadi bukti adanya kepincangan di salah satu sektor diantara ketiganya. Kerusuhan ini menggambarkan bahwa sektor masyarakat dan swasta nasional merasa tidak puas terhadap kebijakan yang diusahakan oleh sektor negara. Dalam hal ini kebijakan penanaman modal (khususnya modal Jepang) yang akhirnya berimbas pada kesenjangan ekonomi yang dialami sektor masyarakat dan swasta nasional.

Meskipun pandangannya ini gagal menciptakan stabilitas ekonomi, Soedjono tetap dianggap berjasa bagi Pemerintah Orde Baru karena peranannya dalam menjalin kedekatan hubungan dengan Pemerintah Jepang. Tidak hanya oleh pemerintah Orde Baru, Soedjono juga dianggap berjasa oleh Pemerintah Jepang dalam peninjauan hubungan Indonesia-Jepang ini. Tanggal 20 November 1983 merupakan hari istimewa bagi Soedjono karena di bulan tersebut ia menerima penghargaan Bintang Kelas I Harta Suci dari pemerintah Jepang, bersama dengan Widjojo Nitisastro. Ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi dari Kaisar Hirohito kepada orang non-Jepang. Penghargaan itu disampaikan oleh duta besar Jepang untuk Indonesia di kediamannya di Jakarta. Dalam sambutannya, Koordinator Bidang Politik dan Penerangan Kedutaan Besar Jepang, Yonabe menggambarkan tentang jasa mereka kepada Jepang.

Mereka telah memberikan sumbangan besar dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama di antara kedua negara..... Jenderal Soedjono yang membawa surat

kepercayaan dari Presiden Soeharto sewaktu pemerintahan PM Sato. Baru kemudian Prof. Widjojo datang membeberkan penjelasan teknis ekonomis.¹⁰⁹

Soedjono digambarkan sebagai pembuka jalan bagi hubungan Indonesia-Jepang. Ketika Soedjono ditanya apa rahasia dibalik kesuksesannya dalam membina hubungan dengan Jepang? Soedjono menjawab "Yang saya lakukan adalah pendekatan yang menyentuh hati orang Jepang, sebagai sama-sama orang Timur. Pada hakikatnya bukan penghargaan bagi diri pribadi saya, melainkan penghargaan kepada rakyat dan pemerintah Indonesia yang sedang membangun..... Saya hanyalah sekadar pemakai atau penyimpan dari tanda penghargaan itu".¹¹⁰

"Pendekatan yang menyentuh hati", itulah yang menjadi nilai positif dari keberhasilan lobi-lobi Soedjono dengan Pemerintah Jepang. Kepiawaiannya dalam berdiplomasi dengan nuansa yang menyentuh hati (personal) itu bisa menumbuhkan kepercayaan dari pihak Jepang yang notabene sulit untuk dapat mempercayai partnernya. Karakter dari budaya Jepang pada umumnya sulit untuk didekati. Mereka merasa sudah dekat jika satu sama lain telah saling mengenal dan mengerti. Namun jika hubungan kedekatan tersebut telah terjalin, maka dengan mudah hubungan tanpa jarak akan tercipta.¹¹¹ Inilah yang dilakukan Soedjono. Ia menjalin hubungan kedekatan hingga bisa meraih kepercayaan dari pihak Jepang. Sehingga dalam proses lobi-lobi dengan Jepang, ia mendapat banyak kemudahan dari keakrabannya dengan pihak Jepang.

Dalam kancah perpolitikan Orde Baru, sejak dari pertengahan tahun 1974 Soedjono tetap menduduki jabatannya sebagai Irjenbang, pun sampai dengan ia meninggal di usianya yang ke-65 tahun pada 12 Maret 1986 di Tokyo ketika ia berobat. Soedjono adalah orang yang sangat dekat dengan Soeharto. Bahkan di awal tahun 1980an, Soedjono dengan Soeharto menjalin saudara batin (konsep kepercayaan kejawen). Tidak hanya itu, Soedjono juga menjadi penasihat spiritual Soeharto kala itu.¹¹² Bukan hanya penasihat spiritual secara personal, namun juga sebagai penasihat spiritual dalam persoalan kenegaraan.

¹⁰⁹ Menerima Bintang Kelas I Harta Suci, *Tempo* (26 November 1983).

¹¹⁰ *Tempo* (26 November 1983), *Ibid.*

¹¹¹ Abdul Irsan, 2007, *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*, Jakarta: Grafindo, hal. 61.

¹¹² Kritis Pulung dan Ageman, *Tempo* (14 Januari 2008).

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melihat Jepang, Pemerintah Indonesia pada zaman Orde Baru memiliki cara pandang yang berbeda dengan zaman Orde Lama. Hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa Orde Baru dapat dikatakan lebih dekat dengan Pemerintahan Indonesia sebelumnya. Hal ini disebabkan berbagai faktor. Pada masa itu arah kebijakan luar negeri Indonesia lebih condong pada Blok Timur yang berpaham sosialis (konteks Perang Dingin). Dimana mereka memiliki kekhawatiran akan terjadinya penjajahan dalam bentuk baru, yakni neo-kolonialisme & imperialisme. Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Soekarno pun melakukan sikap yang sama, dimana hal ini dapat terlihat dari sikapnya dalam konfrontasi dengan Malaysia di tahun 1960an. Jepang yang sejak PD II menjadi sekutu AS dianggap membawa paham tersebut. Ditambah lagi dengan predikat Jepang yang sebelumnya juga pernah menjajah Indonesia di masa PD II.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, pembangunan ekonomi bukanlah menjadi agenda utama karena saat itu Soekarno berpandangan bahwa revolusi Indonesia belum selesai selama imperialisme dan feodalisme belum terhapuskan. Jadi selama dua fenomena ini belum diselesaikan, maka Indonesia belum siap untuk membangun. Namun bukan berarti Pemerintah Orde Lama tidak memiliki kebijakan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama dikenal dengan sebutan Ekonomi Terpimpin yang merupakan manifestasi dari Manipol-Usdek. Namun konsep ini tidak berhasil mengangkat ekonomi Indonesia dari keterpurukannya karena pada saat itu Pemerintah lebih sering mengalokasikan dana pembangunannya untuk Proyek-proyek Mercusuar. Dan dana pembangunan ekonomi sering kali dikorbankan untuk pembangunan proyek-proyek ini.

Berbeda dengan Pemerintahan setelahnya, zaman Orde Baru yang lebih mengedepankan aspek pembangunan ekonomi. Sehingga arah kebijakan dari pemerintah Orde Baru lebih banyak tentang upaya untuk mencari modal

pembangunan sebanyak-banyaknya. Dan jalan yang Pemerintah Orde Baru pilih adalah dengan membuka kran investasi bangsa asing dalam perekonomian Indonesia. Akhirnya perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru ini dibanjiri dengan asset-aset bangsa asing terutama dari negara-negara Blok Barat seperti Jepang, AS, Belanda dan Australia. Pemerintah Orde Baru ini lebih condong ke Blok Barat. Selain itu, para teknokrat ekonomi pada masa Orde Baru juga banyak yang memiliki *background* pendidikan Barat. Oleh karenanya tidak heran jika yang mendominasi investasi asing di Indonesia berasal dari Blok Barat, dimana Jepang mendapat peringkat pertama dalam nominal investasi asing di Indonesia.

Sedangkan Jepang sendiri pasca Pendudukan AS, memandang Asia tenggara (khususnya Indonesia) sebagai partner ekonomi penting bagi penjualan produk Jepang, investasi, dan perolehan sumber energi (minyak dan LNG) untuk ekonominya. Ditambah lagi dengan kondisi bahwa barang-barang manufaktur Jepang tidak dapat bersaing di pasaran Eropa, sehingga akhirnya Jepang lebih memandang Asia Tenggara. Selain itu, Jepang sebagai sekutu AS, didorong secara tidak langsung oleh AS untuk memasuki politik dan kehidupan ekonomi Asia Tenggara, sehubungan dengan pembendungan pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara. Karena politik luar negeri Jepang pasca Pendudukan AS mengekor pada perumusan organik politik luar negeri AS.

Dan jika membandingkan bagaimana hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Tentu hubungan bilateral tersebut lebih luas pada masa Orde Baru. Hubungan ekonomi Indonesia-Jepang pada masa Orde lama terbatas pada persoalan dana *Pampasan Perang*. Dana yang harus dikeluarkan Jepang sebagai ganti rugi kepada negara-negara yang pernah didudukinya semasa PD II. Dana Pampasan Perang yang disetujui untuk Indonesia senilai \$223,08 juta yang dibayarkan selama 12 tahun. Sedangkan pada masa Orde Baru hubungan ekonomi dengan Jepang lebih luas, menyangkut persoalan investasi Jepang, perusahaan patungan dengan pengusaha pribumi, hibah, pembangunan proyek-proyek, bantuan ekonomi seperti ODA dan bantuan pangan, serta penjualan minyak kepada Jepang.

Dalam persoalan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang ini, ada beberapa tokoh yang dianggap berperan dalam membidani hubungan tersebut.

Dimana salah satu yang paling berpengaruh adalah Soedjono Hoemardani. Mengapa ia bisa dipercaya oleh pemerintah Orde Baru dalam membidani hubungan tersebut? Banyak faktor yang mendukung hal ini. Selama karir militernya, Soedjono tidak pernah lepas dari kedudukannya sebagai pengatur ekonomi di markas-markas AD dimana ia bertugas, baik ketika ia berdinasi di Semarang, Bandung, maupun di Jakarta. Sehingga keahliannya dalam mengatur masalah yang berbau ekonomi/keuangan menjadi keahliannya diantara para perwira AD lainnya. Keahliannya ini ia peroleh dari didikan keluarganya yang memang adalah keluarga saudagar/pedagang. Selain dari pendidikan formal yang ia peroleh selama belajar di GHS —sekolah dagang pada masa Hindia Belanda— dan di Sekolah Keuangan Angkatan Darat Amerika, *Finance Officer Advance*, di Fort Benjamin Harrison pada tahun 1963.

Maka tidak heran jika kemudian Soedjono di percaya oleh Soeharto untuk membina hubungan ekonomi dengan Jepang. Selain itu, Soedjono juga sudah menjalin kedekatan hubungan dengan Soeharto sejak ia berada dalam kantor dinas yang sama di Divisi Diponegoro, Semarang. Dan hubungan itu semakin dekat ketika Soedjono pindah ke Jakarta dan menjabat sebagai Aspri. Dalam kedudukannya sebagai Aspri ini, Soedjono sering melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang sebagai pelobi. Dalam perannya melobi Pemerintah Jepang, pihak Indonesia mendapat berbagai sokongan modal dan bantuan ekonomi. Dan salah satu yang paling dikenal dari buah lobinya Soedjono dengan Pemerintah Jepang adalah dibangunnya Proyek Asahan yang menghabiskan dana sekitar US\$ 600 juta yang didanai oleh lima perusahaan Jepang.

Dengan semakin meningkatnya hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang, membuat investasi Jepang di Indonesia semakin meningkat. Dan meningkatnya investasi Jepang di Indonesia ini dinilai tidak diimbangi dengan itikad baik dari Jepang untuk membina hubungan yang harmonis dengan kalangan menengah pengusaha nasional. Bahkan meningkatnya investasi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi antara para pengusaha Jepang yang berada di Indonesia dengan para pengusaha nasional. Dan yang lebih tidak ditoleran, hubungan kesenjangan ekonomi ini kemudian berubah menjadi hubungan dominasi Jepang terhadap para pengusaha pribumi. Kondisi yang demikian kemudian

memunculkan kecaman-kecaman keras atas dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Dan sebagai puncak dari kecaman-kecaman tersebut adalah melutusnya Peristiwa Malari pada tahun 1974.

Dalam peristiwa ini, tentu Soedjono adalah salah satu yang dipersalahkan karena kedekatannya dengan Pemerintah Jepang. Dan ia dianggap sebagai salah satu penyebab dari munculnya dominasi ekonomi Jepang tersebut. Dalam unjuk rasa ini selain dari kecaman terhadap modal Jepang, massa juga meminta agar Aspri dibubarkan. Menanggapi kecaman keras ini, Soeharto membubarkan Aspri dan Soedjono pun kembali ke kedudukannya semula sebagai anggota MPR/DPR. Namun tak lama setelah itu, Soedjono diangkat oleh Soeharto sebagai anggota Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional —badan yang bertugas untuk menetapkan kebijakan ekonomi. Di bulan Juli 1974, Soeharto membentuk Irjenbang. Dimana Irjenbang ini merupakan staf khusus kepresidenan yang bertugas mengawasi berbagai proyek pembangunan. Dan Soedjono ditunjuk sebagai salah satu dari Irjenbang tersebut. Ia ditugaskan untuk mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh dana Inpres pada tingkat tingkat desa, kabupaten, dan kotamadya.

Peranan Soedjono dalam kancah perpolitik Orde Baru pasca Malari memang tidak terlihat dengan jelas. Berbagai media massa tidak banyak yang menyinggung peranannya ketika ia menjabat sebagai Irjenbang. Baik peranannya dalam pusaran pemerintahan Orde Baru maupun peranannya dalam hubungan Indonesia dengan Jepang. Namun sebenarnya perannya dalam kancah perpolitikan Orde Baru masih ada di sekitar pucuk kekuasaan pimpinan tertinggi Orde Baru, yakni Soeharto secara personal. Bahkan di tahun 1980an, Soedjono mengangkat Soeharto sebagai saudara batin (konteks kepercayaan kejawan). Dan Soedjono mulai menjadi penasihat spiritual Soeharto, tidak hanya untuk hubungan pribadi, namun juga menyangkut persoalan kenegaraan. Hanya saja pasca Malari ini, ia memainkan peranannya di belakang panggung (tidak terlihat oleh masyarakat luas).

Dan bagaimana dengan perannya dalam hubungan Indonesia-Jepang pasca Malari? Soedjono masih menjalin hubungan dengan Pemerintah Jepang, baik secara pribadi maupun secara formal kenegaraan. Namun tidak seintensif ketika ia masih menjabat sebagai Aspri. Beberapa kali ia berkunjung ke Jepang sebagai

perwakilan resmi Pemerintah Indonesia, salah satunya ketika PM Sato dan Kimura —Anggota Diet Jepang sekaligus sebagai Ketua Komite Kerjasama Parlemerter Indonesia-Jepang— meninggal dunia. Ia juga melakukan kunjungan kenegaraan menerima undangan resmi dari Fukuda sebelum ia diangkat sebagai perdana menteri. Dan dimasa awal Pemerintahan PM Zenko Suzuki, ia juga melakukan kunjungan kenegaraan sebagai konsolidasi awal hubungan di masa pemerintahannya. Selain itu, Soedjono juga ikut meresmikan pembentukan Komite Indonesia-Jepang yang merupakan organisasi perkumpulan pengusaha-pengusaha Indonesia dan Jepang.

Namun mengapa hubungan Soedjono dengan Pemerintah Jepang kala itu tidak seintensif ketika ia menjabat sebagai Aspri? Bisa diasumsikan karena tiga hal, pertama sebagai sintesis dari Peristiwa Malari yang kemudian membuat Soedjono lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan Jepang. Kedua, karena Pemerintah Orde Baru menjaga jarak dari Pemerintah Jepang kemudian mengisyaratkan pada Soedjono untuk ikut menjaga jarak dengan pemerintah Jepang, selain dari peran Soedjono yang memang tidak terlihat dalam panggung perpolitikan masa itu. Dan asumsi yang bisa disimpulkan ketiga adalah karena Jepang disibukkan dengan kondisi dalam negerinya dan sikap Jepang yang mengubah arah kebijakan politik luar negerinya pasca Malari.

Dari ketiga asumsi tersebut, asumsi ketigalah yang menurut penulis lebih mendasar. Saat itu kondisi dalam negeri Jepang mengalami kekacauan. Jepang disibukkan dengan agenda pembenahan negara dari korupsi yang merajalela di tataran birokrat dan politisi LDP, masalah inflasi yang terus meningkat akibat dari krisis minyak, dan masalah polusi yang banyak menelan korban. Selain itu, pasca aksi-aksi penolakan dominasi Jepang yang terjadi di Asia Tenggara, Jepang kemudian mengubah arah politik luar negerinya dengan mendekati negara-negara di Amerika dan Eropa. Ini membuat hubungan Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara tidak lagi intensif. Begitupun hubungannya dengan Indonesia, hanya sebatas pada kebutuhannya akan minyak. Dan peran Soedjono dalam hubungan Indonesia-Jepang pun tidak lagi signifikan. Namun ketika dipimpin oleh Fukuda, Jepang kembali lagi menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya ASEAN dengan nuansa baru yang lebih bersahabat.

DAFTAR REFERENSI

DOKUMEN RESMI YANG DITERBITKAN

Bank Indonesia. 1967-1978. *Annuals of Public and Co-Operative Economy*. Jakarta: Bank Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 1967-1978. *Laporan Ekspor-Impor Tahunan*. Jakarta: BPS.

SURAT KABAR DAN MAJALAH

Bussines News, Januari-Juni 1974.

Duta Masyarakat, Januari 1957, April dan Oktober 1959.

Ekspres, Mei 1971.

Harian Umum, November dan Desember 1952.

Indonesia Raya, November 1968, April 1969, Oktober 1970, Desember 1972.

Kompas, Juli 1966, April 1972, November 1975, Juli 1977, Maret 1986.

Pelita, April 1974.

Prisma, 1991.

Sin Min, Januari dan Juli 1957.

Suara Karya, Maret 1971, Juli 1974.

Tempo, Oktober 1971, Januari dan Mei 1972, Januari, Februari, Maret, Juli dan Agustus 1974, Agustus dan September 1976, Januari dan Agustus 1977, November 1983, Agustus 1988, Mei 1994, Januari 2008.

The Indonesian Quarterly 1972.

Topik, Juli 1975.

Trompet Masyarakat, Agustus dan September 1960.

KARYA ILMIAH

Windratmo. 1998. *Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia dan Diplomasi Jepang-Indonesia Studi Kasus: Kebijakan Ekonomi Indonesia di Bidang Mobil Nasional*. Jakarta: FISIP UI.

LAPORAN PENELITIAN

- Ikbar, Yanuar. 1992. *Deregulasi Bidang Perekonomian Indonesia: Suatu Penelaahan terhadap Peningkatan Investasi Jepang*. Bandung: FISIP Unpad.
- Konety, Neneng. 1996. *Pengaruh Bantuan Ekonomi Jepang terhadap Indonesia dalam Meningkatkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Bandung: FSIP Unpad.
- Misbach. 1985. *Hubungan Jepang-Indonesia pada masa Pemerintahan Takeo Fukuda*. Jember: FISIP Universitas Jember.
- Bahri, Muhammad Mossadeq. 1998. *Modal Asing dan Ketergantungan Studi Awal terhadap PMA Jepang di Indonesia*. Depok: Lembaga Penelitian UI.
- Nu'man, Mohammad. 1992. *Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Menarik Investasi Jepang (1986-1989)*. Bandung: FISIP Unpad.

ARTIKEL JURNAL

- Crouch, Harold. "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia". Cambridge University Press. Vol. 31 No. 4, Juli 1979.
- Lan Oei, Hong. "Indonesia's Economic Stabilization and Rehabilitation Program: An Evaluation". Southeast Asia Program Publications: Cornell University. Vol. 5, April 1968.
- Lipsky, Seth dan Raphael Pura. "Indonesia: Testing Time for the "New Order". Council on Foreign Relations. Vol. 57 No.1, Musim Gugur 1978.
- Malley, Michael. "Soedjono Hoemardani and Indonesian-Japanese Relations 1966-1974". Southeast Asia Program Publications: Cornell University. Vol. 48, Oktober 1989.
- Ozawa, Terutomo. "Japan's Multinational Enterprise: The Political Economy of Outward Dependency". Cambridge University Press. Vol. 30 No. 4, Juli 1978.
- R. Leavitt, Sandra. "The Lack of Security Cooperation between Southeast Asia and Japan: Yen Yes, Pax Nippon No". University of California Press. Vol. 45 No.2, Maret-April 2005.

BUKU

- Anoraga, Pandji. 1995. *Perusahaan Multi Nasional: Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Arifin, Marzuki. 1974. *Fakta, Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia.

- Arndt, H. W. 1991. *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*. Yogyakarta: UGM Press
- Badan Penerbit Yayasan Dana Bantuan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. 1983. *Presiden Soeharto: Bapak Pembangunan Indonesia: Evaluasi Pembangunan Pemerintah Orde Baru*. Jakarta: BPYDBKMI.
- Bandoro, Bantarto (ed.). 1994. *Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelajaran untuk Indonesia*. Dalam *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta: CSIS.
- Booth, Anne (ed.). 1994. *Ledakan Harga Minyak dan Dampaknya Kebijakan dan Kinerja Ekonomi Indonesia dalam Era Orde Baru*. Jakarta: UI Press.
- Center for Strategic and International Studies. 1977. *Japan-Indonesia Relations in The Context of Regionalism in Asia*. Jakarta: CSIS.
- , 1987. *Soedjono Hoemardani: Pendiri CSIS 1918-1986*. Jakarta: CSIS.
- , 1973. *Ringkasan Peristiwa: Indonesia dan Dunia Internasional*. Jakarta: CSIS.
- , 1974. *Japanese-Indonesian Relations in the Seventies*, Jakarta: CSIS.
- Chaniago, Andrinof A. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Sejak Repelita Pertama*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
- Djojohadikusumo, Soemitro. 1955. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Pembangunan.
- Dwipayana, G. dan Ramadhan K.H. 1988. *Suharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
- Dwipayana, G. dan Nazaruddin Sjamsuddin (Ed.). 1991. *Jejak Langkah Pak Harto*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Ekelund Jr., Robert B., and Robert F. Herbert. 2007. *A History of Economic Theory and Method, 5 th ed*. Illinois: Waveland Press Inc.
- Fitriani, Evi. 2000. "The Japanese Aspect of Japan's ODA to Indonesia" dalam *Japan's Official Development Assistance to Indonesia*. Jakarta: Center for Japanese Studies bekerja sama dengan JICA.

- Hadi, Syamsul. 2005. *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Japan Foundation.
- Hoemardani, Soedjono. 1981. *Renungan tentang Pembangunan*. Jakarta: CSIS.
- Hook D. Glenn, et al., Ed. 2001. *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*. New York : Sheffield Center for Japanese Studies.
- Irsan, Abdul. 2007. *Budaya & Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta: Grafindo.
- Kunio, Yoshihara. 1992. *Pembangunan ekonomi Jepang: sebuah pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Kuroyanagi, Yoneji. 1977. "A Turning Point in Japan-ASEAN Relationship", dalam *Japan-Indonesia Cooperation: Problem and Prospect*. Jakarta: CSIS.
- Karma, Mara. 2001. *Ibnu Sutowo: Mengemban Misi Revolusi sebagai Dokter, Tentara, Pejuang Minyak Bumi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirjo, Sartono, et. al. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia (VI)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuntjoro-Jakti, Heru Utomo. 1995. *Ekonomi – Politik Internasional di Asia Pasifik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1986. *Technology Transfer of Japanese Engineering Firms in Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Mochamad Yani, Yanyan dan Anak Agung Banyu Perwita. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda Karya.
- Moertopo, Ali. 1972. *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*. Jakarta: CSIS.
- Nakamura, Takafusa. 1985. *Perkembangan Ekonomi Jepang Modern*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Jepang.
- Nishihara, Masashi. 1994. *Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan pampasan perang: hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1966*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Norma – norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*. Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.

- Panglaykim, Jusuf. 1974. *Persoalan Masa Kini: Perusahaan-perusahaan Multinasional*. Jakarta: CSIS.
- . 1980. *Bisnis Internasional: Indonesia, ASEAN dan Dunia*. Jakarta: CSIS.
- . 1984. *Investasi Langsung Jepang di Kawasan ASEAN Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Panitia Penulisan Buku Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. 2005. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa ke Masa Buku IVA*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raillon, Francois. 1985. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefes. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Robinson, Richard. 2000. *Buku Hitam Rezim Soeharto*. Jakarta: Totalitas.
- Roy, S.L. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siahaan, Bisuk. 1984. *Sejarah pembangunan proyek Asahan: Membangunkan raksasa yang sedang tidur*. Jakarta: Bisuk Siahaan.
- Sobri. 1986. *Ekonomi Internasional: Teori, Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFU-UII.
- Soehoed, A.R. 1975. *Asahan: Impian yang Menjadi Kenyataan*. Tokyo: Proyek Asahan.
- Soesastro, Hadi (Ed.). 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid 2 1959 - 1966*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid 3 1966 - 1982*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soesastro, Hadi dan A.R. Sutopo (Ed.,). 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik*. Jakarta: CSIS.
- Soetjipto, Ani. 2000. "Progress Report Analysis of Japan's Aid Policy to Indonesia" dalam *Japan's Official Development Assistance to Indonesia*. Jakarta: Center for Japanese Studies bekerja sama dengan JICA.

Stockwin. 1984. *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang*. Yogyakarta: UGM Press.

Sularto, St. (ed.). 2000. *Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Sumantoro. 1987. *Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problema Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia.

Suryadinata, Leo. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.

-----, 1992. *Golkar dan Militer Studi tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.

Tektjeng, Lie & Yoshida Teigo. 1970. *Some Remarks on The Problems and Difficulties Besetting Present – Day Indonesia – Japanese Relations*. Djakarta: LIPI.

Tektjeng, Lie. 1970. *An Indonesian Perspective: Japanese-Indonesian Relations in The Seventies*. Djakarta: LIPI.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1973. 27 April 2012. <http://www.sipruu.ditjenpum.go.id>.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

Sambutan Soedjono Hoemardani Selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Indonesia-Jepang Ketiga, Jakarta-Yogyakarta, 3-6 Mei 1976

Opening Remarks

Soedjono HOEMARDANI*

Your Excellency,
Honoured Guests,
Ladies and Gentlemen,

Two and a half years after the First Japanese-Indonesian Conference, the CSIS is once again privileged to host another Japanese-Indonesian Conference, this one the third in the series.

I am particularly grateful for having been given the honour of opening this conference, and the opportunity to say a few words of welcome on this occasion. It is more than a mere formality when I say that it is my sincere hope that this Conference will contribute to the further development of the good relations, friendship and cooperation that have already been established between our two countries.

* Honorary Chairman, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta; Inspector General for Development (Irtjenbang).

(Lanjutan)

The first two Cortle-tt-ru n we... c llar,u "ilc-d
...phc•r ('oj fiic-ntflines',111d IJJI'IIIIt'S\ lh,11 t'IIIQUI oll(t'l till'
I'."k
I'll'III\ 111\W ol lht• 1J11 th.u ,, t'III Side-t .tblc• pr opor IIott of
tiHN oll't'IHirtg thl' prt• I'lll
no duabt lh,u this Conl c•rt•rKt' will JHovt• tu he• t•vc•n mort•
II\ dv .111J MII't-t')htll han wen• tlw otht•a .

The la ieu d,hip, n-riprocal undt-r landing
bendinal rel. uion-. rh,u link J•P•III and Indnrwsi.t tt•st upon
"rong lillndt tiou.
d,wous •the: exisltne of paralld iJU:t cts bctwet•n the two
(OIIIIIIe'II.

On the one hand, Japan's own rorllined senuity and
gmwth dq>end upon thr maintenance of }Ware and security
111 the Asia Pacific n-gion. On the otlwr hand, Indonesia's
dl ivc• tn dcH•Iop and w rt'•tlite her national ideals also rt'•
<putes titt• JH<HC',)r•mity ,wd stability of tlw Asia-Pac ilic
tegiou itt genetal, .utd ot Southwast Asia in particular. These
1e<ilitit'II help to explain the moperative and mutually sup-
portivt• n-larions th,lf dte p<ople of hnth nations ha\ 't'
de•vc•loped togc•th<'l, 'c•latiuns, that both sides agree, comain
nunterroupm iiJilit
dc•vc•loplllt:lll.

The c'\\,hlhbmeru and growth of the Association of
Soutltc-at
rl t• nppnttuniry to hurht-r improve and intensify het rdationm
with c;u h of tilt' mc•tnht•t•st,ues of the Association. Tlw llvt'
A.)• AN JJI<IIIbc•J-Matt's and .Jap.mrnust wut k togethet 111 c•n-
c• c•wlllltiiJo(, It ic•ndly and mutually-benefidal relation
IIIfl\ Ilww 1c•louiomlups must be fimlly based on M.rJ
lw II',t\111.tw.uc-w•.,s, undeJst.llding and Jt'(ognition of t'a< h
"he's dtai.te rc•r, I"ohl•ms .tlll d needs.

Jlu ,\t.tblrslum•Jtt.111d m.IInt(name of sound and ton
durlllg .,J,altumhtp""It .1 thue wlll makr 11 po stbl f

(Lanjutan)

J. tp. ttl, , t\ a clt•vt•lupNI ml iun, w br oacn ht'r T(JI sn
the

t\ I: .AN

\, tlu. tble•rouutbu! io₁₁ that \$lit' has made, i now makwg, ..nd
will, I Mil quite coufidern, continue to rnake in assisting the
ASEAN cotutl it-to build their economies, io raise tht>
wc•llau• of thcit peoples, and to strengthen the resilience of
thc•it uattom. As the member-states of ASF.AN develop, so
ahu will the ,ignificance of ASEAN as a regional community
ul irHt•r derwnciem countrie!> grow, thereby bnnging closer to
a< IIC! Vemcm, our common goals of pea-ce, freedom and pros-
fH'III) fl>r all Llle people!! of our region.

The wmribudons that Japan can makes within her power
to make to this process of national and regional develop-
mem are truly numerow. They range from the general -such
a> the passing on to the ASEAN members of Japan's own ex-
perience as a nation that has, within less than three decades,
!>ucccdcd in bewming one of the most important economic
power!> in the world — to the specific — such as intensifying
her c•ffons to help the ASEAN states overcome their problems
and <J Jlain

The potential for fresh initiatives in Japanese-Indonesian
roope: ellion alo

nughtily to develop in ways that will satisfy the needs of her
pc•ople, and in thieffort she requires many things Lhat Japan
is; capable of pr-oviding. Indonesia wishes to achieve in-
du ll

tlu rumh to help. The transfer of indusrrial technology, and
tlw transmittal of the great variety of skills and specialized
knowil-dgc• required to create competitive and economicall)
— viaiJlc• indu trie.

wlurh Indonesia muld. benefit t"normously from Japanese
aMillilatHe all(! coopcraun.

(<pit.rl and finaru ial anistaru-t" are vital for Indon ra's
11U 11omll <11-vclopment. I would hkl' tn take thr opponunuy
ro late: 'luie t mpharkAAlly that the aunude of the Indonnan

„fllllt'III.Ilh>n.d r'l'.llh>n,fiiJ" ch.ll .ut• 1111ly ulmucu.cllurwlit
I: .hh lu 11\te't ll J.qMn .nul Indnllt""-l P'.l out!
"-'' 111 111tl,h cwn n,lllmt.tl t<onomlt'\ 1111Y III' ll1111lally up
l">111\N' ,tllld t'1111J'ft•Jllt'111.11"^\. Jmlont\1.1 1t'JH (">1111> a11 1111<01 -
c.1111 ""111,t ol 'u.d 1-' m.ttnl,tl,, im ludmg oil. lor Japanc'-c
1111h1'11,, "hdc· J<JMllt't· prudun:.. lind an incrt'a ingly
,.du.thk m.u.i.t' 111 Indmw t.l

In view of this complementary economic relationship
of Indonesia's domestic requirements, it will be
highlighted under: and the reasons for increases in the
production of Indonesian raw materials and oil. It is also to be
noted

that it will not fail to utilize the investment opportunities
presented by the presence in the same region of countries
such as Indonesia, whose requirements for development
final(ly) are necessarily great. Capital, whether in the form of
investment or of development assistance
provided by and within Indonesia. There is a wide variety
of ways in which Japan may contribute to the development of
Indonesia
people of Indonesia.
timuOth
context

,\!though profitable economic relations are of indis-
putable importance. They alone are sufficient to guarantee
the future and the
recognition of each other's characteristics, recognition
of their values and aspirations- these are the soft factors
which determine the quality of a relationship. What follows is
the development of a national identity. A fundamental
development is the oil industry which has been
developed. I think that suggests the essence of the
development and the development of the
development of the oil industry. I think the
development of the oil industry is the development of the
development of the oil industry. I think the development of the
development of the oil industry is the development of the
development of the oil industry.

Keputusan Presiden mengenai Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sapta Krida pada umumnya serta peningkatan dan pemeliharaan stabilitas ekonomi pada khususnya, diperlukan adanya badan yang bertugas membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan secara cepat serta pengendalian pelaksanaannya secara terus-menerus yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi dan pembangunan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang telah ada perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dewasa ini.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1973.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1966.

Menetapkan :

Penyempurnaan dan penyesuaian Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional sebagai berikut

Pasal 1

KEDUDUKAN.

(1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional merupakan suatu badan yang membantu Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dalam bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan dan memelihara stabilitas ekonomi ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

(Lanjutan)

Pasal 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.

(1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertugas untuk membahas masalah-masalah ekonomi yang dihadapi, menetapkan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaannya, agar dapat berjalan sebaik-baiknya ;

(2) Ruang lingkup kegiatan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional meliputi bidang-bidang Moneter, Distribusi dan Produksi serta Intelijen ekonomi.

Pasal 3
SUSUNAN

(1) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, sedangkan Wakil Presiden adalah Wakil Ketua Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

(2) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional mempunyai anggota-anggota tetap yang terdiri dari :

1. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Perindustrian ;
4. Menteri Perdagangan ;
5. Menteri Pertanian ;
6. Menteri Perhubungan ;
7. Menteri Penerangan ;
8. Menteri Negara Riset ;
9. Menteri/Sekretaris Negara ;
10. Gubernur Bank Indonesia.

(3) Disamping anggota-anggota tetap seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal 3 Keputusan Presiden ini, Presiden dapat menetapkan Menteri/Pejabat tertentu sebagai anggota tidak tetap.

Pasal 4
SEKRETARIAT.

(1) Sekretariat Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Negara.

(Lanjutan)

Menteri/Sekretaris Negara adalah Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

(2) Sekretariat Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bertugas menyiapkan sidang-sidang Dewan serta merumuskan dan meneruskan putusan-putusan sidang Dewan kepada anggota dan instansi-instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

SIDANG DAN PESERTA SIDANG.

(1) Kecuali dalam keadaan tertentu, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional bersidang sekali setiap minggu dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan.

(2) Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dihadiri oleh para anggota tetap, atas petunjuk Presiden anggota-anggota tidak tetap tertentu dapat pula hadir.

(3) Disamping para anggota tetap dan anggota tidak tetap, dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional hadir pula Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kepala Badan Urusan Logistik, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, serta pejabat-pejabat lain yang dianggap perlu oleh Presiden.

Pasal 6

SUB DEWAN MONETER, SUB DEWAN DISTRIBUSI DAN SUB DEWAN PRODUKSI.

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional serta kelancaran jalannya sidang-sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, maka Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dibagi dalam Sub-Dewan Moneter, Sub-Dewan Distribusi dan Sub-Dewan Produksi.

(2) Susunan Sub-Dewan - Sub-Dewan adalah sebagai berikut :

- (a) Sub-Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua, Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua dan wakil-wakil dari

(Lanjutan)

Departemen dan instansi lain yang ada hubungannya dengan masalah-masalah moneter dan yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagai anggota ;

- (b) Sub-Dewan Distribusi terdiri dari Menteri Perdagangan sebagai Ketua, Menteri Perhubungan sebagai Wakil Ketua dan wakil-wakil dari Departemen dan instansi lain yang ada hubungannya dengan masalah-masalah distribusi dan yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, sebagai anggota ;
- (c) Sub-Dewan Produksi terdiri dari Menteri Perindustrian sebagai Ketua, Menteri Pertanian sebagai Wakil Ketua dan wakil-wakil dari Departemen dan instansi lain yang ada hubungannya dengan masalah-masalah produksi dan yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, sebagai anggota.

(3). Sub-Dewan mengadakan sidang setiap diperlukan atas prakarsa ketuanya dan atau atas petunjuk Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, baik untuk membicarakan masalah- masalah yang dihadapi untuk kemudian diajukan kepada Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, maupun untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

(4). Ketua-Ketua Sub-Dewan memberikan laporan kepada Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional mengenai keadaan bidangnya masing-masing dan masalah-masalah yang timbul yang memerlukan Keputusan Dewan.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN STABILISASI EKONOMI NASIONAL.

(1). Pelaksanaan Keputusan-Keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dilakukan oleh Departemen dan Instansi yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Dewan.

(2). Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS mengikuti dan menkoordinir pelaksanaan setiap keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

Pasal 8

LAIN-LAIN DAN PENUTUP.

(Lanjutan)

(1). Pembiayaan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dibebankan kepada Sekretariat Negara dan pembiayaan Sub-Dewan dibebankan kepada Departemen dari Ketua Sub-Dewan yang bersangkutan.

(2). Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 1973.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.



Investasi Jepang di Luar Negeri Berdasarkan Sektor dan Tempatnya pada Kurun Waktu 1951-1969

Penanaman Modal Jepang di luar negeri menurut Sektor dan Tempat 1951 — 1969 (\$ jutaan)									
	Amerika Utara	Amerika Latin	Asia	Eropah	Timur Tengah	Afrika	Oceania	Jumlah	Prosen
Sektor									
Perpabrikian	160,2	248,9	232,7	15,4	2,8	20,8	41,1	721,6	27,0
Pengolahan									
Sumber-sumber									
Alam (a)	129,1	95,8	265,8	1,0	302,0	57,2	107,6	958,5	35,6
Perdagangan	266,3	14,0	11,3	23,0	0,5	0,1	7,5	322,7	12,1
Lain-lain (b)	164,8	153,8	94,2	263,6	1,0	0,8	1,9	685,1	25,3
Jumlah	720,4	512,5	604,0	303,0	306,3	76,6	158,1	2.682,9	100,0
Prosen	26,9	19,1	22,5	11,3	11,4	2,9	5,9	100,0	

Sumber: Jusuf Panglaykim (1974:141) disarikan dari Bank of Japan dan MITI.

Catatan:

- a) Termasuk pertanian, pengolahan hutan, penangkapan ikan dan pertambangan . Dan pertambangan mencapai lebih dari 0% dari jumlah diatas.
- b) Termasuk pelaksanaan bangunan, keuangan, asuransi, kantor-kantor cabang di luar negeri dan saluran-saluran distribusi.

Lampiran 4

Proyek-proyek untuk Pembangunan Sipil (dalam Jutaan Rupiah)

No	Proyek	1961	1962	1963	1964	1965
1	Asian Games	1537	2100	-	-	-
2	Proyek Sarinah	-	250	750	-	8972
3	Monumen Irian Barat	-	50	-	-	-
4	Ganefo	-	-	6687	-	-
5	Gedung Pola	60	150	100	-	-
6	Komando Proyek Conefo	-	-	-	-	119.000
7	Peringatan Dasawarsa KAA	-	-	-	-	18.224
8	Proyek Sarinah	-	-	-	-	8972
9	Federasi Ganefo	-	-	-	-	13.004
10	Proyek-Proyek Lain	13.000	-	-	-	-
Jumlah		14.597	2550	7537	1589*	160.187

Sumber: Ichtisar Tentang Pelaksanaan Tap. MPRS No. 2/MPRS/60 Mengenai Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Keterangan:

Dana ini antara lain untuk membiayai proyek pembangunan Monumen Nasional, Monumen Irian Barat, Patung Pahlawan dan untuk indoktrinasi Manipol USDEK. Data lebih rinci mengenai besarnya biaya untuk masing-masing proyek ini tidak ditemukan.

Foreign Direct Investment (FDI) yang Disetujui di Indonesia selama periode 1967-1980

No.	Negara	Banyaknya Proyek	Jumlah (dalam US\$ Juta)
1	Jepang	198	3.336,0
2	Hong Kong	126	890,9
3	Kanada	5	863,3
4	Amerika Serikat	77	571,6
5	Belanda	47	320,0
6	Philipina	14	292,6
7	Australia	37	208,4
8	Swiss	19	144,6
9	Singapura	34	129,3
Total (termasuk negara lain)		801	9.050,2

Sumber: BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Lampiran 6

ODA Jepang bagi Indonesia 1966-1978 (dalam milyar Yen)

Tahun	Hibah&Kerjasama	Pinjaman
	Jumlah	Jumlah
1966	n / a	10,80
1967	n / a	34,38
1968	n / a	29,47
1969	4,04	29,32
1970	4,27	36,00
1971	4,44	73,33
1972	4,00	63,92
1973	4,42	142,78
1974	1,73	60,00
1975	3,11	61,62
1976	5,00	67,25
1977	7,56	55,50
1978	8,81	90,05

Sumber: JICA (Japan International Cooperation Agency)

Japanese Crude Oil Import by Source (Thousand of Barel per Day)

Country	1973	1979
Algeria	-	6
Irak	-	262
Kuwait	488	466 (10%)
Libya	31	7
Qatar	-	140
Saudi Arabia	1.148	1.672 (35%)
United Arab Emirates	511	494 (10%)
Indonesia	638	699 (14%)
Iran	1.554	468 (10%)
Nigeria	101	-
Venezuela	7	8
Total OPEC	4.478	4.222
Other	397	624
Total	4.875	4.846

Sumber: Morse, 1978, hal. 8.

Soedjono Hoemardani

Sumber: *Prisma*, 1991.

Soedjono Hoemardani mengenakan baju tradisional Jawa (kiri) dan atribut militer (kanan). Selain sebagai seorang militer, Soedjono juga dikenal sebagai penasehat spiritual Soeharto (konsep kepercayaan Kejawen).

Soedjono Hoemardani Membangun Hubungan Indonesia-Jepang



Sumber: *Prisma*, 1991

Soedjono Hoemardani mendampingi salah satu grup perusahaan Jepang dalam kunjungannya menemui Soeharto.



Sumber: *Prisma*, 1991

Soedjono Hoemardani bersama dengan Ali Moertopo aktif membina hubungan Indonesia-Jepang.

Soedjono Hoemardani dan Proyek Asahan



Sumber: *Prisma*, 1991.

Soedjono Hoemardani Bersama dengan A.R.Suhud (Kepala Proyek Asahan) dan Mara Halim (Gubernur Sumatera Utara) Meninjau Tahap Awal Proyek Asahan.

Pelantikan Empat Orang Irjenbang



Sumber: *Suara Karya*, 24 Juli 1974.

Empat orang Irjenbang dilantik oleh Soeharto pada 23 Juli 1974 di Bina Graha. Dari kiri ke kanan: E. Sukasah Sumawijaya, Marsekal Madya TNI Sutopo, Mayjen TNI Soedjono Hoemardani, dan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) dr. Sudjono.

Soedjono Hoemardani Menerima Tanda Jasa Bintang Harta Kelas I

Sumber: *Prisma*, 1991.

Bersama dengan Toshio Yamazaki (Duta Besar Jepang) dan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro usai menerima tanda jasa Bintang Harta Kelas I dari Kaisar Jepang pada 20 November 1983.